

PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

**(Studi tentang Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing Kota Malang)**

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memperoleh Gelar Strata Satu Pada Jurusan Administrasi
Publik**

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

Oleh :

**WAHYU SAFARULLOH
NIM. 0410310131**



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK

KONSENTRASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

MALANG

2008

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat
(Studi tentang Efektivitas Pelaksanaan di Kelurahan Polowijen
Kecamatan Blimbing Kota Malang).

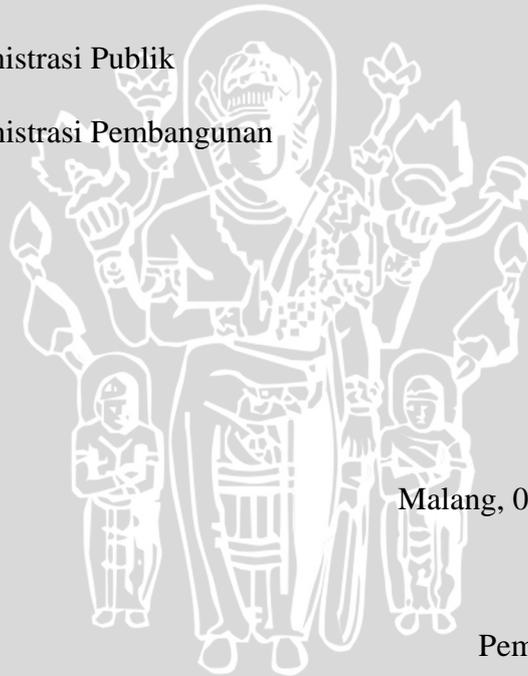
Disusun oleh : WAHYU SAFARULLOH

NIM : 0410310131

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Konsentrasi : Administrasi Pembangunan



Malang, 08 September 2008

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Abdul Hakim, M.Si

Drs. Abdullah Said, M.Si

TANDA PENGESAHAN

TELAH DIPERTAHANKAN DIDEPAN MAJELIS PENGUJI SKRIPSI,
 FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA, PADA:

Hari : Rabu
 Tanggal : 22 Oktober 2008
 Jam : 09.00 WIB
 Judul :Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat (Studi tentang Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Polowijen Kecamatan Belimbing Kota Malang).

Disusun oleh : Wahyu Safarulloh

NIM : 0410310131

DAN DINYATAKAN LULUS

MAJELIS PENGUJI

KETUA

ANGGOTA

Dr. Abdul Hakim, MSi
 NIP. 131 475 903

Drs. Abdullah Said, MSi
 NIP. 132 302 464

ANGGOTA

ANGGOTA

Dr. Siti Rochmah, MSi
 NIP. 131 573 959

Drs. Dwi Sulisty, MPA
 NIP. 131 410 390

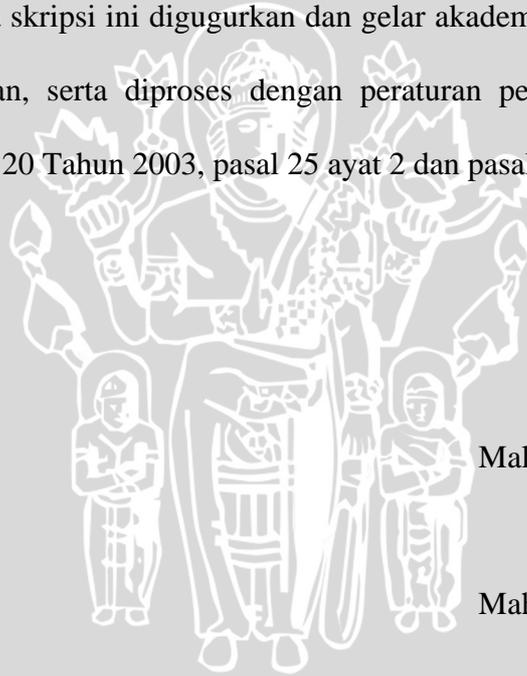


PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang sepengetahuan saya, didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SI) dibatalkan, serta diproses dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

2008



Malang, 14 Oktober

Mahasiswa

Wahyu Safarulloh

RINGKASAN

Wahyu Safarulloh, 2008. **PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Studi tentang Efektivitas PNPM di Kelurahan Polowijen Kec. Blimbing Kota Malang)**. Skripsi. Konsentrasi Administrasi Pembangunan. Jurusan Administrasi Publik. Universitas Brawijaya Malang. **Dosen Pembimbing: (1) Dr. Abdul Hakim, M.Si (2) Drs. Abdullah Said, M.Si**

Kemiskinan bukan hanya masalah di Negara Dunia Ketiga tetapi juga masalah di negara maju. Badai krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada pertengahan tahun 1997 memperburuk keadaan masyarakat Indonesia yang telah menyebabkan meningkatnya jumlah penduduk miskin mencapai 40% dari total penduduk dan pada tahun 2007 berkurang menjadi 16,58%. Pada tahun 2007 pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang berlandaskan pada kelembagaan lokal yaitu Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) sebagai upaya mengurangi masyarakat miskin. Namun pencapaian hasil PNPM di tiap daerah berbeda-beda dan tingkat efektivitas dari PNPM tersebut juga belum diketahui. Hal ini dikarenakan faktor dari masyarakat dan kinerja dari BKM itu sendiri.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan upaya pemberdayaan masyarakat melalui PNPM, untuk mengetahui tingkat efektivitas dari PNPM, dan untuk mengetahui dan menggambarkan faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan PNPM.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan secara purposive sampling (sampling bertujuan). Analisa data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan PNPM di BKM Polowijen belum berjalan dengan sempurna karena dari empat komponen PNPM baru berjalan tiga komponen PNPM. Tiga komponen tersebut adalah pengembangan masyarakat, bantuan langsung masyarakat dan peningkatan kapasitas pemerintahan dan pelaku lokal. Komponen yang paling berjalan adalah bantuan langsung masyarakat yang didalamnya berfokus pada pembangunan sarana dan prasarana lingkungan. Tingkat partisipasi masyarakat pada pelatihan-pelatihan yang diadakan BKM kurang mendapat respon dari masyarakat sehingga tujuan inti dari PNPM belum tercapai. Pengawasan dan pengevaluasian dilakukan oleh BKM dan seluruh masyarakat.

Tingkat efektivitas dari PNPM ini bisa dikatakan kurang efektif karena kondisi masyarakat Kelurahan Polowijen sudah cukup berdaya sehingga pelaksanaan PNPM hanya berfokus pada pembangunan sarana dan prasarana lingkungan. Hal ini kurang sejalan dengan tujuan PNPM yaitu memberdayakan masyarakat melalui pelatihan yang bertujuan agar masyarakat hidup mandiri.

Faktor penghambat dari pelaksanaan PNPM ini diantaranya adalah kurangnya loyalitas dari pengurus dan anggota BKM dalam melaksanakan PNPM. Selain itu, kurangnya partisipasi dari masyarakat pada pelatihan-pelatihan yang diadakan BKM menghambat pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh BKM.

SUMMARY

Wahyu Safarulloh, 2008. **Overcoming Poverty through Social Empowerment. (the Study of the effectiveness PNPM in Polowijen sub-district, Blimbing district, Malang City)**. Thesis. Development Administration Concentration Department. Brawijaya University. **Advisors: (1) Dr. Abdul Hakim, M.Si (2) Drs. Abdullah Said, M.Si**

Poverty is not only the main problem in the third world countries, but also in developed countries. Indonesia's 1997 economic crisis caused the poverty rate to rise to 40% this number decreased by 16.58% over the next ten years. Modeled after the local institution the society self-supporting body (BKM) the Indonesian government introduced the National Program for Social Empowerment (PNPM) in 2007 to alleviate poverty. However, PNPM results vary from region to region due to society's factor and the work of BKM, leaving the program's effectiveness uncertain.

The following work analyses and describes social empowerment effort and investigates the PNPM'S program's effectiveness. This thesis will also describe the supporting and obstructing factors for the program's implementation.

The researcher employs the descriptive qualitative approach. Purposives is used for data coll. The data analysis in this research is done through several stages, namely data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

Based on research, it can be concluded that the implementation of PNPM in BKM Polowijen is incomplete because only three of the four PNPM components are working. Those three functioning components are community development, community-direct aids, and the increase of governmental and local capacities. Community-direct aid which focuses on building infrastructure, is the most successfull component. There is little community participation in BKM training, so the goals of BKM have not been reached yet. The community works alongside BKM to supervise and evaluate the program .

Because Polowijen was already socially empowered, PNPM'S social empowerment efforts are redundant and therefore ineffective. As a result, PNPM focuses on developing infrastructure in Polowijen. PNPM operates in order to empower communities through training, and so its work in Polowijen is not entirely in line with its mission .

A lack of loyalty among BKM management and members inhibits the implementation of PNPM. Furthermore, weak participation rates in BKM trainings also inhibit community empowerment.

KATA PENGANTAR

Assamualaikum Wr.Wb

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas karunia-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan semaksimal mungkin. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada jurusan Administrasi Publik Universitas Brawijaya.

Tema dari skripsi ini adalah mengenai pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat, dengan lokasi studi pada BKM Polowijen di Kelurahan Polowijen dengan judul “Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat (Studi tentang Efektivitas Pelaksanaan PNPM di Kelurahan Polowijen Kecamatan Belimbing Kota Malang).”

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik tanpa ketelibatn dari berbagai pihak yang berkenan membantu memberikan pemikiran, kritik, dan saran-saran, karena itu penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya.
2. Ayahanda H. Masil, Ibunda Hj. Masanah (Almh), Kakak-kakak dan adikku yang tak putus-putus berdo'a dan memberikan dukungan moril maupun materiil serta mengingatkan untuk selalu berdo'a dan ingat kepada-Nya.
3. Prof.Dr. Suhandak, M.Ec., selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
4. Pembantu Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
5. Prof. Drs. Solichin Abdul Wahab, MA. PhD, selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
6. Imam Hanafi, S.Sos., M.Si, MS, selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
7. Dr. Abdul Hakim, Msi selaku dosen pembimbing atas masukan dan saran-saran dalam penyusunan skripsi ini.

8. Drs. Abdullah Said, Msi, selaku dosen pembimbing atas masukan dan saran-saran dalam penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Administrasi atas segala ilmu yang diberikan.
10. Pengurus BKM Polowijen, Kelurahan Polowijen, dan masyarakat Kelurahan Polowijen atas kerjasama dan bantuannya.
11. Teman-teman Administrasi Publik angkatan 2004, terima kasih atas segala kenangan dan pengalamannya, dan
12. semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna sehingga penulis sangat mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak demi sempurnanya skripsi ini. Penulis juga memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah, itu semata-mata datang dari saya, dan jika ada yang bermanfaat itu semata-mata datang dari Allah SWT karena penulis menyadari bahwa penulis hanya manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa. Akhir kata penulis mengharapkan banyak manfaat dari skripsi ini baik untuk masa sekarang maupun pada masa yang akan datang. Amin.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Malang, September 2008

Penulis

DAFTAR ISI

MOTTO

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PENGESAHAN

RINGKASAN i

SUMMARY ii

KATA PENGANTAR..... iii

DAFTAR ISI..... v

DAFTAR TABEL x

DAFTAR GAMBAR..... xi

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah Penelitian 6

C. Tujuan Penelitian 6

D. Kontribusi Penelitian..... 7

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Pemberdayaan

1. Definisi Pemberdayaan 8

2. Indikator pemberdayaan..... 10

3. Strategi Pemberdayaan..... 11

4. Pendekatan pemberdayaan..... 12

5. Cara Memberdayakan Masyarakat..... 13

B. Kemiskinan

1. Definisi Kemiskinan 13

2. Ciri-ciri Keluarga Miskin..... 14

3. Macam-macam Kemiskinan..... 15

4. Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan..... 17

C. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian PNPM..... 19

2. Tujuan PNPM 20

3. Strategi PNPM	21
4. Prinsip Dasar PNPM	21
5. Pendekatan PNPM	23
6. Kategori Program	23
7. Komponen Program	24
8. Struktur Kelembagaan PNPM.....	25
D. Badan Keswadayaan Masyarakat	
1. Pengertian BKM	29
2. Tujuan BKM	30
3. Peran dan Fungsi BKM.....	30
4. Proses Pembentukan BKM	32
5. Prinsip Dasar BKM.....	33
6. Indikator Kinerja	34
7. Kewenangan BKM.....	34
E. Efektivitas	
1. Pengertian Efektivitas	34
2. Ukuran Efektivitas	35

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	37
B. Fokus Penelitian	37
C. Lokasi Dan Situs Penelitian	38
D. Sumber dan Jenis Data	39
E. Teknik Pengumpulan data.....	39
F. Instrument Penelitian	40
G. Analisa Data	40

BAB IV. PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum	
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
a. Kondisi Geografis Obyek Penelitian.....	43
b. Kondisi Penduduk.....	43

c. Kondisi Mata Pencarian Penduduk	45
d. Keadaan Mobilitas Penduduk	47
e. Kelembagaan Kelurahan Polowijen	48
2. Gambaran Umum Permasalahan Kemiskinan Kelurahan Polowijen	
a. Kondisi Kesehatan	50
b. Kondisi Pendidikan	51
c. Kondisi Ekonomi	51
d. Kondisi Lingkungan	51
e. Kondisi Permukiman	52
f. Akses Pelayanan Pembangunan	52
3. Gambaran Umum PNPM dan BKM Polowijen	
a. Gambaran Umum PNPM	53
b. Proses Pelaksanaan PNPM	53
c. Gambaran Umum Pelaksanaan PNPM di Kelurahan Polowijen	55
d. Gambaran Umum BKM Polowijen	56
B. Penyajian Data Fokus	
1. Proses Pelaksanaan PNPM	63
a) Perencanaan PNPM	63
a.1. Pengembangan Masyarakat	64
a.2. Bantuan Langsung Masyarakat	64
a.3. Peningkatan Kapasitas Pemerintahan dan Pelaku Lokal	64
a.4. Bantuan Pengelolaan dan Pengembangan Pprogram	64
b) Pelaksanaan PNPM di Kelurahan Polowijen	65
b.1. Pengembangan Masyarakat	65
b.1.1. Pengembangan Masyarakat Kelurahan Polowijen	65
b.1.2. Pengakuan dan dukungan Masyarakat polowijen	66
b.2. Bantuan Langsung Masyarakat	68
b.3. Peningkatan Kapasitas Pemerintahan dan Pelaku Lokal	70
b.4. Bantuan Pengelolaan dan Pengembangan Program	71
c) Pengawasan PNPM	72
d) Evaluasi PNPM	74

2.	Tingkat Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat.	
a)	Tingkat Keberdayaan dan Kemandirian Masyarakat.....	75
b)	Tingkat Partisipasi Masyarakat.....	78
c)	Tingkat Kapasitas Kelembagaan Masyarakat.....	81
3.	Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan PNPM.	
a)	Faktor Pendukung.....	82
b)	Faktor Penghambat.....	85
C. Analisis Data		
1.	Proses Pelaksanaan PNPM.....	86
a)	Perencanaan PNPM.....	86
a.1.	Pengembangan Masyarakat.....	87
a.2.	Bantuan Langsung masyarakat.....	87
a.3.	Peningkatan Kapasitas Pemerintahan dan Pelaku Lokal.....	87
a.4.	Bantuan Pengelolaan dan Pengembangan Program.....	88
b)	Pelaksanaan PNPM.....	88
b.1.	Pengembangan Masyarakat.....	91
b.1.1.	Pengembangan Masyarakat.....	91
b.1.2.	Pengakuan dan Dukungan Masyarakat.....	91
b.2.	Bantuan Langsung masyarakat.....	93
b.3.	Peningkatan Kapasitas Pemerintahan dan Pelaku Lokal.....	94
b.4.	Bantuan Pengelolaan dan Pengembangan Program.....	95
c)	Pengawasan PNPM.....	96
d)	Evaluasi PNPM.....	97
2.	Tingkat Efektivitas PNPM.....	97
a)	Tingkat Keberdayaan dan Kemandirian Masyarakat.....	98
b)	Tingkat Partisipasi Masyarakat.....	99
c)	Tingkat Kapasitas Kelembagaan Masyarakat.....	99
3.	Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan PNPM.....	100
a.	Faktor Pendukung.....	100
b.	Faktor Penghambat.....	101

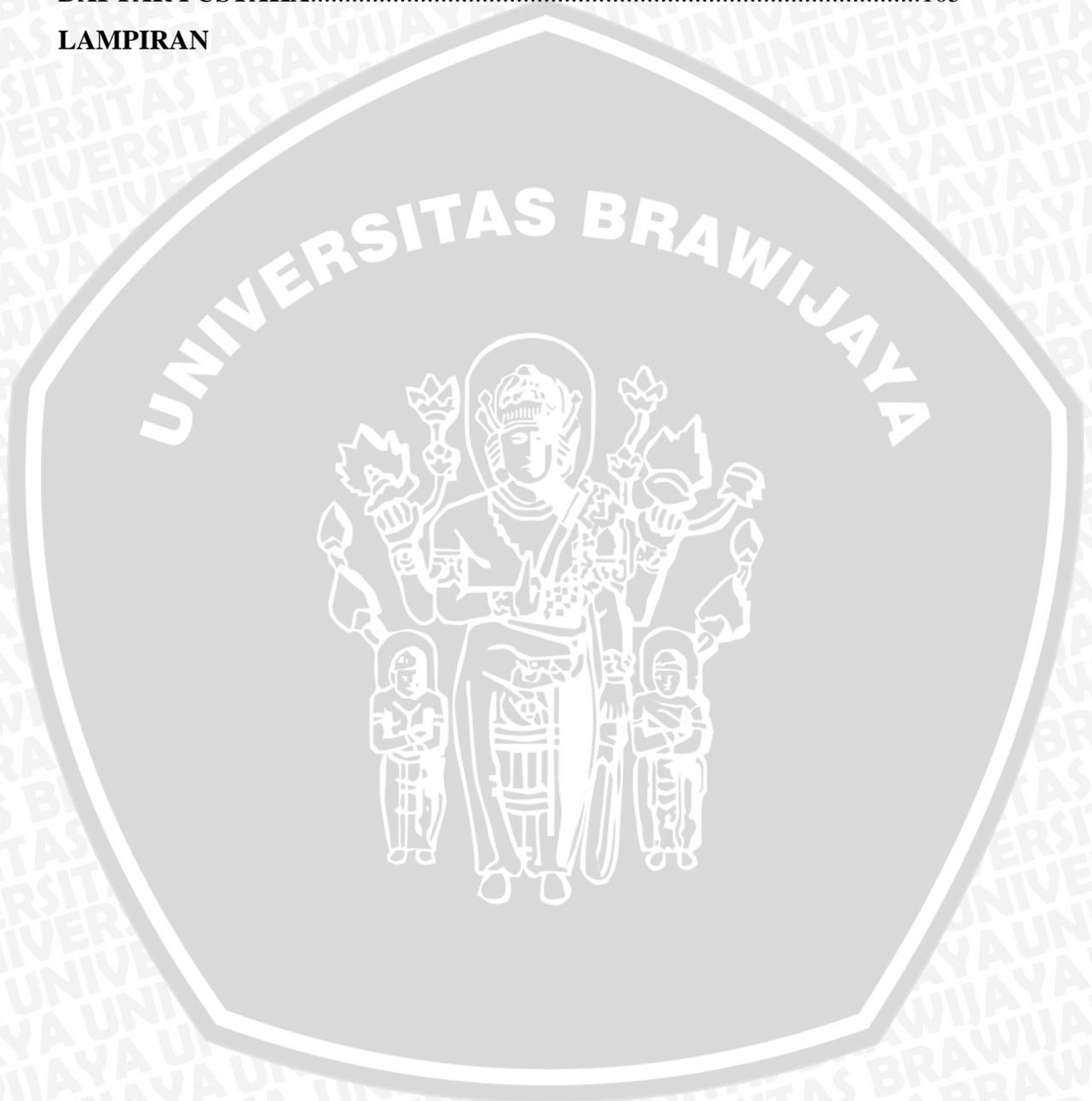
BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan 102

B. Saran 104

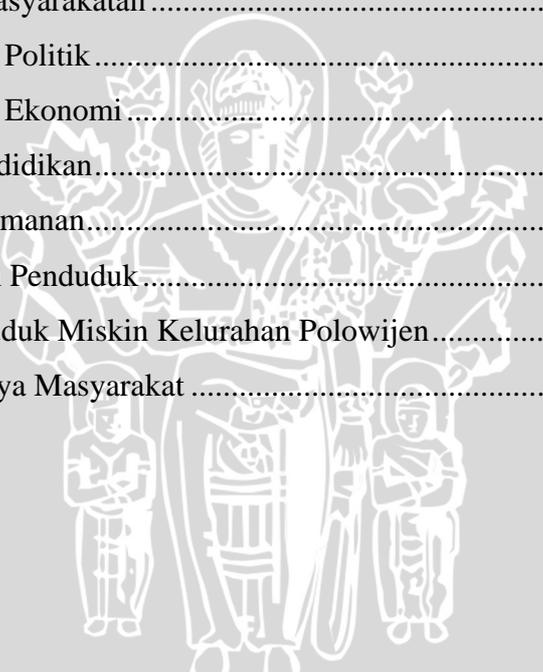
DAFTAR PUSTAKA 105

LAMPIRAN



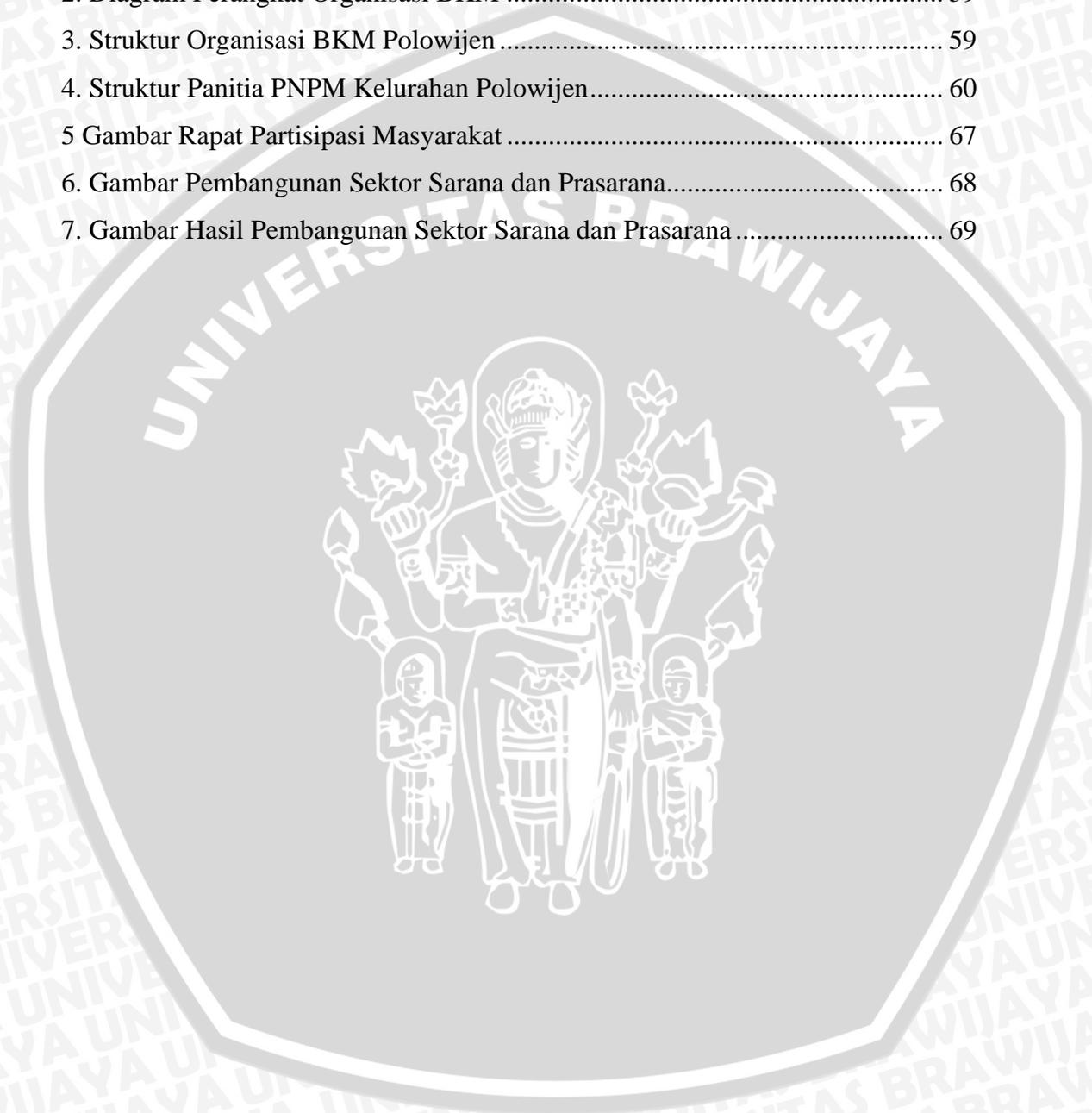
DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 1 Jumlah dan Kepadatan Penduduk	43
Tabel 2 Jumlah Penduduk Kelurahan Polowijen Menurut Jenis Kelamin	44
Tabel 3 Jumlah Penduduk Kelurahan Polowijen Menurut Golongan Umur	44
Tabel 4 Jumlah Penduduk Kelurahan Polowijen Menurut Pendidikan	45
Tabel 5 Jumlah Penduduk Kelurahan Polowijen Menurut Mata Pencaharian.....	46
Tabel 6 Jumlah Pencari Kerja	47
Tabel 7 Keadaan Mobilitas Penduduk	47
Tabel 8 Lembaga Pemerintahan.....	48
Tabel 9 Lembaga Kemasyarakatan	48
Tabel 10 Kelembagaan Politik	49
Tabel 11 Kelembagaan Ekonomi	49
Tabel 12 Lembaga Pendidikan.....	50
Tabel 13 Lembaga Keamanan.....	50
Tabel 14 Kesejahteraan Penduduk.....	77
Tabel 15 Jumlah Penduduk Miskin Kelurahan Polowijen.....	78
Tabel 16 Daftar Swadaya Masyarakat	80



DAFTAR GAMBAR

	Hal.
1. Bagan Analisis Data Model Interaktif.....	41
2. Diagram Perangkat Organisasi BKM	59
3. Struktur Organisasi BKM Polowijen	59
4. Struktur Panitia PNPM Kelurahan Polowijen.....	60
5 Gambar Rapat Partisipasi Masyarakat	67
6. Gambar Pembangunan Sektor Sarana dan Prasarana.....	68
7. Gambar Hasil Pembangunan Sektor Sarana dan Prasarana.....	69



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berdasarkan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Pembangunan nasional yang dilakukan Bangsa Indonesia pada hakekatnya merupakan serangkaian upaya yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan serta mewujudkan tujuan nasional.

Pembangunan itu sendiri mempunyai pengertian yang sangat erat kaitannya dengan pencapaian tujuan pembangunan atau suatu kondisi yang diinginkan. Pembangunan menurut Todaro dalam Tjiptoherijanto (1993:182) adalah proses perubahan yang bersifat multidimensional dari struktur masyarakat, perilaku, kelembagaan, perkembangan ekonomi, pengurangan kepincangan dan penghapusan kemiskinan absolut dari suatu masyarakat. Hal itu berarti bahwa pembangunan merupakan serangkaian kegiatan yang terencana secara terus menerus sebagai upaya memperbaiki kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek, yang dilakukan dengan jalan memaksimalkan sumber daya yang ada. Implikasinya adalah bahwa pembangunan merupakan proses perubahan yang terkait dengan aktivitas rakyat yang terencana untuk mencapai tujuan bersama, terutama untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan bersama. Inti dari pembangunan nasional adalah upaya Bangsa Indonesia agar terhindar dari ancaman kemelaratan dan kemiskinan serta menumbuhkembangkannya dengan meningkatkan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia sebagai bagian dari sumber daya pembangunan, agar dapat mengangkat harkat serta martabat bangsa, sehingga sejajar dengan bangsa-bangsa lain yang hidup lebih makmur, sentosa dan jauh dari kemiskinan.

Kemiskinan, hingga saat ini masih menjadi *issu* global. Artinya, kemiskinan tidak hanya menjadi masalah pokok di Negara Dunia Ketiga, tetapi juga menjadi persoalan di Negara Industri Maju (NIM). Hal ini dapat dilihat pada data yang

menunjukkan bahwa di Amerika Serikat pada tahun 1980 sebanyak 2,8 juta rumah tangga hidup dalam rumah umum atau rumah sewa dengan subsidi. Lebih dari setengah kelompok itu tergolong miskin (Sulaiman, 1996:103). Hampir di semua negara berkembang hanya 10% sampai 30% penduduk yang dapat menikmati hasil pembangunan, namun mayoritas penduduk hidup dengan kemiskinan. Strategi pembangunan yang diterapkan tidak menyumbang apapun bagi kesejahteraan rakyat miskin, malah membuat mereka semakin sengsara (Strahm, 1999:xi-xii). Sejalan dengan pemikiran itu, Korten (2001:19-21) mengemukakan, selama tahun 1980-an terdapat tiga krisis global yang terpatri dalam kesadaran umat manusia. Salah satunya adalah kemiskinan. Meskipun telah banyak upaya penanganan kemiskinan dilakukan khususnya di Negara Dunia Ketiga, namun kemiskinan tetap saja merupakan masalah utama di Negara Dunia Ketiga hingga saat ini.

Di Indonesia penanganan kemiskinan telah sejak lama diupayakan, yaitu sejak PELITA I era pemerintahan Orde Baru. Upaya penanganan kemiskinan yang dilakukan pemerintah telah menjangkau berbagai pelosok tanah air. Outputnya, secara kuantitatif menunjukkan hasil yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dari data statistik yang menunjukkan pada awal pembangunan lima tahunan (PELITA) pada akhir 1960-an, kurang lebih 60% penduduk Indonesia berada dibawah garis kemiskinan, dan kemudian pada 1996-an menjadi sekitar 12% dari total penduduk Indonesia (BPS, 1997). Tetapi ketika badai krisis ekonomi pada tahun 1997-an telah mengecilkan pencapaian prestasi pembangunan nasional pada umumnya dan penurunan angka kemiskinan pada khususnya. Krisis tersebut menyebabkan melonjaknya angka kemiskinan mencapai 40% dari total penduduk Indonesia.

Jumlah penduduk miskin Indonesia hingga Maret 2007 mencapai 37,17 juta orang, atau sekitar 16,58 persen dari total penduduk Indonesia. Jika dibandingkan dengan penduduk miskin pada tahun sebelumnya sebesar 39,30 juta (17,75 persen) dalam setahun ini jumlah tersebut turun 2,13 juta jiwa. Dari penurunan tersebut, penduduk miskin di desa berkurang 1,20 juta, sedangkan di kota berkurang 930.000 orang (BPS, 2007). Persentase penduduk miskin antara daerah perkotaan dan pedesaan tak banyak berubah. Sebagian besar atau 63,52 persen berada di

pedesaan. Sedangkan catatan Bank Dunia menyebutkan bahwa 60 % penduduk Indonesia rawan kemiskinan. Sementara 10 hingga 20 % diantaranya masuk dalam kategori kemiskinan mutlak, yaitu seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan minimumnya, yakni mereka yang berpenghasilan kurang dari 1 US \$ atau sekitar Rp 10.000 per hari. Sedangkan menurut Bank Dunia menyebutkan seseorang miskin jika berpendapatan 2 US \$ atau Rp 20.000 per hari.

Target penurunan jumlah penduduk miskin seperti tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2005-2009 pada akhir tahun 2009 adalah 8,2 persen. Upaya tersebut dapat ditempuh melalui *triple track strategy* pemerintah, yaitu penanggulangan kemiskinan (*pro-poor*), perluasan kesempatan kerja (*pro-job*) dan peningkatan pertumbuhan (*pro-growth*). Upaya untuk menanggulangi kemiskinan telah dilakukan sejak lama dengan berbagai program penanggulangan kemiskinan misalnya Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program Pemberdayaan Daerah Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDM-DKE), Program Kompensasi Pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM), dan lain sebagainya. Selain itu, terdapat banyak program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan oleh berbagai kementerian dan lembaga misalnya PPK (Program Pengembangan Kecamatan), P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan), P4K (Proyek Peningkatan Masyarakat Pesisir), KUBE (Kelompok Usaha Bersama), dan lain-lain. Paling tidak ada sekitar 55 program atau proyek yang dilaksanakan oleh sekitar 19 departemen/lembaga pemerintah non-departemen (LPND) sejak 2004 (Syohkhiyan: 2007).

Pada tahun 2006, jumlah penduduk miskin meningkat yang diakibatkan oleh banyaknya bencana, kenaikan BBM sebesar 114% dan kenaikan harga beras sekitar 33% pada tahun 2005. Dikaitkan dengan sasaran rencana pembangunan jangka menengah nasional 2005-2009 sebagaimana Peraturan Presiden no.7 tahun 2005. Perpres ini menetapkan sasaran penanggulangan kemiskinan pada 2009 sekitar 8,2% dari jumlah total penduduk dan sasaran pengurangan angka pengangguran terbuka menjadi 5,1% dari total angkatan kerja pada 2009 (Syohkhiyan: 2007). Dalam konteks kemiskinan di Jawa Timur, persoalan ini telah menjadi sesuatu yang mendesak dan perlu dicarikan jalan keluarnya. Jawa Timur merupakan propinsi terparah di Pulau Jawa dengan total penduduk miskin di Jawa

Timur 23 % dari total penduduk keseluruhan penduduk Indonesia yaitu 7,3 % juta jiwa setelah Jawa Tengah 18,9% dan Jawa Barat 12,9% (Menkokesra Abu Rizal Bakrie, 2008).

Kota Malang sebagai salah satu kota di Jawa Timur juga memperoleh dampak yang signifikan dengan adanya krisis ekonomi tahun 1997. Berdasarkan data yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Kota Malang menunjukkan bahwa data tahun 2000-2001 jumlah keluarga miskin di Kota Malang adalah 34.208 jiwa, sementara pada tahun 2002 jumlah keluarga miskin mengalami penurunan yaitu 14.663 jiwa namun jumlah penduduk miskin di Kota Malang secara keseluruhan pada Desember 2006 yang tersebar di lima kecamatan adalah 24.272 jiwa dengan presentase 13,65%. Hal ini memperlihatkan bahwa dalam kurun waktu empat tahun, penduduk miskin Kota Malang semakin meningkat. Untuk itu, maka diperlukan terobosan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran.

Pada tanggal 7 September 2006 Presiden SBY dalam sidang kabinet tentang penanggulangan kemiskinan menetapkan kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja melalui konsolidasi program-program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Kebijakan tersebut ditindak lanjuti oleh Menkokesra bersama dengan Menko Perekonomian serta menteri-menteri lainnya dengan mengumumkan bahwa pemerintah akan melaksanakan “Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat” atau PNPM mulai tahun 2007.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) merupakan salah satu langkah yang paling tepat dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Dengan memberdayakan segala kemampuan dan bakat yang ada pada masing-masing individu masyarakat diharapkan dapat mengembangkan potensi yang ada pada masyarakat sehingga masyarakat dapat hidup layak dan tidak berada pada kategori masyarakat miskin. Melalui PNPM dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan pelaksanaan, pemantauan hingga evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat ditumbuhkembangkan sehingga mereka bukan sebagai

objek melainkan sebagai subjek upaya penanggulangan kemiskinan. PNPM diperluas dengan melibatkan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) untuk mengintegrasikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan daerah sekitarnya. PNPM juga diperkuat dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh berbagai departemen/sektor dan pemerintah daerah.

Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) merupakan kelembagaan lokal yang mengurus masalah PNPM. BKM berperan sebagai wadah masyarakat untuk bersinergi dan menjadi lembaga kepercayaan milik masyarakat dalam upaya membangun kemandirian menuju tatanan masyarakat madani. Dalam memberdayakan masyarakat diperlukan adanya campur tangan dari para penggerak pembangunan. Para penggerak pembangunan ini harus benar-benar memahami dengan baik penyebab ketidakberdayaan masyarakat oleh karena itu para penggerak pembangunan perlu memahami dengan baik karakteristik dan potensi masyarakat yang akan diberdayakan. BKM dibentuk guna memberdayakan masyarakat agar dapat mandiri di dalam mengelola perekonomian mereka sendiri sehingga mereka dapat memperbaiki keadaan perekonomian keluarga mereka. Dengan adanya penguatan perekonomian masyarakat maka keadaan perekonomian lokal pun akan meningkat sehingga pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh BKM diharapkan dapat mengurangi jumlah masyarakat miskin yang ada di dalam masyarakat setempat pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.

Pelaksanaan PNPM di tiap daerah hasil yang dicapai tidak selalu sama dan efektivitas dari PNPM tersebut juga belum dapat diketahui dengan pasti apakah PNPM tersebut telah efektif dalam mengurangi jumlah kemiskinan. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian pada BKM selaku wadah yang mengurus masalah PNPM. Peneliti berkeinginan untuk membahas masalah yang berkaitan dengan judul “Pengentasan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Masyarakat (Studi tentang Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Polowijen)” peneliti juga tertarik untuk melakukan penelitian di daerah Polowijen karena BKM di daerah Polowijen termasuk menjadi salah satu BKM yang berjalan cukup baik

dalam menjalankan PNPM serta lokasi dari Kelurahan Polowijen merupakan lokasi strategis dan tingkat pertumbuhannya bisa dibilang cukup tinggi..

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat dirumuskan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Polowijen Kecamatan Belimbing Kota Malang dalam rangka mengentaskan kemiskinan?
2. Bagaimanakah tingkat efektivitas pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Polowijen Kecamatan Belimbing Kota Malang dalam rangka mengentaskan kemiskinan?
3. Faktor-faktor apakah yang mendukung dan menghambat pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Polowijen Kecamatan Belimbing Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

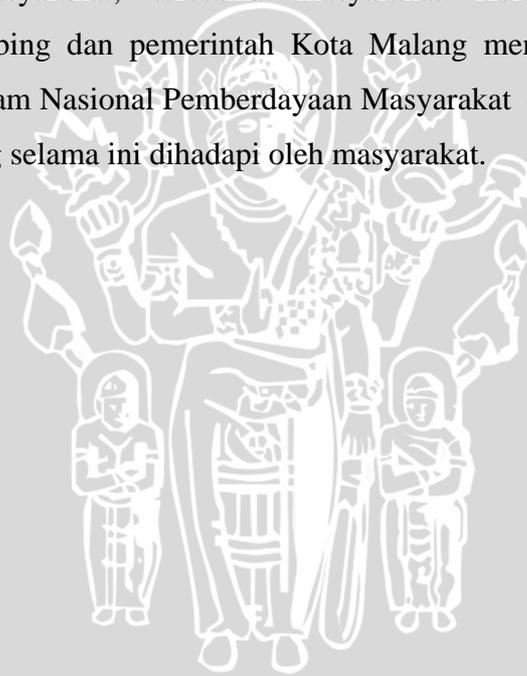
Ada beberapa tujuan yang diinginkan dalam pelaksanaan penelitian ini, diantaranya adalah untuk mengetahui dan menggambarkan:

1. Proses pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Polowijen Kecamatan Belimbing Kota Malang dalam rangka mengentaskan kemiskinan.
2. Tingkat efektifitas dari program nasional pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Polowijen Kecamatan Belimbing Kota Malang dalam rangka mengentaskan kemiskinan.
3. Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat.

D. Kontribusi Penelitian

Kontribusi penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, baik teoritis maupun praktis terhadap permasalahan penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat. Adapun kontribusi yang ingin dicapai antara lain:

1. Secara teoritis, untuk memberikan kontribusi mengenai konsep pembangunan yang berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat serta dapat memperkaya kepustakaan dalam topik pengentasan kemiskinan dan sebagai referensi atau sebagai bahan perbandingan untuk penyempurnaan metode analisis kegiatan PNPM bagi para peneliti selanjutnya.
2. Secara praktis, sebagai sarana menumbuhkembangkan kepekaan terhadap fenomena sosial, sebagai masukan dan pertimbangan bagi pelaku pembangunan masyarakat, terutama masyarakat Kelurahan Polowijen Kecamatan Belimbing dan pemerintah Kota Malang mengenai mekanisme pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dan permasalahan-permasalahan yang selama ini dihadapi oleh masyarakat.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Pemberdayaan (*Empowerment*).

1. Definisi Pemberdayaan

Pemberdayaan (*Empowerment*) merupakan konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan Barat, utamanya Eropa. Konsep pemberdayaan mulai tampak kepermukaan sekitar dekade 1970-an, dan terus berkembang sepanjang dekade 1980-an hingga 1990-an (Pranarka & Moeljarto, 1996:44). Pemberdayaan masyarakat sebagai strategi pembangunan digunakan dalam paradigma pembangunan yang berpusat pada manusia. Perspektif pembangunan ini menyadari betapa pentingnya kapasitas manusia dalam rangka meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal atas sumber daya materi dan nonmaterial melalui redistribusi modal atau kepemilikan.

Beberapa ahli yang mengemukakan definisi pemberdayaan jika dilihat dari tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan (Suharto, 2006:58-59):

1. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung
2. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, atas dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya
3. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui pengubahan struktur sosial
4. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya.

Menurut Ife dalam Suharto (2006:59), pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan disini diartikan bukan hanya menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan kekuasaan atau penguasaan klien atas:

- 1) Pilihan-pilihan personal dan kesempatan-kesempatan hidup: kemampuan dalam membuat keputusan-keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal, pekerjaan.

- 2) Pendefinisian kebutuhan: kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya.
- 3) Ide atau gagasan: kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.
- 4) Lembaga-lembaga: kemampuan menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi pranata-pranata masyarakat, seperti lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan.
- 5) Sumber-sumber: kemampuan memobilisasi sumber-sumber formal, informal dan kemasyarakatan.
- 6) Aktivitas ekonomi: kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi, dan pertukaran barang serta jasa.
- 7) Reproduksi: kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi.

Sebagai suatu strategi pembangunan, pemberdayaan menurut Payne didefinisikan sebagai kegiatan membantu *klien* untuk memperoleh daya guna mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan, terkait dengan diri mereka termasuk mengurangi hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimiliki dengan mentransfer daya dari lingkungannya (Payne,1997:266). Sementara itu Ife (1995:182) memberikan batasan pemberdayaan sebagai upaya penyediaan kepada orang-orang atas sumber, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan mereka menentukan masa depannya dan untuk berpartisipasi di dalam dan mempengaruhi kehidupan komunitas mereka. Terkait dengan itu, Sutrisno (2000:185) menjelaskan dalam perspektif pemberdayaan, masyarakat diberi wewenang untuk mengelola sendiri dana pembangunan baik yang berasal dari pemerintah maupun dari pihak lain, disamping mereka harus aktif berpartisipasi dalam proses pemilihan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan. Perbedaannya dengan pembangunan partisipatif adalah keterlibatan kelompok masyarakat sebatas pada pemilihan, perencanaan, dan pelaksanaan program, sedangkan dana tetap dikuasai oleh pemerintah.

Dari berbagai pengertian-pengertian pemberdayaan diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami kemiskinan. Pemberdayaan sebagai tujuan dimaksudkan

pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

2. Indikator Pemberdayaan

Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara operasional, maka perlu diketahui berbagai indikator pemberdayaan yang dapat menunjukkan seseorang itu berdaya atau tidak. Sehingga ketika sebuah program pemberdayaan sosial diberikan, segenap upaya dapat dikonsentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari sasaran perubahan (misalnya keluarga miskin) yang perlu dioptimalkan. Schuler, Hashemi dan Riley dalam Suharto (2004:63) mengembangkan delapan indikator pemberdayaan.

1. Kebebasan mobilitas: kemampuan individu untuk pergi ke luar rumah atau wilayah tempat tinggalnya, seperti ke pasar, fasilitas medis, bioskop, rumah ibadah, ke rumah tetangga. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendiri.
2. Kemampuan membeli komoditas kecil: kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari (beras, minyak tanah, minyak goreng, dan lain-lain). Individu dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika ia dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta izin pasangannya; terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.
3. Kemampuan membeli komoditas besar: kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier, seperti lemari pakaian, TV, radio, koran, pakaian keluarga. Seperti halnya indikator di atas, poin tinggi diberikan terhadap individu yang dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ixi pasangannya; terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan unagnya sendiri.
4. Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga: mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama suami/istri mengenai keputusan-keputusan keluarga, misalnya mengenai renovasi rumah, pembelian kambing untuk ditenak, memperoleh kredit usaha.
5. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga: responden ditanya mengenai apakah dalam satu tahun terakhir ada seseorang (suami, istri, anak-anak, mertua) yang mengambil uang, tanah, perhiasan dari dia tanpa izinnya; yang melarang mempunyai anak; atau melarang bekerja di luar rumah.
6. Kesadaran hukum dan politik: mengetahui nama salah seorang pegawai pemerintah desa/kelurahan; seorang anggota DPRD setempat; nama

presiden; mengetahui pentingnya memiliki surat nikah dan hukum-hukum waris.

7. Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes: seseorang dianggap “berdaya” jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan protes, misalnya, terhadap suami yang memukul istri; istri yang mangabaikan suami dan keluarganya; gaji yang tidak adil; penyalahgunaan bantuan social; atau penyalahgunaan kekuasaan polisi dan pegawai pemerintah.
8. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga: memiliki rumah, tanah, asset produktif, tabungan. Seseorang dianggap mamiliki poin tinggi jika ia memiliki aspek-aspek tersebut secara sendiri atau terpisah dari pasangannya.

Menurut Kieffer dalam Suharto (1997:215) pemberdayaan mencakup tiga dimensi yang meliputi kompetensi kerakyatan, kemampuan sosiopolitik, kompetensi partisipatif. Parson et.al. dalam Suharto (2006:63) juga mengajukan tiga dimensi pemberdayaan yang merujuk pada:

- a. Sebuah proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan individual yang kemudian berkembang menjadi sebuah perubahan sosial yang lebih besar.
- b. Sebuah keadaan psikologis yang ditandai oleh rasa percaya diri, berguna dan mampu mengendalikan diri dan orang lain.
- c. Pembebasan yang dihasilkan dari sebuah gerakan sosial, yang dimulai dari pendidikan dan politisasi orang-orang lemah kemudian melibatkan upaya-upaya kolektif dari orang-orang lemah tersebut memperoleh kekuasaan dan mengubah struktur-struktur yang masih menekan.

3. Strategi Pemberdayaan

Parsons et.al. dalam Suharto (2006:66) menyatakan bahwa proses pemberdayaan umumnya dilakukan secara kolektif. Walaupun dalam beberapa situasi, strategi pemberdayaan dapat saja dilakukan secara individual namun tetap saja pada gilirannya strategi ini akan berkaitan dengan kolektivitas. Pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras atau mantra pemberdayaan (*empowerment setting*) yaitu:

- 1) Aras mikro.

Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, stress management, crisis Intervention. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya.

Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (*Task Centered Approach*).

2) Aras Mezzo

Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.

3) Aras Makro

Pendekatan ini disebut juga sebagai strategi sistem besar (*Large-system strategy*), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, lobbying, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi sistem besar memandang masyarakat sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.

4. Pendekatan Pemberdayaan

Pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan dapat dicapai melalui pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5P, yaitu (Suharto, 2006:66)

1. Pemungkinan: Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.
2. Penguatan: Memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
3. Perlindungan: Melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
4. Penyokongan: Memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya.

Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh kedalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.

5. Pemeliharaan: Memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

5. Cara Memberdayakan Masyarakat

Dubois dan Miley dalam Suharto (2006:68) memberi beberapa cara atau teknik yang lebih spesifik yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat:

- 1) Membangun relasi pertolongan yang: merefleksikan respon empati, menghargai pilihan dan hak klien menentukan nasibnya sendiri (*self-determination*), menghargai perbedaan dan keunikan individu, menekankan kerjasama klien (*Client Partnerships*).
- 2) Membangun komunikasi yang: menghormati martabat dan harga diri klien, mempertimbangkan keragaman individu, berfokus pada klien, menjaga rahasia klien.
- 3) Terlibat dalam pemecahan masalah yang: memperkuat partisipasi klien dalam semua aspek proses pemecahan masalah, menghargai hak-hak klien, merangkai tantangan-tantangan sebagai kesempatan belajar, melibatkan klien dalam pembuatan keputusan dan evaluasi.
- 4) Merefleksikan sikap dan nilai profesi pekerjaan sosial melalui: ketaatan terhadap kode etik profesi, keterlibatan dalam pengembangan profesional, penerjemahan kesulitan-kesulitan pribadi ke dalam isu-isu publik, penghapusan segala bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan kesempatan.

B. Kemiskinan

1. Definisi kemiskinan

- 1) Kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan, yang disebut garis kemiskinan (*poverty line*) atau batas kemiskinan (*poverty threshold*). Garis kemiskinan adalah sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara 2100 kilo kalori per orang per hari dan kebutuhan non-makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya (BPS dan Depsos, 2002: 4).
- 2) Kemiskinan pada umumnya didefinisikan dari segi pendapatan dalam bentuk uang ditambah dengan keuntungan-keuntungan non-material yang diterima oleh seseorang. Secara luas kemiskinan meliputi kekurangan atau tidak memiliki pendidikan, keadaan kesehatan yang buruk, kekurangan transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. SMERU dalam Suharto dkk (2004: 6).

- 3) Kemiskinan adalah ketidaksetaraan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial. Basis kekuasaan sosial meliputi: (a) modal produktif atau aset (tanah, perumahan, alat produksi, kesehatan), (b) sumber keuangan (pekerjaan, kredit), (c) organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama (koperasi, partai politik, organisasi sosial), (d) jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang, dan jasa, (e) pengetahuan dan keterampilan, dan (f) informasi yang berguna untuk kemajuan hidup. Friedman dalam Suharto, dkk. (2004: 6).

Batasan yang dikemukakan UNDP (1997) dalam Cox (2004:9), seseorang dikatakan miskin jika tingkat pendapatannya berada dibawah garis kemiskinan. Oleh karena itu, upaya penanganan kemiskinan yang dilakukan pada negara dunia ketiga baik oleh pemerintah maupun organisasi non-pemerintah, kebanyakan hanya bertumpu pada upaya peningkatan pendapatan. Itu sebabnya, berbagai upaya penanganan kemiskinan itu tidak menyelesaikan masalah dan cenderung gagal.

Kemiskinan menurut Todaro (2000:58) tinggi rendahnya tingkat kemiskinan di satu negara tergantung pada dua faktor utama yaitu:

- a. Tingkat pendapatan nasional rata-rata.
- b. Lebar sempitnya kesenjangan dalam distribusi pendapatan.

Jelas bahwa setinggi apapun tingkat pendapatan nasional per kapita yang dicapai satu negara, selama distribusi pendapatan yang tidak merata maka tingkat kemiskinan di negara tersebut pasti akan parah. Demikian pula sebaliknya, semerata apapun distribusi pendapatan di satu negara, jika tingkat pendapatan nasional rata-ratanya tidak mengalami perbaikan, maka kemelaratan juga akan semakin meluas.

Berdasarkan konsep ini garis kemiskinan akan mengalami perubahan bila tingkat hidup masyarakat berubah, hal ini jelas merupakan perbaikan dari konsep kemiskinan absolut. Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang ditandai oleh pengangguran dan keterbelakangan, yang kemudian meningkat menjadi ketimpangan.

2. Ciri-Ciri Keluarga Miskin

Kemiskinan lazimnya dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok. Mereka dikatakan berada di bawah garis

kemiskinan apabila pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling pokok seperti pangan, pakaian, tempat berteduh dan lain-lain.

Persepsi manusia terhadap kebutuhan pokok yang diperlukan sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, adat-istiadat dan sistem nilai yang dimilikinya. Dalam memenuhi kebutuhan pokok ini maka pengaruh ruang lingkup perlu diperhitungkan. Oleh karena itu, keluarga miskin adalah mereka yang hidup dibawah garis kemiskinan dengan memiliki ciri sebagai berikut :

- 1) Tidak memiliki faktor produksi sendiri, seperti tanah yang cukup, modal atau ketrampilan.
- 2) Tidak memiliki kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri.
- 3) Rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki.
- 4) Kebanyakan tinggal dipedesaan.
- 5) Banyak diantara mereka yang hidup di kota masih berusia muda dan tidak mempunyai keterampilan.

Menurut Suharto et.al (2004:7-8) kemiskinan mempunyai beberapa ciri, yaitu:

- 1) Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang, dan papan)
- 2) Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih, dan transportasi)
- 3) Ketiadaan jaminan masa depan (kerena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga)
- 4) Kerentanan terhadap guncangan yang bersifat individual maupun massal.
- 5) Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan sumber daya alam.
- 6) Keterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat.
- 7) Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan.
- 8) Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.
- 9) Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak terlantar, wanita korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marginal dan terpencil).

3. Macam-Macam Kemiskinan

Menurut Neef dalam Zikrullah (2000:11), sekurang-kurangnya ada enam macam kemiskinan yang perlu di pahami oleh pihak-pihak yang menaruh perhatian terhadap penanganan kemiskinan, yaitu:

- 1) Kemiskinan subsistensi, penghasilan rendah, jam kerja panjang, perumahan buruk, fasilitas air bersih mahal;
- 2) Kemiskinan perlindungan, lingkungan buruk, (sanitasi, sarana pembuangan sampah, polusi), kondisi kerja buruk, tidak ada jaminan atas hak pemilikan tanah;
- 3) Kemiskinan pemahaman, kualitas pendidikan formal buruk, terbatasnya akses atas informasi yang menyebabkan terbatasnya kesadaran akan hak, kemampuan dan potensi untuk mengupayakan perubahan;
- 4) Kemiskinan partisipasi, tidak ada akses dan kontrol atas proses pengambilan keputusan yang menyangkut nasib diri dan komunitas;
- 5) Kemiskinan identitas, terbatasnya perbauran antara kelompok sosial, terfragmentasi; dan
- 6) Kemiskinan kebebasan, stress, rasa tidak berdaya, tidak aman baik ditingkat pribadi maupun komunitas.

Narhetali mengutip hasil penelitian tentang kemiskinan yang dilakukan Yeates & Laughlin dari Bank Dunia (2000) yang menyatakan, bahwa orang miskin mempunyai penekanan yang berbeda dari pembuat kebijakan tentang hal-hal yang dipersepsi sebagai dimensi kemiskinan. Selain tingkat pendapatan, konsumsi, pendidikan, dan kesehatan, kaum miskin juga menekankan faktor psikologis seperti kepercayaan diri, ketidakberdayaan (*powerlessness*) serta pengucilan fisik dan sosial sebagai sumber kemiskinan. Dengan demikian secara jelas terlihat bahwa bagi orang, kelompok, komunitas, masyarakat miskin, ternyata peningkatan pendapatan bukanlah satu-satunya hal yang amat penting. Tetapi, perlakuan humanis penuh harga diri, *self-respect* juga merupakan sesuatu yang amat bernilai.

Meskipun banyak terminologi mengenai kemiskinan, tetapi secara umum dapat dinyatakan, bahwa istilah kemiskinan selalu menunjuk pada sebuah kondisi yang serba kekurangan. Kondisi serba kekurangan tersebut bisa diukur secara obyektif, dirasakan secara subyektif, atau secara relatif didasarkan pada perbandingan dengan orang lain, sehingga melahirkan pandangan obyektif, subyektif, dan relatif tentang kemiskinan.

Dengan menggunakan persepektif yang lebih luas lagi, Cox (2004:1-6) membagi kemiskinan ke dalam beberapa dimensi:

- 1) Kemiskinan yang diakibatkan oleh globalisasi. Globalisasi menghasilkan pemenang dan yang kalah. Pemenang umumnya adalah negara-negara yang maju. Sedangkan negara-negara yang berkembang seringkali semakin terpinggirkan oleh persaingan dan pasar bebas yang merupakan prasyarat globalisasi.

- 2) Kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan. Kemiskinan subsistem (kemiskinan akibat rendahnya pembangunan), kemiskinan pedesaan (kemiskinan akibat peminggiran pedesaan dalam proses pembangunan), kemiskinan perkotaan (kemiskinan yang disebabkan oleh hakekat dan kecepatan pertumbuhan perkotaan).
- 3) Kemiskinan sosial. Kemiskinan yang dialami oleh perempuan, anak-anak, dan kelompok minoritas.
- 4) Kemiskinan konsekuensial. Kemiskinan yang terjadi akibat kejadian-kejadian lain atau faktor-faktor eksternal di luar si miskin, seperti konflik, bencana alam, kerusakan lingkungan, dan tingginya jumlah penduduk.

4. Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan

Dalam suatu proses pembangunan terdapat hambatan-hambatan diberbagai bidang terutama di bidang sosial, ekonomi dan politik yang tentunya akan memperlambat pembaharuan kondisi masyarakat ke arah yang lebih baik secara lebih merata. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat kemiskinan dalam masyarakat yang cukup tinggi. Orientasi berbagai program penanggulangan kemiskinan yang hanya menitikberatkan pada salah satu dimensi dari gejala-gejala kemiskinan ini, pada dasarnya mencerminkan pendekatan program yang bersifat parsial, sektoral, *charity* dan tidak menyentuh akar penyebab kemiskinan itu sendiri. Akibatnya program-program dimaksud tidak mampu menumbuhkan kemandirian masyarakat yang pada akhirnya tidak akan mampu mewujudkan aspek keberlanjutan (*sustainability*) dari program-program penanggulangan kemiskinan tersebut.

Tjokrominoto dkk (1982:7-8) menyebutkan penyebab utama semakin terperosoknya seseorang atau sekelompok masyarakat dalam kemiskinan:

- 1) Adanya kekurangan serta keterbatasan pendapatan, modal, dan keterampilan;
- 2) Struktur pasar masih pincang dan kurangnya prasarana sosial dan ekonomi;
- 3) Perluasan lapangan kerja, yang karena kurangnya investasi, menjadi terbatas;
- 4) Masalah kependudukan, yaitu laju pertumbuhan penduduk yang pesat;
- 5) Penyebaran penduduk yang tidak merata;
- 6) Tingkat urbanisasi yang tinggi;
- 7) *Burden of dependency* (beban tanggungan) yang besar;
- 8) Tingginya laju pertumbuhan dari golongan penduduk usia kerja;
- 9) Masalah pengangguran dan pengangguran terselubung yang tinggi;
- 10) Dunia usaha yang lemah karena kurangnya kewirausahaan.

Sebab-sebab kemiskinan dalam Soerjani dkk (1987:141) sebagai berikut:

- 1) Mentalitas si miskin sendiri,
- 2) Minimnya keterampilan yang dimilikinya,
- 3) Ketidakmampuan untuk memanfaatkan kesempatan yang disediakan,
- 4) Peningkatan jumlah penduduk yang relatif berlebihan.

Penyebab kemiskinan menurut Bawsir (2003:18-15), antara lain:

- 1) Kemiskinan natural, yaitu keadaan miskin karena keterbatasan alamiah, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya;
- 2) Kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan karena faktor-faktor kebudayaan yang semakin melestarikan kemiskinan di wilayah tersebut;
- 3) Kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan karena faktor-faktor buatan manusia, misalnya kebijakan perekonomian yang tidak adil, penguasaan faktor-faktor produksi yang tidak merata, KKN, serta tatanan perekonomian internasional yang lebih menguntungkan kelompok negara tertentu.

Banyak hal yang dapat mempengaruhi berlangsungnya kemiskinan, baik dari luar maupun dari dalam diri masyarakat. Mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan, Tambunan (1999:127) menyatakan:

“Selain tingkat pendidikan dan tingkat upah/gaji yang rendah, yang akhirnya menyebabkan kinerja yang buruk dan penghargaan yang kurang baik, kemiskinan dipengaruhi oleh sejumlah faktor lain baik secara langsung maupun tidak langsung. Faktor-faktor ini mulai dari tingkat dan laju pertumbuhan pertumbuhan output (atau produktifitas tenaga kerja), tingkat upah netto, distribusi pendapatan, kesempatan kerja, termasuk jenis pekerjaan yang tersedia, tingkat inflasi, pajak dan subsidi, investasi, alokasi serta kualitas sumber daya alam, penggunaan teknologi, tingkat dan jenis pendidikan, kondisi fisik dan alam di suatu wilayah, etos kerja dan motivasi pekerja, kultur/budaya atau tradisi, hingga politik, bencana alam dan peperangan.”

Kemiskinan cenderung tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat yang menurut Oscar Lewis dalam Suparlan (1984:31) memiliki kondisi-kondisi:

- 1) Sistem ekonomi uang, buruh upahan dan sistem produksi untuk keuntungan.
- 2) Tetap tingginya tingkat pengangguran dan setengah pengangguran bagi tenaga tak terampil,
- 3) Rendahnya upah buruh,
- 4) Tak berhasilnya golongan berpenghasilan rendah meningkatkan organisasi sosial, ekonomi dan sosial secara sukarela maupun atas prakarsa pemerintah,
- 5) Sistem keluarga bilateral yang menonjol daripada sistem unilateral, dan
- 6) Kuatnya nilai-nilai pada kelas yang berkuasa yang menekankan penumpukan harta kekayaan dan adanya kemungkinan mobilitas vertikal, dan sikap hemat, serta adanya tanggapan bahwa rendahnya status ekonomi

adalah hasil dari ketidaksanggupan pribadi atau memang pada dasarnya sudah rendah kedudukannya.

Penduduk miskin (Alfian, 1980:35) adalah mereka yang tidak memiliki:

- 1) Mutu kerja yang tinggi,
- 2) Jumlah modal yang memadai,
- 3) Luas tanah dan Sumber alam yang cukup,
- 4) Keterampilan dan keahlian yang cukup tinggi, dan
- 5) Rangkuman hidup yang memungkinkan perubahan dan kemajuan.

Faktor penyebab kemiskinan secara umum menurut Zadjuli dalam Suyanto (1985:23) antar lain:

- 1) Kemiskinan karena faktor alamiah, yaitu minimnya potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu masyarakat, sehingga kemampuan mereka untuk mengelola sumber daya itu menjadi terbatas,
- 2) Kemiskinan karena kolonialisme, yaitu kemiskinan karena penjajahan yang memeras suatu bangsa dalam waktu yang cukup lama,
- 3) Kemiskinan karena tradisi sosiokultural, yaitu adanya budaya setempat yang menentang masuknya modernisasi, sehingga wilayah tersebut menjadi terbelakang dalam hal teknologi yang sebenarnya dapat digunakan demi peningkatan kesejahteraan anggota masyarakatnya,
- 4) Kemiskinan karena terisolasi, yaitu kemiskinan yang terjadi karena lokasi suatu masyarakat terpencil dan sulit dijangkau, sehingga perkembangannya relatif lambat.

C. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) pada hakekatnya adalah gerakan nasional dalam wujud pembangunan berbasis masyarakat yang menjadi kerangka kebijakan serta acuan dan pedoman bagi pelaksanaan berbagai program pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai strategi untuk mencapai tujuan meningkatnya kesejahteraan masyarakat terutama keluarga miskin.

PNPM adalah program nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Pengertian yang terkandung mengenai PNPM adalah:

- 1) PNPM adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM dilaksanakan

melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

- 2) Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai (Sujana, 2007).

2. Tujuan PNPM

Tujuan umum dari PNPM ini adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. Sedangkan tujuan khususnya adalah:

- a. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil, dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.
- b. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif, dan akuntabel.
- c. Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (*pro-poor*).
- d. Meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, dan kelompok peduli lainnya, untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.
- e. Meningkatnya keberdayaan dan kemandirian masyarakat, serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya.
- f. Meningkatnya modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal.

- g. Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat (Sujana, 2007).

3. Strategi PNPM

Strategi PNPM Mandiri terdiri atas:

1. Strategi Dasar

- a. Mengintensifkan upaya-upaya pemberdayaan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat.
- b. Menjalin kemitraan yang seluas-luasnya dengan berbagai pihak untuk bersama-sama mewujudkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat.
- c. Menerapkan keterpaduan dan sinergi pendekatan pembangunan sektoral, pembangunan kewilayahan, dan pembangunan partisipatif.

2. Strategi Operasional

- a. Mengoptimalkan seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, dan kelompok peduli lainnya secara sinergis.
- b. Menguatkan peran pemerintah kota/kabupaten sebagai pengelola program-program penanggulangan kemiskinan di wilayahnya.
- c. Mengembangkan kelembagaan masyarakat yang dipercaya, mangakar, dan akuntabel.
- d. Mengoptimalkan peran sektor dalam pelayanan dan kegiatan pembangunan secara terpadu di tingkat komunitas.
- e. Meningkatkan kemampuan pembelajaran di masyarakat dalam memahami kebutuhan dan potensinya serta memecahkan berbagai masalah yang dihadapinya.
- f. Menerapkan konsep pembangunan partisipatif secara konsisten dan dinamis serta berkelanjutan (Sujana, 2007).

4. Prinsip Dasar PNPM

Program nasional pemberdayaan masyarakat menekankan prinsip-prinsip dasar berikut ini:

- a. Bertumpu pada pembangunan manusia. Pelaksanaan PNPM mandiri senantiasa bertumpu pada peningkatan harkat dan martabat manusia seutuhnya.
- b. Otonomi. Dalam pelaksanaan PNPM mandiri, masyarakat memiliki kewenangan secara mandiri untuk berpartisipasi dalam menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secara swaloka.
- c. Desentralisasi. Kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan dilimpahkan kepada pemerintah daerah atau masyarakat sesuai dengan kapasitasnya.
- d. Berorientasi pada masyarakat miskin. Semua kegiatan yang dilaksanakan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung.
- e. Partisipasi. Masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong royong menjalankan pembangunan.
- f. Kesetaraan dan keadilan gender. Laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap pembangunan dan dalam menikmati secara adil manfaat kegiatan pembangunan.
- g. Demokratis. Setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin.
- h. Transparansi dan akuntabel. Masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administratif.
- i. Prioritas. Pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan dengan mendayagunakan secara optimal berbagai sumber daya yang terbatas.
- j. Kolaborasi. Semua pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan kemiskinan didorong untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan.

- k. Keberlanjutan. Setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak hanya saat ini tapi juga di masa depan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
- l. Sederhana. Semua aturan, mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan PNPM mandiri harus sederhana, fleksibel, mudah dipahami, dan mudah dikelola, serta dapat dipertanggungjawabkan oleh masyarakat (Sujana, 2007).

5. Pendekatan PNPM

Pendekatan atau upaya-upaya rasional dalam mencapai tujuan program dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan program adalah pembangunan yang berbasis masyarakat dengan:

- a. Menggunakan kecamatan sebagai lokus program untuk mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program.
- b. Memposisikan masyarakat sebagai penentu/pengambil kebijakan dan pelaku utama pembangunan pada tingkat lokal.
- c. Mengutamakan nilai-nilai universal dan budaya lokal dalam proses pembangunan partisipatif.
- d. Menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik sosial, budaya dan geografis.
- e. Melalui proses pemberdayaan yang terdiri atas pembelajaran, kemandirian, dan keberlanjutan (Sujana, 2007).

6. Kategori Program

Program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. PNPM-Inti: terdiri dari program/kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan, yang mencakup PPK, P2KP, PISEW, dan P2DTK.
- b. PNPM-Penguatan: terdiri dari program-program pemberdayaan masyarakat berbasis sektoral, kewilayahan, serta khusus untuk mendukung penanggulangan kemiskinan yang pelaksanaannya terkait pencapaian

target tertentu. Pelaksanaan program-program ini di tingkat komunitas mengacu pada kerangka kebijakan PNPM Mandiri (Sekretariat Tim Pengendali PNPM Mandiri, 2007).

7. Komponen Program

Rangkaian proses pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui komponen program sebagai berikut:

1) Pengembangan Masyarakat

Komponen pengembangan masyarakat mencakup serangkaian kegiatan untuk membangun kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat yang terdiri dari pemetaan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat, perencanaan partisipatif, pengorganisasian, pemanfaatan sumberdaya, pemantauan, dan pemeliharaan hasil-hasil yang telah dicapai. Untuk mendukung rangkaian kegiatan tersebut, disediakan dana pendukung kegiatan pembelajaran masyarakat, pengembangan relawan, dan operasional pendampingan masyarakat; dan fasilitator, pengembangan kapasitas, mediasi dan advokasi. Peran fasilitator terutama pada saat awal pemberdayaan, sedangkan relawan masyarakat adalah yang utama sebagai motor penggerak masyarakat di wilayahnya.

2) Bantuan Langsung Masyarakat

Komponen Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah dana stimulan keswadayaan yang diberikan kepada kelompok masyarakat untuk membiayai sebagian kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, terutama masyarakat miskin.

3) Peningkatan Kapasitas Pemerintahan dan Pelaku Lokal

Komponen peningkatan kapasitas pemerintahan dan pelaku lokal adalah serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan pelaku lokal/kelompok peduli lainnya agar mampu menciptakan kondisi yang kondusif dan sinergi yang positif bagi masyarakat terutama kelompok miskin dalam menyelenggarakan hidupnya secara layak. Kegiatan terkait dalam komponen ini antara lain seminar, pelatihan, lokakarya, kunjungan lapangan yang dilakukan secara selektif, dan sebagainya.

4) Bantuan Pengelolaan dan Pengembangan Program

Komponen bantuan pengelolaan dan pengembangan program meliputi kegiatan-kegiatan untuk mendukung pemerintah dan berbagai kelompok peduli lainnya dalam pengelolaan kegiatan seperti penyediaan konsultan manajemen, pengendalian mutu, evaluasi, dan pengembangan program (Sekretariat Tim Pengendali PNPM Mandiri, 2007).

8. Struktur Kelembagaan PNPM

Kelembagaan PNPM pada hakekatnya bertujuan untuk penguatan terhadap hak kepemilikan dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua individu untuk mengerjakan aktivitas, khususnya dalam meningkatkan kapasitas dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif. Struktur kelembagaan PNPM mencakup seluruh pihak yang bertanggungjawab dan terkait dalam pelaksanaan serta upaya pencapaian tujuan PNPM yang meliputi unsur pemerintah, fasilitator dan konsultan pendamping, serta masyarakat baik di pusat maupun di daerah. Secara umum, struktur organisasi PNPM dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Tingkat Pusat.

Dalam rangka pengendalian dan koordinasi pelaksanaan PNPM, dibentuk Tim Pengendali PNPM. Tim pengendali berikut keanggotaannya ditetapkan oleh dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Masyarakat selaku Ketua Tim koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK). Tim Pengendali PNPM terdiri atas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Tim Pengarah

Tim pengarah terdiri atas Menteri-Menteri dan Kepala lembaga terkait pelaksanaan PNPM. Tugas dan tanggung jawab Tim Pengarah adalah memberikan pengarahan kepada Tim Pelaksana baik materi yang bersifat substansial maupun teknis guna keberhasilan pengendalian PNPM.

b. Tim Pelaksana

Tim Pelaksana terdiri atas pejabat eselon I ke bawah dari berbagai kementerian/lembaga terkait pelaksanaan PNPM. Tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana meliputi:

1. Merumuskan konsep kebijakan operasional, koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian PNPM.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PNPM.
3. Menilai hasil, manfaat, dan dampak dari pelaksanaan PNPM terhadap pengurangan kemiskinan dan penciptaan kesempatan kerja bagi masyarakat miskin.
4. Mengusulkan pilihan-pilihan peningkatan efektivitas pelaksanaan PNPM kepada Tim Pengarah.
5. Melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PNPM kepada Menteri Koordinator Bidang Kesra minimal setiap tiga bulan.
6. Merumuskan konsep kebijakan operasional, perencanaan, dan mekanisme pengendalian PNPM yang dituangkan dalam bentuk berbagai pedoman dan surat edaran.
7. Melaksanakan hal-hal lain yang ditentukan kemudian oleh Tim Pengarah.

2) Tingkat Daerah

Struktur organisasi PNPM di daerah terdiri dari:

a. Tim Koordinasi PNPM Provinsi

Dalam rangka koordinasi pelaksanaan PNPM, di daerah dibentuk Tim Koordinasi PNPM Provinsi yang anggotanya terdiri dari pejabat instansi terkait di daerah di bawah koordinasi TKPKD Provinsi. Tim ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh penanggungjawab TKPKD Provinsi. Tugas Tim koordinasi PNPM Provinsi adalah sebagai berikut:

- 1) Mengkoordinasikan substansi pedoman teknis operasional program PNPM di provinsi.
- 2) Mengkoordinasikan penyusunan anggaran dan bantuan teknis berbagai kegiatan program sektoral di provinsi.
- 3) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan PNPM di provinsi.
- 4) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan PNPM di provinsi.
- 5) Mensinergikan kegiatan pusat dan daerah.

- 6) Memantau dan membantu penyelesaian berbagai permasalahan yang timbul di dalam pelaksanaan kegiatan serta mengambil tindakan/sanksi yang diperlukan.
- 7) Melaporkan perkembangan kegiatan, hasil audit, dan evaluasi kepada gubernur.
- 8) Memastikan bahwa proses kegiatan sesuai dengan pedoman PNPM.

Untuk memperlancar pelaksanaan operasional Tim koordinasi PNPM, di Provinsi dapat dibentuk Satuan Kerja (Satker) yang mendukung operasional di ruang lingkup wilayah provinsi untuk pelaksanaan tugas-tugas tim yang bersumber dari APBD Provinsi. Penunjukkan satuan kerja tersebut ditentukan oleh gubernur.

b. Tim koordinasi PNPM Kabupaten/Kota

Dalam rangka koordinasi pelaksanaan PNPM, di daerah dibentuk Tim koordinasi PNPM Kabupaten/Kota yang anggotanya terdiri dari pejabat instansi terkait di daerah di bawah koordinasi TKPKD Kabupaten/Kota. Tim ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh penanggungjawab TKPKD Kabupaten/Kota. Tugas Tim TKPKD Kabupaten/Kota, adalah sebagai berikut:

- 1) Mengkoordinasikan substansi pedoman teknis operasional program-program PNPM di kabupaten/kota.
- 2) Mengkoordinasikan penyusunan anggaran dan bantuan teknis berbagai kegiatan program sektor.
- 3) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan PNPM di kabupaten/kota.
- 4) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan PNPM kabupaten/kota.
- 5) Mensinergikan kegiatan pusat dan daerah.
- 6) Memantau dan membantu penyelesaian berbagai permasalahan yang timbul didalam pelaksanaan kegiatan serta mengambil tindakan/sanksi yang diperlukan.
- 7) Melaporkan perkembangan kegiatan, hasil audit, dan evaluasi kepada bupati/walikota.
- 8) Memastikan bahwa proses kegiatan sesuai dengan pedoman PNPM.

c. Satuan Kerja PNPM di Kabupaten/Kota

Pelaksanaan PNPM di Kabupaten/Kota dilakukan oleh Satuan Kerja Kabupaten/Kota. Kecamatan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kabupaten/kota yang memberikan pelayanan kepada desa/kelurahan dan bertugas memfasilitasi desa/kelurahan dalam rangka kerjasama antar desa/kelurahan bagi kepentingan program. Kecamatan juga bertugas untuk melakukan pembinaan, penguatan kapasitas kerjasama antar desa/kelurahan, serta mengelola administrasi kegiatan yang diperlukan guna menjamin akuntabilitas dan transparansi program. Dalam rangka tugas tersebut, di kecamatan dibentuk gugus tugas pelaksanaan (Penanggungjawab Operasional Kegiatan/PjOK) yang ditetapkan melalui SK Bupati/Walikota.

d. Masyarakat atau Komunitas

Masyarakat membentuk atau mengembangkan kelembagaan masyarakat yang salah satu fungsinya adalah mengelola kegiatan di kecamatan dan desa/kelurahan. Kelembagaan di kecamatan adalah Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dengan Musyawarah Antar Desa (MAD) sebagai forum tertinggi pengambilan keputusan dan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai pengelola yang bertanggungjawab kepada MAD. Sedangkan untuk kecamatan di wilayah perkotaan tidak dibentuk lembaga khusus. Musyawarah antar kelurahan/desa dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) kecamatan regular. Agar proses didalam forum-forum musrenbang tersebut berjalan sesuai aturan yang ada, fasilitator PNPM perlu memastikan bahwa hasil perencanaan partisipasi PNPM menjadi masukan Musrenbang kecamatan dan wakil-wakil masyarakat, termasuk dari lembaga keswadayaan masyarakat, dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan di forum-forum tersebut.

Kelembagaan PNPM di desa/kelurahan adalah lembaga keswadayaan masyarakat yang dibentuk, ditetapkan oleh masyarakat, dan bertanggungjawab kepada masyarakat melalui musyawarah desa/kelurahan. Lembaga ini berfungsi secara kolektif dan bertanggungjawab terhadap pengelolaan kegiatan PNPM di desa/kelurahan. Prinsip pemilihan keanggotaan dan

kepengurusan lembaga tersebut adalah langsung, umum, bebas, dan rahasia. Proses pemilihan dilakukan dengan cara: tanpa kampanye, tanpa pencalonan, berjenjang mulai dari tingkat basis dengan menggunakan kartu pilih, berdasarkan rekam jejak perilaku dan perbuatannya. Keanggotaan dan kepengurusan bersifat suka rela dan periodik berdasarkan kesepakatan masyarakat.

Untuk mendukung pengelolaan program, perlu mengembangkan tenaga penggerak/pelopor masyarakat didalam melaksanakan kegiatan PNPM dan pembangunan di lingkungannya. Para penggerak tersebut diambil dari warga masyarakat setempat yang peduli dengan lingkungannya, memiliki komitmen yang besar terhadap pembangunan masyarakatnya, dan tidak pamrih. Kelompok-kelompok masyarakat yang sudah ada dapat menjadi pemanfaat, pelaksana, atau pengelola kegiatan PNPM.

D. Badan Keswadayaan Masyarakat

1. Pengertian Badan Keswadayaan Masyarakat

Kelembagaan lokal yang mengurus masalah PNPM adalah Badan Keswadayaan Masyarakat atau biasa disebut dengan BKM. Dalam Buku Pedoman Badan Keswadayaan Masyarakat Januari 2005 menjelaskan BKM merupakan lembaga masyarakat warga (*Civil Society Organization*) yang pada hakekatnya mengandung pengertian sebagai wadah masyarakat untuk bersinergi dan menjadi lembaga kepercayaan milik masyarakat, yang diakui baik oleh masyarakat itu sendiri maupun pihak luar, dalam upaya masyarakat membangun kemandirian menuju tatanan masyarakat madani (*Civi Society*), yang dibangun dan dikelola berdasarkan nilai-nilai universal (*Value based*).

BKM adalah kelembagaan yang dirancang untuk membangun kembali kehidupan masyarakat mandiri yang mampu mengatasi kemiskinannya. Disamping itu BKM mengemban misi untuk menumbuhkan kembali ikatan-ikatan sosial dan menggalang solidaritas sosial sesama warga agar saling bekerjasama demi kebaikan bersama. BKM adalah dewan pimpinan kolektif masyarakat warga penduduk kelurahan, dan sebagai lembaga BKM dapat bertindak sebagai representasi masyarakat warga penduduk kelurahan.

BKM adalah forum musyawarah dan pengambilan keputusan tertinggi warga masyarakat setempat, yang berhak menilai rencana atau usulan kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam jenis kegiatan PNPM. Sebagai konsep umum, BKM dapat berupa lembaga masyarakat yang telah ada, yang berfungsi dan diterima secara meluas oleh masyarakatnya. Pengenalan kelembagaan BKM tidak ditujukan pada penciptaan lembaga-lembaga baru, melainkan ditujukan untuk upaya pemampuan lembaga-lembaga yang telah ada dalam masyarakat melalui peningkatan peran-perannya. Oleh karena itu, BKM dapat dijalankan oleh lembaga resmi (LMD atau LKMD) atau lembaga lainnya yang telah ada, sejauh lembaga-lembaga tersebut masih berakar dan berfungsi dalam masyarakat.

2. Tujuan BKM

Tujuan pembentukan BKM adalah untuk menumbuhkan kembali solidaritas sosial sesama warga agar dapat bekerjasama secara demokratis, sehingga mampu membangun kembali kehidupan masyarakat yang mandiri. Dalam jangka panjang, BKM merupakan wadah bagi proses pengambilan keputusan tertinggi dalam masyarakat, dan menjadi forum yang bertugas mengelola berbagai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan. Dalam jangka pendek, BKM berhak membahas, menyusun prioritas pendanaan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan KSM berikut pengguliran dananya.

3. Peran dan Fungsi BKM

Peran pokok BKM adalah menilai dan memberikan persetujuan, serta mengkoordinasikan rencana-rencana kegiatan KSM, baik berupa kelompok-kelompok usaha bersama (Kube), maupun kelompok pengelola pembangunan prasarana dan sarana lingkungan. BKM mempunyai tanggung jawab untuk merealisasikan pengelolaan dana bergulir di masyarakat wilayah penerima bantuan.

Dalam penanganan tugas PNPM sehari-hari, BKM didampingi dan dibantu oleh Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) dan fasilitator kelurahan yang

bertugas di lapangan. Secara terperinci, BKM bertanggung jawab atas hal-hal sebagai berikut :

- 1) Melakukan koordinasi dan pemantauan kegiatan dan organisasi kerja KSM dalam pembangunan prasarana dan sarana dasar lingkungan dan kegiatan pengembangan usaha.
- 2) Menyusun dan menetapkan kegiatan-kegiatan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang diprioritaskan pendanaannya, dan mengajukan kepada Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) sebagai lampiran Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan (SPPB) yang ditandatangani bersama oleh Badan Keswadayaan Masyarakat dan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan.
- 3) Mengkaji dan menyetujui permintaan pencairan dana bantuan (pembangunan prasarana dan sarana dasar atau pengembangan usaha), sesuai dengan tahapan-tahapan pengerjaannya di lapangan (atas rekomendasi Konsultan Manajemen Wilayah).
- 4) Mengelola dana PNPM melalui Unit Pengelola Keuangan (UPK) sebagai unsur pelaksana pengelola keuangan BKM.
- 5) Menjamin keterbukaan dalam penggunaan dana serta meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab pihak-pihak yang berkepentingan.
- 6) Menyadarkan dan meyakinkan kaum perempuan dan generasi muda akan hak yang sama untuk berperan serta.
- 7) Menyediakan papan informasi di tempat yang mudah dijangkau dan mengumumkan daftar usulan KSM, laporan kemajuan fisik dan keuangan KSM dan laporan keuangan BKM.
- 8) Menyediakan kotak saran dan keluhan yang menyangkut kegiatan PNPM, kemudian menindaklanjuti setiap saran dan keluhan yang dimasukkan ke dalam kotak saran tersebut.
- 9) Memberikan penghargaan terhadap usulan proyek yang baik sesuai dengan kriteria yang disepakati bersama KSM-KSM sebelum suatu kegiatan dilaksanakan.

4. Proses Pembentukan BKM

BKM beranggotakan warga komunitas yang diakui komitmennya, seperti perwakilan warga RT/RW, perwakilan organisasi sosial kemasyarakatan, kelompok perempuan (PKK), tokoh masyarakat atau tokoh agama. Unsur aparatur daerah misalnya LKMD, dapat berpartisipasi dalam BKM dalam kapasitas pribadi. Pimpinan BKM harus dipilih dari dan oleh anggotanya.

Pengambilan keputusan yang mengikat seluruh anggota BKM dilakukan melalui penyelenggaraan musyawarah tertinggi yang melibatkan seluruh anggota. Setiap anggota memiliki hak suara yang sama. Dalam hal pengambilan keputusan yang menyangkut Kelompok Swadaya Masyarakat tertentu, maka anggota KSM itu gugur hak suaranya. BKM yang terbentuk akan disahkan notaris dengan biaya PJOK. Pertemuan-pertemuan BKM dapat dilakukan di tempat-tempat lain yang disepakati.

Unit Pengelola Keuangan (UPK) sebagai salah satu gugus tugas di BKM akan dibentuk untuk mencatat penyaluran dan pencairan dana kepada Kelompok Swadaya Masyarakat, serta mengelola dana bergulir kelurahan. Kredit pengembangan usaha yang diterima oleh KSM harus dikembalikan berikut bunganya. Dana yang terkumpul kembali ini akan dipinjamkan/digulirkan kepada KSM-KSM peminjam berikutnya yang dipilih berdasarkan prinsip yang sama.

Anggota BKM yang dipilih harus memenuhi kriteria kemanusiaan yang disepakati bersama seperti jujur, rendah hati, tanpa pamrih, adil, ikhlas dan lain sebagainya yang ditunjukkannya dalam hidupnya sehari-hari. Kriteria dasar ini harus disepakati terlebih dahulu oleh para calon pemilih (warga) dan ditetapkan sebagai aturan main dalam membentuk BKM. Konsep dasar yang dianut dalam memilih pemimpin adalah : “Lebih baik mendapat pilihan pemimpin yang paling buruk dari kumpulan orang-orang baik dari pada mendapat pilihan pemimpin yang terbaik dari dari kumpulan orang-orang buruk”. Dengan dasar pemikiran ini maka pemilihan anggota BKM sejak awal dilakukan melalui proses penjarangan (menyaring) orang-orang baik atau orang-orang yang memiliki ciri-ciri atau sifat-sifat kemanusiaan, yang biasanya orang tersebut rendah hati, tidak suka menyombongkan diri dan tidak suka mengumbar janji-janji. Sehingga menyaring orang-orang seperti ini tentu saja tidak dapat dilakukan dengan cara kampanye,

tetapi harus dilakukan melalui proses konfirmasi nama-nama orang yang dapat dipercayai memiliki ciri-ciri kemanusiaan semacam itu langsung dari masyarakat.

Anggota dari BKM ini haruslah relawan, karena :

- 1) Relawan adalah manifestasi dari nilai Ikhlas yang merupakan salah satu kriteria dasar calon anggota BKM
- 2) Anggota BKM bukanlah orang bayaran melainkan orang-orang merdeka yang secara sadar memberikan sebagian waktunya untuk orang lain.
- 3) Sebagai disinsentif bagi orang-orang yang bermaksud kurang baik
- 4) BKM adalah wahana pengabdian bagi orang-orang baik dan ikhlas yang akan mengaktualisasikan dirinya sebagai manusia sejati
- 5) Bila anggota BKM bukan relawan maka yang justru akan terjadi adalah:
 - Masuknya orang-orang pencari kerja atau orang-orang yang memiliki pamrih
 - BKM bukan lagi wahana pengabdian
 - Anggota BKM bukan lagi orang merdeka yang mau menolong sesama melainkan orang bayaran yang setia.

5. Prinsip Dasar BKM

Prinsip-prinsip dasar yang melandasi BKM antara lain:

- 1) BKM adalah organisasi berdasarkan anggota aktif, artinya: keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh BKM haruslah melibatkan seluruh anggota.
- 2) BKM adalah organisasi yang demokratis, dalam arti setiap anggota memiliki hak suara yang sama. Proses-proses pengambilan keputusan dilakukan secara transparan dan partisipatif.
- 3) BKM adalah organisasi yang terbuka, sehingga setiap warga masyarakat khususnya pihak-pihak yang termasuk kelompok-kelompok sasaran dan pihak-pihak yang dianggap mampu mengembangkan dan mencapai tujuan BKM, dapat dilihat dalam berbagai kegiatan BKM.
- 4) BKM adalah organisasi yang tidak membeda-bedakan orang (tidak diskriminatif, baik dari jenis kelamin, usia, status perkawinan suku bangsa maupun agama).

6. Indikator Kinerja

BKM adalah jantung PNPM. Keberhasilan PNPM terletak pada kinerja BKM. Oleh karena itu, perlu adanya aspek kinerja BKM, yang antara lain sebagai berikut:

- 1) Aspek keanggotaan dan kepemimpinan
- 2) Aspek manajemen
- 3) Aspek strategi, kebijakan dan perencanaan program
- 4) Aspek sistem informasi, monitoring dan evaluasi kegiatan
- 5) Aspek sumber daya manusia
- 6) Aspek orientasi dan persebaran layanan
- 7) Aspek keberlanjutan

7. Kewenangan BKM

BKM memiliki kewenangan untuk:

- 1) Menetapkan usulan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) yang diprioritaskan pendanaannya setelah usulan KSM dinilai layak.
- 2) Mengkaji dan menyetujui permintaan pencairan dana bantuan kepada KSM
- 3) Memantau aktivitas KSM setelah memperoleh pencairan dana.
- 4) Mengelola dana bantuan melalui Unit Pengelola Keuangan (UPK).
- 5) Menjamin tumbuhnya keswadayaan masyarakat dalam menangani persoalan kehidupan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan.

E. Efektivitas

1. Pengertian efektivitas

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan, faktor efektivitas selalu mendasari usaha pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini karena efektivitas merupakan alat pengukur tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka pencapaian suatu tujuan.

Bagi seorang ahli ekonomi atau analisis keuangan, efektivitas organisasi adalah keuntungan atau laba investasi. Bagi seorang manajer produksi, efektivitas berarti kuantitas atau kualitas keluaran (*out put*) barang atau jasa. Bagi seorang

ilmuwan bidang riset, efektivitas dijabarkan dengan jumlah paten, penemuan, atau produk baru suatu organisasi. Dan bagi sejumlah sarjana ilmu sosial, efektivitas seringkali ditinjau dari sudut kualitas kehidupan pekerja (Steers,1996:1).

Menurut Georgopoulos dan Tannenbaum dalam Steers (1996:50) yang meninjau efektivitas dari sudut pencapaian tujuan menyatakan bahwa rumusan keberhasilan organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi juga mekanismenya mempertahankan diri dan mengejar sasarnya. Dengan kata lain, penilaian efektivitas harus berkaitan dengan masalah sarana maupun tujuan-tujuan organisasi.

Dari pengertian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas mengandung beberapa pengertian yang berkaitan dengan mekanisme dalam mengejar sasaran didukung oleh sarana maupun tujuan organisasi yang jelas. Selain itu juga sejauh mana organisasi berhasil mencapai tujuan sesuai dengan rencana dan waktu yang telah ditentukan.

2. Ukuran Efektivitas

Pendapat tentang ukuran juga beragam (Steers, 1996:61) antara lain adalah:

- 1) Menurut Thorndike, kriteria yang dipakai dalam efektivitas organisasi adalah produktivitas, laba bersih, penyelesaian misi, pertumbuhan serta stabilitas organisasi.
- 2) Menurut Campbell, ukuran yang digunakan oleh suatu organisasi berjumlah sembilan belas tetapi yang menonjol yaitu keseluruhan prestasi, produktivitas, kepuasan kerja pegawai, laba dan tingkat penghasilan, dan keluarnya pegawai.
- 3) Menurut Georgopoulos dan Tannenbaum, kriterianya adalah produktivitas, fleksibilitas, dan tidak ada tekanan dari organisasi.
- 4) Menurut Duncan, ukurannya adalah pencapaian tujuan, intergrasi, dan adaptasi.

Steers sendiri mengemukakan bahwa efektivitas organisasi menggunakan tiga konsep yang saling berhubungan yaitu:

- 1) Optimisasi tujuan, bahwa sukses organisasi diukur menurut ukuran seberapa jauh sebuah organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai dan optimal.
- 2) Perspektif sistem, bahwa tujuan tidak diperlukan sebagai keadaan akhir yang statis tetapi sebagai sesuatu yang dapat berubah dalam perjalanan waktu. Lagipula tercapainya tujuan-tujuan jangka pendek tertentu dapat memberikan masukan baru untuk penentuan tujuan berikutnya. Jadi

tujuan suatu organisasi mengikuti suatu daur dalam organisasi bila menggunakan perspektif sistem.

- 3) Tekanan pada perilaku, yaitu meneliti bagaimana tingkah laku individu dan kelompok dalam mendorong pencapaian tujuan organisasi atau bahkan menghalangi tercapainya tujuan organisasi (Steers, 1996:6).



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini bermaksud mendapatkan gambaran nyata implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat secara sistematis dan faktual di lapangan, serta kecenderungan pencapaian hasil program, oleh karena itu jenis penelitian ini adalah jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penggunaan jenis penelitian ini dipandang lebih mendukung dalam memberikan arti dan makna yang berguna dalam menyerap permasalahan yang berkaitan dengan fokus penelitian. Menurut Neuman (1997:19), penelitian deskriptif mampu menyajikan gambaran secara detail dari sebuah situasi dan atau *setting social*.

B. Fokus Penelitian

Fokus merupakan salah satu faktor penting untuk menentukan batas atau ruang lingkup penelitian yang akan dilakukan, sehingga laporan yang dihasilkan dapat lebih jelas. Fokus penelitian ini adalah :

1. Proses pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Polowijen Kecamatan Belimbing Kota Malang:
 - a) Perencanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat.
 - b) Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat.
 - c) Pengawasan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat.
 - d) Evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat.
2. Tingkat efektivitas dari program nasional pemberdayaan masyarakat:
 - a) Tingkat keberdayaan dan kemandirian masyarakat.
 - b) Tingkat partisipasi masyarakat.
 - c) Tingkat kapasitas kelembagaan masyarakat.
3. Faktor pendukung dan penghambat dalam program nasional pemberdayaan masyarakat.
 1. Faktor pendukung
 - a) Anggaran
 - b) Masyarakat

2. Faktor penghambat
 - a) Sumber daya manusia

C. Lokasi dan Situs penelitian

Lokasi penelitian berkaitan dengan tempat yang dipilih sebagai obyek penelitian sedangkan situs penelitian berkaitan dengan letak dimana penelitian dilakukan dari obyek penelitian, tempat dimana fenomena itu terjadi situsnya adalah di BKM Polowijen dan peneliti tertarik mengambil lokasi penelitian di BKM Kelurahan Polowijen Kecamatan Belimbing Kota Malang dikarenakan peneliti melihat BKM di Polowijen terlihat berjalan dengan baik dalam menjalankan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Selain itu, peneliti juga melihat pembangunan dalam hal sarana dan prasarana di Kelurahan Polowijen terlihat berjalan dengan baik dalam penanganan arus transportasi dan perhubungan di wilayahnya karena Kelurahan polowijen cukup dekat dengan terminal sehingga pembangunan di Kelurahan Polowijen cukup pesat. Hal ini dapat dilihat dari:

1. Kelurahan Polowijen sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai wirausahawan atau pedagang dan wiraswasta. Berdasarkan survei awal yang dilakukan oleh peneliti dimana arus transportasi dan perhubungan sangat mendukung untuk sektor usaha perdagangan dan swasta.
2. Sebagian besar masyarakat sangat mendukung pembangunan sarana dan prasarana untuk membuka akses ekonomi mereka yang dilakukan oleh kepala kelurahannya. Hal ini mengindikasikan dukungan yang besar dari masyarakat terhadap pembangunan di daerahnya.

Situasi ini yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kelurahan Polowijen untuk dapat mengetahui dan mendeskripsikan sampai sejauh mana tingkat efektivitas dari PNPM dalam rangka mengentaskan kemiskinan di Kelurahan Polowijen Kecamatan belimbing Kota Malang.

D. Sumber dan jenis Data

Menurut Lofland dalam Moleong (2000:112) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, tindakan dan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen.

Jenis data yang digunakan ada dua macam yaitu :

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini data primer yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian yaitu melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait. Data primer yang didapat oleh peneliti berasal dari :
 - a. Pengurus BKM
 - b. Masyarakat kelurahan Polowijen
2. Data sekunder adalah data yang pengumpulannya bukan merupakan data hasil usaha sendiri atau merupakan data yang diperoleh bukan dari sumber secara langsung, melainkan sudah dikumpulkan oleh pihak lain atau sudah diolah. Misalnya pengumpulannya didapat dari buku, majalah, koran dan sebagainya. Data sekunder yang didapat oleh peneliti berasal dari:
 - a. Kelurahan Polowijen
 - b. BKM Polowijen
 - c. Situs- situs di Internet
 - d. Buku panduan PNPM

E. Teknik Pengumpulan data

Informan dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling* (sampling bertujuan), artinya informan dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa informan mengetahui secara baik pelaksanaan PNPM di Kelurahan Polowijen. Untuk itu, informan yang telah dipertimbangkan sesuai dan mengetahui secara baik pelaksanaan program PNPM seperti pengurus BKM di kelurahan Polowijen, Pemuka Masyarakat, serta perangkat desa.

Untuk mengumpulkan data dan informasi digunakan teknik:

- (1) Wawancara mendalam yang biasa digunakan dalam penelitian kualitatif dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan

yang biasanya menggunakan pedoman wawancara dengan maksud mendapatkan informasi secara lengkap, mendalam, dan komprehensif sesuai tujuan penelitian.

- (2) Observasi, penggunaan teknik observasi dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkap fenomena yang tidak diperoleh melalui teknik wawancara.
- (3) Studi dokumentasi, penggunaan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menghimpun dan merekam data yang bersifat dokumentatif, seperti: foto-foto kegiatan, arsip-arsip penting, kebijakan, dan lainnya.

F. Instrument Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan dalam proses pengumpulan data yang berwujud sarana/benda (Arikunto, 2002:126). Instrumen yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah:

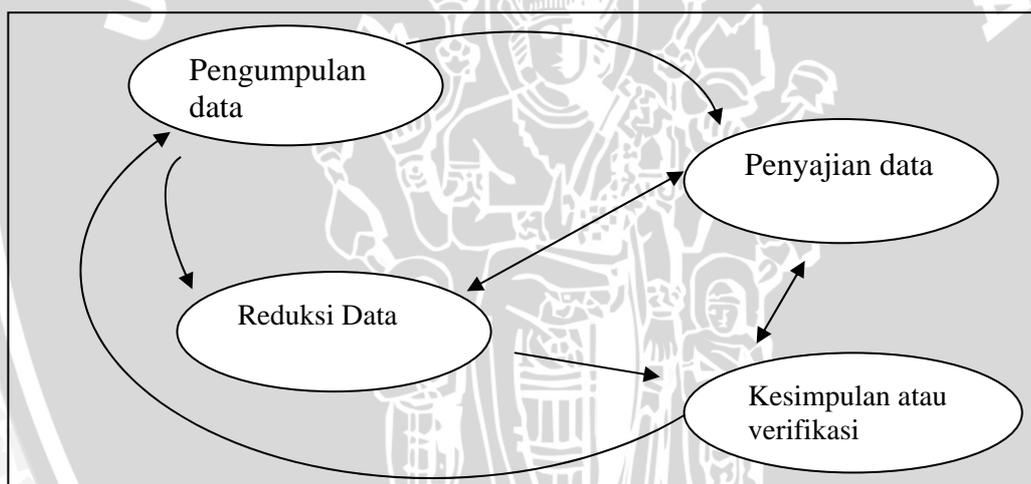
- 1) Peneliti sendiri, yang merupakan sarana pengumpul data utama, terutama pada saat proses wawancara dan analisa data. Serta peneliti menggunakan alat panca indera untuk melakukan pengamatan langsung dan pencatatan terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan.
- 2) Pedoman wawancara, merupakan suatu daftar pertanyaan yang akan diberikan kepada informan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data dan juga berfungsi sebagai pengarah dalam proses wawancara dengan informan.
- 3) Perangkat penunjang lain yang berupa buku catatan dan alat tulis yang digunakan untuk mencatat data yang diperoleh di lokasi penelitian.

G. Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam proses penelitian karena dengan analisis data akan ada pemaknaan bagi data dalam memecahkan masalah penelitian. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dalam tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Miles, Huberman & Yin dalam Suprayogo & Tobroni (2001:192). Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Sedangkan penyajian data adalah kegiatan penyajian sekumpulan informasi dalam bentuk teks naratif yang dibantu dengan metrik, grafik, jaringan, tabel, dan bagan yang bertujuan mempertajam pemahaman peneliti terhadap informasi yang diperoleh. Dan penarikan kesimpulan adalah mencari arti, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan sehingga data-data yang ada teruji validitasnya.

Bagan Analisis Data Model Interaktif



Sumber: Miles dan Huberman (1992:20)

1) Reduksi Data

Data dilapangan diuraikan dalam uraian atau laporan yang lengkap, dan terinci. Laporan lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, dan difokuskan pada hal-hal yang penting, kemudian dicari tema atau polanya. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung.

2) Penyajian Data

Sekumpulan informasi yang tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan kesimpulan. Penyajian data akan memudahkan penelitian guna melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian.

3) Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Peneliti berusaha menggambarkan data yang dikumpulkan, dituangkan dalam kesimpulan yang masih bersifat *tentative*, tetapi dengan bertambahnya data melalui verifikasi secara terus menerus dapat ditarik kesimpulan yang benar.

Dalam analisis data kualitatif model interaktif yang digunakan peneliti merupakan upaya terus menerus yang mencakup tahapan-tahapan reduksi data penyajian data dan penarikan kesimpulan menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian analisis yang saling susul menyusul dan senantiasa merupakan bagian dari lapangan (Miles dan Huberman, 1992:20). Oleh karena itu, dalam penelitian ini setiap data-data yang diperoleh mengenai bagaimana efektivitas dari pelaksanaan PNPM yang dilaksanakan oleh BKM sebagai penyedia layanan (*service provider*) kepada *stakeholder* akan dilakukan dengan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman melalui reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Ketiga tahapan tersebut akan coba dianalisis secara lebih dalam agar memperoleh hasil penelitian yang memuaskan.

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Gambaran umum lokasi penelitian.

a. Kondisi geografis obyek penelitian

Kelurahan Polowijen mempunyai luas wilayah 142 Ha. Adapun batas-batas wilayah Kelurahan Polowijen adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kelurahan Balarjosari
- Sebelah Selatan : Kelurahan Purwodadi
- Sebelah Barat : Kelurahan Tunjung Sekar
- Sebelah Timur : Kelurahan Padanwangi

Secara geografis Kelurahan Polowijen berketinggian 444 m dari permukaan laut, bersuhu antara 20°-22°C, dengan curah hujan 202 mm/tahun, yang terletak sebelah utara pusat Kota Malang dengan kantor Kelurahan di Jalan Ahmad Yani Utara no.2A Malang.

b. Kondisi penduduk

Berdasarkan data kependudukan Kelurahan Polowijen dapat diketahui bahwa jumlah penduduk total pada periode semester II tahun 2007 sebesar 9.800 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 2.700 KK.

Tabel 1
Jumlah dan kepadatan penduduk

No	URAIAN	2007
1.	Jumlah Penduduk seluruhnya Tahun ini	9800 Jiwa
2.	Jumlah Penduduk seluruhnya Tahun lalu	9589 Jiwa
3.	Jumlah Kepala Keluarga	2700 KK
4.	Luas Wilayah	142.000 m ²
5.	Kepadatan Penduduk (Luas Wilayah : Jumlah Penduduk)	145 orang/km ²

Sumber: Monografi Kelurahan Polowijen tahun 2007

Tabel 2
Jumlah Penduduk Kelurahan Polowijen Menurut Jenis Kelamin Tahun 2007

Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)
Laki-laki	4.891 Jiwa
Perempuan	4.909 Jiwa
Total Penduduk	9.800 Jiwa

Sumber: Monografi Kelurahan Polowijen tahun 2007

Berdasarkan data kependudukan Kelurahan Polowijen menurut jenis kelamin 2007 jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan lebih banyak dibandingkan dengan penduduk berjenis kelamin laki-laki. Jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan sebesar 4.909 jiwa dan penduduk laki-laki sebesar 4.891 jiwa.

Berdasarkan data kependudukan Kelurahan Polowijen menurut golongan umur pada periode II tahun 2007 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3
Jumlah Penduduk Kelurahan Polowijen Menurut Golongan Umur Tahun 2007

No	GOLONGAN UMUR	Jumlah (Jiwa)
1	0 bulan – 12 bulan	108 Jiwa
2	13 bulan – 4 tahun	508 Jiwa
3	5 tahun – 6 tahun	331 Jiwa
4	7 tahun – 12 tahun	875 Jiwa
5	13 tahun – 15 tahun	411 Jiwa
6	16 tahun – 18 tahun	462 Jiwa
7	19 tahun – 25 tahun	1104 Jiwa
8	26 tahun – 35 tahun	1640 Jiwa
9	36 tahun – 45 tahun	1466 Jiwa
10	46 tahun – 50 tahun	709 Jiwa
11	51 tahun – 58 tahun	871 Jiwa
12	Diatas 58 tahun	1218 Jiwa
JUMLAH		9800 Jiwa

Sumber: Monografi Kelurahan Polowijen tahun 2007

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Kelurahan Polowijen didominasi oleh penduduk yang berumur antara 26 tahun sampai dengan 35 tahun. Sedangkan penduduk berusia 0 – 12 bulan merupakan jumlah penduduk yang paling sedikit yaitu sebesar 108 jiwa.

Berdasarkan data kependudukan Kelurahan Polowijen tahun 2007 menurut pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4
Jumlah Penduduk Kelurahan Polowijen Menurut Pendidikan Tahun 2007

Pendidikan	Jumlah (jiwa)
Penduduk usia 10 tahun keatas buta huruf	29 Jiwa
Tidak Tamat Sekolah Dasar	188 Jiwa
Tamat SD / Sederajat	1.234 Jiwa
Tamat SLTP / Sederajat	2.599 Jiwa
Tamat SMU / Sederajat	3.042 Jiwa
Tamat Akademi / Sederajat	573 Jiwa
Tamat Perguruan Tinggi / Sederajat	1.089 Jiwa

Sumber: Monografi Kelurahan Polowijen tahun 2007

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan penduduk di Kelurahan Polowijen yang memiliki jumlah paling besar adalah lulusan SMU / sederajat (3.042 jiwa) dan SLTP / sederajat (2.599 jiwa). Untuk jumlah penduduk yang tamat perguruan tinggi / sederajat sebesar 1.089 jiwa. Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendidikan penduduk di Kelurahan Polowijen sudah cukup tinggi. Hal ini berdasarkan tingginya angka penduduk yang lulus SMU / sederajat dan perguruan tinggi / sederajat.

c. Kondisi mata pencaharian

Berdasarkan data kependudukan Kelurahan Polowijen Kondisi Mata Pencaharian Penduduk Tahun 2007, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5
Jumlah Penduduk Kelurahan Polowijen Menurut Mata Pencapaian Tahun 2007

NO	URAIAN	2007 (Jiwa)
1.	Buruh Swasta	1008 Jiwa
2.	Pegawai Negeri Sipil	201 Jiwa
3.	Pegawai BUMN/BUMD	12 Jiwa
4.	Pedagang	2700 jiwa
5.	Penjahit	14 Jiwa
6.	Tukang Batu	12 Jiwa
7.	Tukang Kayu	23 Jiwa
8.	Guru	88 Jiwa
9.	Bidan	5 Jiwa
10.	Dokter	5 Jiwa
11.	TNI / POLRI	111 Jiwa
12.	Pensiunan TNI / POLRI	157 Jiwa
13.	Tukang cukur	6 Jiwa
JUMLAH		4342 Jiwa

Sumber: Monografi Kelurahan Polowijen tahun 2007

Sebagian besar mata pencapaian penduduk Kelurahan Polowijen adalah pedagang dan pegawai swasta. Walaupun ada pegawai negeri sipil dan TNI tidak begitu banyak karena seleksi untuk menjadi PNS atau TNI sangat sulit. Menurut data lapangan bahwa ada kecenderungan masyarakat Kelurahan Polowijen memilih sektor perdagangan dan swasta. Mata pencapaian ini menjadi pilihan masyarakat Kelurahan Polowijen karena sektor perdagangan merupakan sektor yang relatif mudah untuk dilakukan oleh semua masyarakat. Selain itu banyaknya pegawai sektor swasta karena banyaknya perusahaan-perusahaan swasta yang ada di Kelurahan Polowijen.

Profesi lain yang ada di Kelurahan Polowijen adalah guru, profesi ini sangat menunjang kelangsungan pendidikan yang ada di Kelurahan Polowijen untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di Kelurahan Polowijen. Ada juga masyarakat yang bermata pencapaian di bidang keterampilan seperti penjahit, tukang kayu, tukang batu, dan tukang cukur. Biasanya warga yang berprofesi di bidang keterampilan adalah warga yang memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah namun hasil kerja mereka sangat bagus dan profesional. Pada

kondisi terakhir, sektor ekonomi bagi keluarga miskin semakin memprihatinkan karena tidak mampu bersaing. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Kurang atau tidak mempunyai modal usaha.
2. Kurangnya keahlian dalam bidang yang ditekuninya
3. Tidak adanya keterampilan ibu rumah tangga miskin yang dapat digunakan untuk menambah penghasilan.

Tabel 6
Jumlah Pencari Kerja

Uraian	Jumlah (jiwa)
Jumlah penduduk usia 15-55 Tahun yang menganggur	63 Jiwa
Jumlah angkatan Kerja usia 15-55 Tahun	3.052 Jiwa
Total Penduduk	3.115 Jiwa

Sumber: Monografi Kelurahan Polowijen tahun 2007

Jumlah pengangguran di Kelurahan Polowijen masih terbilang cukup sedikit namun masih ada yang masih belum bekerja. Hal ini harus mendapat perhatian dari pemerintah Kota Malang untuk dapat mencari solusi dalam menyelesaikan masalah pengangguran.

d. Keadaan mobilitas penduduk.

Tabel 7
Keadaan Mobilitas Penduduk

No	Jenis Mutasi	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (Jiwa)
1	Pindah Datang	30	28	58 Jiwa
2	Pindah Keluar	36	43	79 Jiwa
3	Lahir	21	22	43 Jiwa
4	Mati	5	9	14 Jiwa

Sumber: Monografi Kelurahan Polowijen tahun 2007

e. Kelembagaan di Kelurahan Polowijen

Tabel 8
Lembaga Pemerintahan

NO	URAIAN	2007 (Jiwa)
Jumlah aparat pemerintahan Kelurahan		11 Jiwa
Pendidikan Aparat:		
1.	Sarjana/S2	2 Jiwa
2.	Sarjana/S1	4 Jiwa
3.	Diploma	-
4.	SLTA	5 Jiwa
5.	SLTP	-
6.	SD	-
7.	Jumlah RW	5
8.	Jumlah RT	34

Sumber: Monografi Kelurahan Polowijen tahun 2007

Tabel 9
Lembaga Kemasyarakatan

No	URAIAN	2007	
		Jml	Anggota (Jiwa)
1.	Organisasi Perempuan	5 Kelompok	623 Jiwa
2.	PKK	40 Kelompok	925 Jiwa
3.	Organisasi Pemuda	8 Kelompok	200 Jiwa
4.	Organisasi Karang Taruna	1 Kelompok	80 Jiwa
5.	Organisasi Profesi	-	-
6.	Majelis Taklim	20 Kelompok	1025 Jiwa
7.	Organisasi Bapak-bapak	11 Kelompok	52 Jiwa
8.	LPMK atau sebutan lain	1 Kelompok	24 Jiwa
9.	Kelompok Gotong royong	-	-
Jumlah		86 Kelompok	2929 Jiwa

Sumber: Monografi Kelurahan Polowijen tahun 2007

Tabel 10
Kelembagaan Politik

NO	NAMA PARTAI POLITIK
	2007
1.	PKB
2.	PDIP
3.	PARTAI GOLKAR
4.	PAN
5.	PKS
6.	PPP
7.	PNU
8.	PBB

Sumber: Monografi Kelurahan Polowijen tahun 2007

Tabel 11
Kelembagaan Ekonomi

No	URAIAN	2007		
		Jml	Anggota	Naker (Jiwa)
1.	Koperasi	2	45	-
2.	Industri Makanan	1		30 Jiwa
3.	Industri Kerajinan	3		22 Jiwa
4.	Industri Pakaian	2	-	14 Jiwa
5.	Industri Mebel	-		-
6.	Usaha perdagangan	-		-
7.	Warung Makan	26		62 Jiwa
8.	Bengkel	7	-	14 Jiwa
9.	Toko/Swalayan	4		70 Jiwa
10.	Percetakan/Sablon	2	-	15 Jiwa
11.	Pasar	-	-	-
12.	Angkutan Kota	16	-	24 Jiwa

Sumber: Monografi Kelurahan Polowijen tahun 2007

Tabel 12
Lembaga Pendidikan

No	URAIAN	2007		
		Jml	Jml Guru/ dosen	Jml Murid/Siswa/ Mahasiswa
1.	TK	4	15	250 Jiwa
2.	SD/Sederajat	3	36	615 Jiwa
3.	SLTP/Sederajat	2	29	524 Jiwa
4.	SLTA/Sederajat	2	48	913 Jiwa
5.	Perguruan Tinggi	2	232	964 Jiwa
6.	Lembaga Pendidikan Agama	4	32	266 Jiwa
7.	Kursus Komputer	2	8	45 Jiwa

Sumber: Monografi Kelurahan Polowijen tahun 2007

Tabel 13
Lembaga Keamanan

No	URAIAN	2007
1.	Jumlah RT	34
2.	Jumlah RW	5
3.	Jumlah Hansip/Linmas	85 Jiwa
4.	Jumlah Pos Kamling	30 Buah

Sumber: Monografi Kelurahan Polowijen tahun 2007

2. Gambaran Umum Permasalahan Kemiskinan di Kelurahan Polowijen

a. Kesehatan

Kondisi kesehatan di wilayah Polowijen pada umumnya masih *relative* rendah, sehingga masih banyak masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian terhadap masalah kesehatan secara menyeluruh. Ini terbukti masih banyak kartu-kartu sehat (keluarga miskin) yang beredar di masyarakat, setiap hari tampak dipusat pelayanan kesehatan masyarakat atau puskesmas dipenuhi warga untuk mendapatkan pelayanan pengobatan baik di puskesmas pusat maupun puskesmas pembantu. Enam Posyandu yang ada di Kelurahan Polowijen merupakan tumpuan masyarakat sebagai deteksi dini terhadap masalah kesehatan terutama bagi keluarga miskin. Namun sarana dan prasarana yang ada perlu dilengkapi, sehingga memadai untuk akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin.

b. Pendidikan

Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat Polowijen cukup tinggi, lulusan sarjana juga cukup banyak. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada anak yang putus sekolah karena kondisi orang tua yang kurang mampu untuk menyekolahkan anaknya. Hal ini perlu penanganan secara serius agar anak yang putus sekolah dapat melanjutkan sekolahnya bahkan ke tingkat yang lebih tinggi atau minimal bisa tamat sampai program pemerintah wajib belajar sembilan tahun. Untuk menangani hal tersebut perlu dioptimalkannya program anak asuh sehingga menyentuh masyarakat bawah, terutama masyarakat miskin.

c. Ekonomi

Mata pencaharian penduduk Polowijen beraneka ragam antara lain Pegawai negeri, TNI, *home industri*, guru, pedagang, wiraswasta, buruh pabrik, tukang, pegawai BUMN, dan lain-lain. Prosentase yang terbesar adalah pedagang. Pengangguran di Kelurahan Polowijen juga terbilang cukup banyak terutama bagi tamatan SLTA yang tidak bisa melanjutkan ke Perguruan Tinggi, sehingga perlu adanya pemikiran untuk meningkatkan taraf hidup mereka dengan bantuan modal dan bimbingan pelatihan keterampilan, terutama bagi usia angkatan kerja.

d. Lingkungan

Secara umum kondisi lingkungan dalam kondisi baik, dalam 5 (lima) tahun terakhir, telah digalakkan pembenahan berbagai sarana prasarana lingkungan. Pada tahun 2000 dengan adanya program P2KP yang sekarang dilanjutkan dengan PNPM di Kelurahan Polowijen telah dapat membantu mengatasi masalah lingkungan, karena Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM sebagian diprioritaskan untuk pemberdayaan lingkungan sesuai hasil pemetaan dari Fasilitator Kelurahan (Faskel) dan Kader Masyarakat Kelurahan Polowijen, hal tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan swadaya masyarakat. Namun demikian tidak semua masalah lingkungan dapat diatasi karena berbagai faktor.

Pada tahun 2002, setelah masyarakat berhasil membentuk lembaga baru yaitu LPMK sebagai ganti dari LKMD, maka mitra kelembagaan untuk mengatasi permasalahan lingkungan semakin intensif dan berhasil meningkatkan jumlah

penyelesaian masalah lingkungan. Terlebih pula sejak tahun 2004, Pemerintah Kota Malang dengan program SDB, BKOK, BKK, dan Bantuan Sosial yang diberikan untuk Kelurahan Polowijen, maka semakin merata penanganan lingkungan, dengan kata lain bahwa Rencana Tahunan Pemberdayaan Lingkungan dapat disusun dan direalisasikan secara nyata (partisipatif). Namun demikian masih banyak yang belum tertangani.

e. Pemukiman

Kondisi pemukiman di Kelurahan Polowijen rata-rata dalam standar layak huni. Namun diantara pemukiman masyarakat tersebut masih ada atau banyak yang perlu ditingkatkan, bahkan beberapa diantaranya tidak layak huni yaitu sebagian ada di wilayah RW. I, III, dan sebagian berada di wilayah RW. V. Pada tahun 2006 dan tahun 2007, telah dilakukan swadaya gotong royong untuk membangun dan memperbaiki rumah tersebut. Hal tersebut terwujud karena adanya kerjasama yang baik antar lembaga formal maupun non formal. Selain itu masih banyak yang perlu adanya penanganan atau bantuan oleh lembaga-lembaga yang terkait untuk menangani masalah rumah tidak layak huni. Dan pada tahun ini, BKM Polowijen berhasil melaksanakan program Tekelisasi (pemasangan tekel) rumah warga miskin dengan Program GERDU-TASKIN tahun 2007. Untuk keberlanjutan program ini sangat di butuhkan perhatian dari semua pihak termasuk Pemerintah Kota Malang.

f. Akses pelayanan pembangunan

Akses pada pelayanan dan pembangunan kelurahan masih perlu banyak perhatian dan penanganan. Berbagai pembangunan fisik di tingkat RT, RW sampai Kelurahan masih banyak yang belum tertangani, baik pembangunan fisik yang diajukan melalui musyawarah rencana pembangunan maupun BKK, dan atau program parsial lain dari Pemkot Malang belum banyak terealisasi. Oleh karena itu PNPM dengan Pronangkisnya diharapkan proyek-proyek pembangunan fisik dan non fisik tersebut dapat teratasi.

3. Gambaran Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dan Badan Keswadayaan Masyarakat Polowijen.

A. Gambaran Umum PNPM

Rangkaian proses pemberdayaan masyarakat pada PNPM dilakukan melalui komponen program sebagai berikut:

A.1. Pengembangan Masyarakat

Komponen pengembangan masyarakat mencakup serangkaian kegiatan untuk membangun kesadaran kritis dan kemandirian yang terdiri dari pemetaan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat, perencanaan partisipatif, pengorganisasian, pemanfaatan sumber daya, pemantauan, dan pemeliharaan hasil-hasil yang telah dicapai.

A.2. Bantuan Langsung Masyarakat

Komponen bantuan langsung masyarakat (BLM) adalah dana stimulan keswadayaan yang diberikan kepada kelompok masyarakat untuk membiayai sebagian kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan terutama masyarakat miskin.

A.3. Peningkatan Kapasitas Pemerintahan dan Pelaku Lokal

Komponen peningkatan kapasitas pemerintah dan pelaku lokal adalah serangkaian kegiatan yang meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan pelaku lokal atau kelompok peduli lainnya agar mampu menciptakan kondisi yang kondusif dan sinergis yang positif bagi masyarakat terutama kelompok miskin dalam menyelenggarakan hidupnya secara layak. Kegiatan terkait dalam komponen ini diantaranya seminar, lokakarya, kunjungan lapangan yang dilakukan secara selektif dan sebagainya.

A.4. Bantuan Pengelolaan dan Pengembangan Program

Komponen ini meliputi kegiatan-kegiatan untuk mendukung pemerintah dan berbagai kelompok peduli lainnya dalam pengelolaan kegiatan seperti penyediaan konsultan manajemen, pengendalian mutu, evaluasi, dan pengembangan program.

B. Proses pelaksanaan PNPM

Konsep pemberdayaan yang digagas PNPM bukanlah sekedar konsepsi atau teori saja. Namun, benar-benar diwujudkan dengan penguatan kelembagaan

masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan. Di setiap kelurahan diluncurkannya PNPM, dibentuk lembaga-lembaga yang mengurus warga miskin. Lembaga ini dibentuk masyarakat sendiri, secara demokratis. Pemerintah dalam hal ini hanya sebagai fasilitator, tidak mencampuri sedikitpun proses pembentukannya.

Sebelum pembentukan lembaga-lembaga itu, pemerintah dalam hal ini TKPP (terdiri dari beberapa satuan unit kerja di lingkungan Pemerintah) melakukan sosialisasi, untuk membantu masyarakat memahami PNPM secara tuntas. Selain itu, TKPP bermitra dengan sebuah perusahaan penyedia konsultan dan beberapa orang faskel, yang ditugasi melakukan pendampingan langsung terhadap kelompok masyarakat miskin di Kelurahan dan seorang Faskel menangani dua Kelurahan.

Lembaga yang pertama kali dibentuk adalah KSM (Kelompok Sosial Masyarakat). Kelompok ini berada di wilayah RT, yang secara obyektif menetapkan jumlah warga layak mendapatkan bantuan, sekaligus menjadi anggotanya. KSM-KSM itu selanjutnya membentuk BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat), lembaga yang menangani langsung Pronangkis (Program Penanggulangan Kemiskinan) di kelurahan. Keanggotaan BKM terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat, ada ustadz, guru, dan mereka yang dipercaya masyarakat.

Setelah terbentuk dan menerima data dari KSM, tentang jumlah warga miskin, beserta berbagai kebutuhannya, BKM menyusun PJM (Program Jangka Menengah) Pronangkis, untuk kurun waktu 3-5 tahun. PJM itu merupakan daftar kebutuhan masyarakat yang sebenarnya. Selain itu, untuk membantu kinerja BKM dalam pengelolaan keuangan dan dana BLM (Bantuan Langsung kepada Masyarakat) dari PNPM, BKM membentuk UPK (Unit Pengelola Keuangan), sebagai unit kerja dan bertanggung jawab langsung kepadanya.

UPK mempunyai tugas memegang rekening BKM, yang setiap saat dapat mengajukan pencairan dana Bantuan Langsung Masyarakat ke Bank yang ditunjuk PNPM. Ini bukti pemerintah tidak pegang dana bantuan atau uang rakyat. Rekening BLM tidak masuk rekening pemerintah, tetapi masuk rekening masyarakat (rekening bersama) via BKM. Masyarakat dipersilahkan

mengembangkan sendiri dana yang diterima sesuai aturan. Di sinilah wujud upaya PNPM memproses kemandirian masyarakat.

C. Gambaran umum pelaksanaan PNPM di Kelurahan Polowijen

PNPM pada Kelurahan Polowijen dimulai pada tahun 2007. Dengan adanya PNPM ini, Kelurahan Polowijen telah dapat membantu mengatasi masalah lingkungan, karena Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM sebagian diprioritaskan untuk pemberdayaan lingkungan sesuai hasil pemetaan dari Faskel dan kader masyarakat Kelurahan Polowijen, hal tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan swadaya masyarakat.

Namun demikian tidak semua masalah lingkungan dapat diatasi karena beberapa faktor. Dan pada tahun 2002, setelah masyarakat berhasil membentuk lembaga baru yaitu LPMK sebagai pengganti dari LKMD, maka mitra kelembagaan untuk mengatasi permasalahan lingkungan semakin intensif dan berhasil meningkatkan jumlah penyelesaian masalah lingkungan.

Adanya program PNPM tidak hanya untuk mengatasi masalah lingkungan melainkan juga untuk dapat menguatkan dan membantu perekonomian masyarakat miskin. Namun pada Kelurahan Polowijen bantuan pinjaman dana bergulir yang diberikan untuk keluarga miskin belum dapat terealisasi karena *Repayment Rate* (RR) atau tingkat pengembalian pinjaman kurang dari 80%. Pada warga yang menginginkan dana PNPM untuk kegiatan lingkungan dan kegiatan sosial diwajibkan memenuhi kriteria yang sudah disediakan dalam formulir serta membuat proposal per satu KSM. Persyaratan khusus yang perlu disiapkan untuk mendaftar sebagai anggota KSM yaitu menunjukkan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Pengenal (KTP) sebagai warga asli Kelurahan Polowijen, dan keterangan tidak mampu dari RT dan RW. Dalam program PNPM menjangkau pula pada permasalahan sosial dan budaya yang ada di Kelurahan dengan upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, olahraga, dan lain sebagainya.

Dalam pelaksanaannya program PNPM disertai dengan kegiatan :

1. Pemantauan dan Monitoring
2. Survey dan
3. Studi kelayakan

D. Gambaran Umum Badan Keswadayaan Masyarakat Polowijen

BKM Polowijen Kelurahan Polowijen Kecamatan Belimbing didirikan pada tanggal 19 Agustus 2003. Adapun azas, prinsip, maksud, tujuan dan tugas dari BKM Kelurahan Polowijen yaitu:

1. Azas BKM Polowijen

Badan Keswadayaan Masyarakat Polowijen (BKM Polowijen) berazaskan Pancasila dan berdasar Undang-undang Dasar 1945 dan menjunjung tinggi nilai-nilai: dapat dipercaya, ikhlas/kerelawanan, kejujuran, keadilan, kesetaraan, dan kebersamaan dalam keragaman.

2. Prinsip BKM Polowijen

BKM Polowijen bekerja berdasarkan prinsip:

- 1) Demokrasi: Segala pengambilan keputusan yang berkenaan dengan kepentingan orang lain harus dilaksanakan secara musyawarah untuk mufakat, apabila tidak menemukan jalan keluar, maka pengambilan keputusan diambil secara *voting*.
- 2) Transparan: Usulan yang diajukan oleh KSM dan akan didanai oleh PNPM melalui lembaga BKM Polowijen termasuk pengelolaan keuangannya, harus dapat terbuka untuk masyarakat umum atau seluruh warga.
- 3) Akuntabilitas: Pengelolaan keuangan termasuk reputasi pengelolaannya harus dapat dipercaya, dapat dimonitor dan dievaluasi secara mudah dan langsung oleh seluruh warga. Secara pengeluaran harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun kemanfaatannya.
- 4) Partisipasi: Program harus dilaksanakan secara partisipatif, mengacu pada inisiatif dari bawah dan mampu membangkitkan peran aktif seluruh warga, baik yang kaya maupun yang miskin dengan cara membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).
- 5) Desentralisasi: Segala bentuk keputusan harus diambil oleh lembaga yang dekat dengan KSM.

3. Maksud BKM Polowijen

Maksud dari BKM Polowijen adalah:

- 1) Sebagai lembaga yang dipimpin secara kolektif-kolegial dari suatu organisasi masyarakat warga yang berbentuk paguyuban, yang fungsi utamanya sebagai dewan pengambilan keputusan, yang dilakukan melalui proses pengambilan keputusan secara partisipatif.
- 2) Sebagai sumber energi dan inspirasi untuk membangun prakarsa dan kemandirian warga, yang secara damai berupaya memenuhi kebutuhan atau kepentingan warga bersama, memecahkan persoalan bersama dan atau menyatakan kepedulian bersama utamanya dikaitkan dengan kemiskinan dengan tetap menghargai hak pihak lain untuk berbuat yang sama dan tetap mempertahankan kemerdekaannya (otonomi) terhadap berbagai dominasi pengaruh dari siapapun.
- 3) Sebagai organisasi masyarakat warga, Badan Keswadayaan Masyarakat Polowijen diharapkan benar-benar mampu memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat miskin, agar mereka benar-benar terlibat aktif dan intensif dalam proses pengambilan keputusan penting yang berkaitan dengan kemiskinan.
- 4) Sebagai organisasi kemasyarakatan, Badan Keswadayaan Masyarakat Polowijen merupakan wadah perjuangan dan wadah aspirasi bagi warga kelurahan, khususnya dalam kaitannya dengan penanggulangan kemiskinan

4. Tujuan BKM Polowijen

Tujuan dari BKM Polowijen adalah:

- 1) Dalam jangka panjang, merupakan wadah untuk membangun modal sosial (*social-capital*) dengan menumbuhkan kembali nilai-nilai kemanusiaan, ikatan-ikatan sosial dan menggalang solidaritas sosial sesama warga agar bekerjasama demi kepentingan dan kebutuhan bersama, yang akhirnya akan memperkuat keswadayaan masyarakat.
- 2) Dalam jangka menengah BKM Polowijen merumuskan, menetapkan dan melaksanakan Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan (PJM-Pronangkis), yang berlaku selama tiga tahun sejak tanggal ditetapkan.

- 3) Dalam jangka pendek, BKM Polowijen membuat perencanaan operasional dan pelaksanaan tahunan tentang kegiatan pemberdayaan masyarakat atau penanggulangan kemiskinan yang bersumber dari PJM-Pronangkis yang telah ditetapkan.

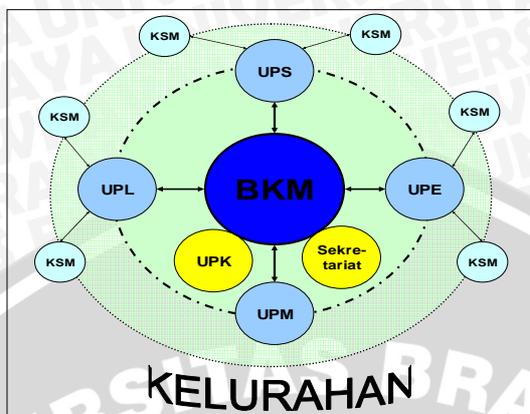
5. Tugas BKM Polowijen

Tugas BKM Polowijen adalah melakukan kegiatan-kegiatan pelaksanaan PNPM yang meliputi :

- (1) Merumuskan secara partisipatif Perencanaan Jangka Menengah (3tahun) Program Penanggulangan Kemiskinan (PJM-Pronangkis) di Kelurahan Polowijen.
- (2) Pengurus BKM Polowijen membuat rencana program tahunan yang didasarkan pada Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan (PJM-Pronangkis) yang telah ditetapkan.
- (3) Mampu bertindak sebagai forum pengambil keputusan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan.
- (4) Menumbuh kembangkan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin agar mampu meningkatkan kesejahteraannya.
- (5) Mangawasi proses pemanfaatan Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang sehari-harinya dikelola oleh Unit Pengelola Keuangan (UPK)
- (6) Menetapkan keputusan dari seleksi berbagai usulan yang telah dilakukan oleh Unit Pengelola Keuangan (UPK) dan Unit Pengelola (UP) lainnya yang berawal dari usulan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau dari kelompok masyarakat lainnya
- (7) Membangun transparansi melalui berbagai media diantaranya papan pengumuman, sirkulasi laporan kegiatan dan keuangan bulanan, laporan triwulanan, melakukan rapat secara terbuka dan melakukan audit keuangan BKM Polowijen.
- (8) Merumuskan, menyusun dan menetapkan aturan main (termasuk sangsi) dalam upaya pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya masyarakat yang dimulai dari dana PNPM.

6. Struktur kepengurusan BKM

**DIAGRAM
PERANGKAT ORGANISASI
BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT**



Sumber : BKM Polowijen

Keterangan: BKM: Badan Keswadayaan Masyarakat

UPS: Unit Pengelola Kegiatan Sosial

UPE: Unit Pengelola Ekonomi

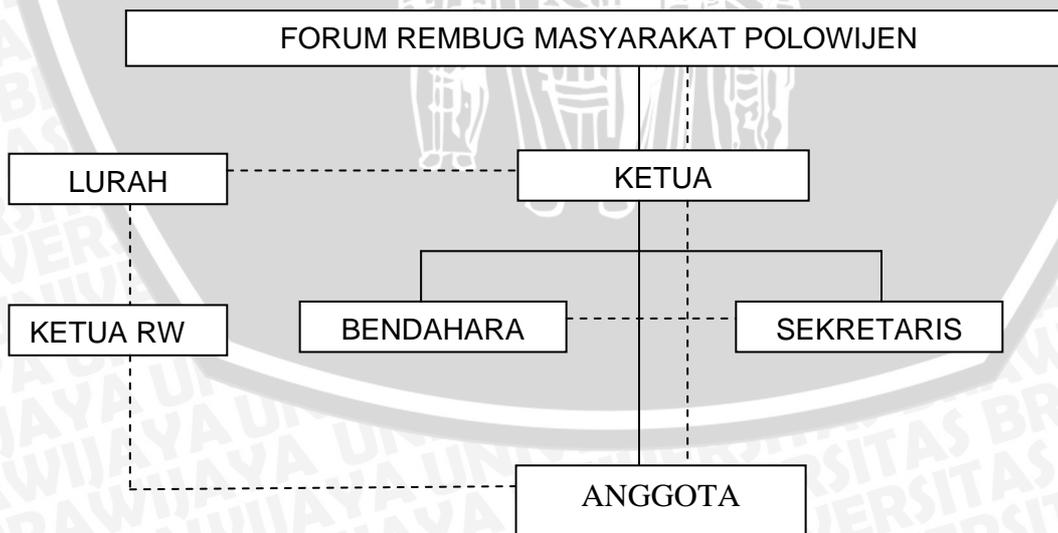
UPL: Unit Pengelola Lingkungan

UPM: Unit Pengelola Masyarakat

UPK: Unit Pengelola Keuangan

KSM: Kelompok Swadaya Masyarakat

**STRUKTUR ORGANISASI BKM
KELURAHAN POLOWIJEN**



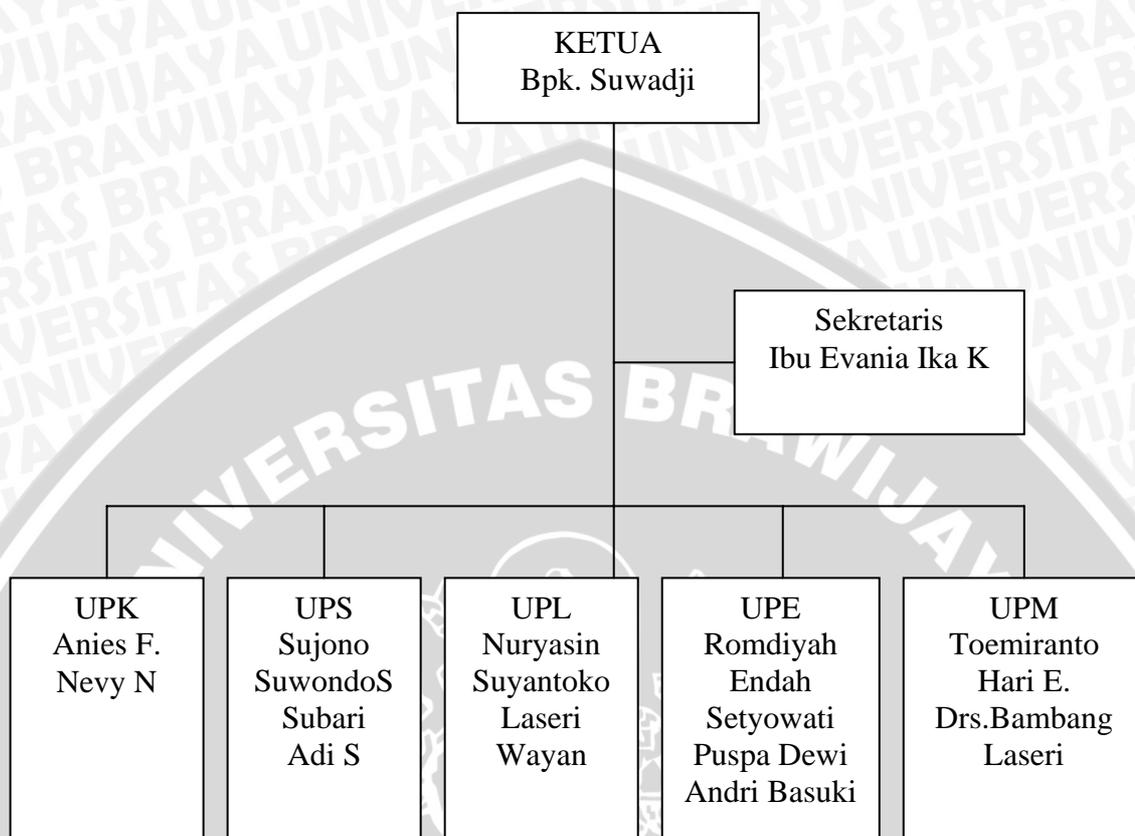
Keterangan : ————— Garis Instruksi

----- Garis Koordinatif

Sumber: BKM Polowijen

STRUKTUR PANITIA PNPM P2KP TAHUN 2007

KELURAHAN POLOWIJEN



Sumber: BKM Polowijen

Keterangan:

UPK: Unit Pengelola Keuangan

UPS: Unit Pengelola Sosial

UPL: Unit Pengelola Lingkungan

UPE: Unit Pengelola Ekonomi

UPM: Unit Pengelola Masyarakat

7. Pemilihan Keanggotaan pengurus BKM Polowijen.

- 1) Sesuai dengan AD/ART tentang pemilihan Keanggotaan Pengurus BKM dilaksanakan melalui pemungutan suara (*voting*) tertutup.
- 2) Ketentuan pemungutan suara (*voting*) tertutup adalah :
 - a. Demi kelancarannya, maka sidang memilih formatur untuk memilih calon Ketua BKM Polowijen.
 - b. Anggota Formatur berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri dari :

- b.1. 4 orang perwakilan RW
 - b.2. 1 orang perwakilan tokoh masyarakat
 - b.3. 1 orang perwakilan tokoh Agama.
 - b.4. 1 orang perwakilan PKK.
 - c. Calon Ketua BKM ditetapkan dan disahkan oleh Pemimpin Sidang Pemilihan Ketua BKM dilakukan dengan *voting* tertutup oleh seluruh Peserta Tetap MUSGA.
 - d. Pengurus BKM lengkap disusun bersama-sama Ketua BKM terpilih dan Formatur.
2. Susunan Pengurus BKM lengkap disahkan oleh Pemimpin Sidang. Pembagian peran dan wewenang pengurus BKM Polowijen
- 1) Koordinator
 - a) Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan BKM Polowijen,
 - b) Mewakili kegiatan BKM Polowijen untuk kegiatan – kegiatan keluar Kelurahan Polowijen,
 - c) Memimpin rapat lengkap BKM Polowijen,
 - d) Bertanggungjawab pada personalia pengurus dan anggota BKM Polowijen.
 - e) Sendiri dan atau bersama sekretaris BKM Polowijen, menandatangani surat-surat dan atau surat perjanjian,
 - f) Bertanggung jawab pada pola pengawasan intern organisasi.
 - 2) Sekretaris
 - a) Menyelesaikan tugas - tugas kesekretariatan
 - b) Melakukan pencatatan (notulen) setiap melaksanakan rapat BKM Polowijen.
 - c) Melakukan dokumentasi kegiatan.
 - d) Memimpin rapat lengkap BKM Polowijen apabila koordinator berhalangan hadir.
 - 3) Bendahara
 - a) Menyusun kebutuhan anggaran operasional BKM dan UPK untuk dibahas dalam rapat lengkap pengurus BKM Polowijen.
 - b) Mengelola penerimaan dan penggunaan biaya-biaya:

- b.1. Biaya Operasional Kegiatan (BOP) BKM Polowijen.
- b.2. Dana Hibah Fisik dan Sosial
- b.3. Dana Pemupukan Modal
- 4) Manager UPK
 - a) Mencatat secara tertib dan lengkap penyaluran dan pencairan dana kepada KSM.
 - b) Mengelola dana bergulir BKM Polowijen pada penerima manfaat, baik KSM perguliran maupun Dana Bergulir lainnya.
 - c) Membuat laporan keuangan BKM secara rutin setiap bulan sekali.
 - d) Membuat laporan akhir keuangan BKM Polowijen sesuai dengan prinsip akuntansi.
- 5) Kasir UPK
 - a) Membantu tugas - tugas manager UPK
 - b) Mewakili manager UPK dalam rapat lengkap anggota BKM Polowijen apabila manager UPK berhalangan hadir.
 - c) Menerima angsuran pinjaman dari KSM.
 - d) Membuat jurnal harian , mingguan dan bulanan.
 - e) Melakukan penyetoran dana ke rekening perguliran.
 - f) Menyiapkan bahan laporan keuangan UPK perguliran
 - g) Melaporkan sirkulasi keuangan UPK kepada manager UPK dan pengurus BKM Polowijen secara rutin setiap akhir bulan.
 - h) Mengisi buku – buku Bantu
 - i) Mencatat setiap transaksi ke dalam bukti transaksi dan buku Bantu
 - j) Membantu mempersiapkan laporan keuangan UPK dan BKM Polowijen secara rutin.
- 6) Administrasi KSM (UPS – UPL)
 - a) Mencatat dan melakukan rekap dengan tertib proposal yang masuk.
 - b) Melakukan evaluasi terhadap kelengkapan administrasi proposal yang masuk.
 - c) Mengagendakan dan mengkoordinasikan kegiatan survey ke lokasi KSM / pengusul.

- d) Melakukan rekap terhadap hasil survey dan membuat draft daftar proposal yang layak.
 - e) Menerima angsuran dari KSM dan membukukan pada buku bantu angsuran.
 - f) Membantu Kasir dan Manager UPK pada proses perguliran dana pada KSM perguliran dan Dana Bergulir lainnya
 - g) Mencatat dan memelihara administrasi KSM dan proses dana bergulir lainnya
- 7) Juru Tagih
- a) Menerima semua proposal yang masuk dari KSM,
 - b) Mengoreksi kelengkapan proposal yang masuk, sesuai dengan ketentuan proposal dari BKM,
 - c) Melakukan survei awal proposal KSM/Kredit mikro,
 - d) Memfasilitasi proses pelunasan tunggakan kredit di masing-masing KSM,
 - e) Mengirim surat tagihan sebelum tanggal 10 setiap bulan, untuk mengingatkan KSM,
 - f) Mendatangi KSM yang terlambat mengangsur, yang dibuktikan dengan buku ekspedisi (sebagai laporan kegiatan penagihan).

B. Penyajian Data Fokus

1. Proses pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan program nasional pemberdayaan masyarakat

Menurut Royat dalam Panduan Umum PNPM (2007,16) mengungkapkan bahwa dalam memberdayakan masyarakat mandiri tidak dapat diwujudkan secara instant, melainkan melalui serangkaian kegiatan pemberdayaan masyarakat yang direncanakan, dilaksanakan, dan dimanfaatkan oleh masyarakat sendiri. Melalui kegiatan yang dilakukan dari, untuk, dan oleh masyarakat, diharapkan upaya penanggulangan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif. Untuk harmonisasi dan

sinergi pelaksanaan berbagai program pemberdayaan, diperlukan adanya komponen program yang termasuk ke dalam perencanaan program nasional pemberdayaan masyarakat, yaitu:

1) Pengembangan Masyarakat

Komponen pengembangan masyarakat mencakup serangkaian kegiatan untuk membangun kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat yang terdiri dari pemetaan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat, perencanaan partisipatif, pengorganisasian, pemanfaatan sumberdaya, pemantauan, dan pemeliharaan hasil-hasil yang telah dicapai. Untuk mendukung rangkaian kegiatan tersebut, disediakan dana pendukung kegiatan pembelajaran masyarakat, pengembangan relawan, dan operasional pendampingan masyarakat; dan fasilitator, pengembangan kapasitas, mediasi dan advokasi. Peran fasilitator terutama pada saat awal pemberdayaan, sedangkan relawan masyarakat adalah yang utama sebagai motor penggerak masyarakat di wilayahnya.

2) Bantuan Langsung Masyarakat

Komponen Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah dana stimulan keswadayaan yang diberikan kepada kelompok masyarakat untuk membiayai sebagian kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, terutama masyarakat miskin.

3) Peningkatan Kapasitas Pemerintahan dan Pelaku Lokal

Komponen peningkatan kapasitas pemerintahan dan pelaku lokal adalah serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan pelaku lokal/kelompok peduli lainnya agar mampu menciptakan kondisi yang kondusif dan sinergi yang positif bagi masyarakat terutama kelompok miskin dalam menyelenggarakan hidupnya secara layak. Kegiatan terkait dalam komponen ini antara lain seminar, pelatihan, lokakarya, kunjungan lapangan yang dilakukan secara selektif, dan sebagainya.

4) Bantuan Pengelolaan dan Pengembangan Program

Komponen bantuan pengelolaan dan pengembangan program meliputi kegiatan-kegiatan untuk mendukung pemerintah dan berbagai kelompok peduli lainnya dalam pengelolaan kegiatan seperti penyediaan konsultan manajemen, pengendalian mutu, evaluasi, dan pengembangan program.

b. Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Polowijen adalah sebagai berikut:

1) Pengembangan masyarakat

1.a. Pengembangan Masyarakat Kelurahan Polowijen

Berdasarkan komponen program yang ada pada PNPM, kegiatan pengembangan masyarakat merupakan upaya awal dari PNPM untuk memberdayakan masyarakat. Pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh BKM Polowijen dapat dilihat dari pelatihan-pelatihan yang telah dilaksanakan oleh BKM Polowijen seperti yang diungkapkan oleh Ketua BKM Bapak Suwadji. Jenis-jenis pelatihan tersebut antara lain:

1. Pelatihan menjahit
 2. Pelatihan kerajinan tangan
 3. Pelatihan Usaha Industri Kecil atau Industri Rumah Tangga
 4. Seminar untuk masyarakat tentang “Peduli Lingkungan”
- (Sumber: Wawancara, Kamis, 19 Juni 2008, pukul 09.00 WIB)

Namun pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh BKM tidak semuanya diterapkan oleh masyarakat dalam kesehariannya seperti yang diungkapkan oleh ketua BKM Polowijen menanggapi pertanyaan peneliti mengenai “Apakah pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh BKM dapat bermanfaat bagi masyarakat yang berada di Kelurahan Polowijen?”

“Terkadang pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh BKM Polowijen tidak terlalu mendapat respon dari masyarakat karena masyarakat belum mengetahui manfaat dari pelatihan tersebut. Selain itu kesadaran masyarakat untuk ikut pelatihan juga sangat rendah karena kesibukan dari masyarakat tersebut. Pelatihan-pelatihan yang kami adakan tentu saja sangat bermanfaat untuk masyarakat. Jika saja masyarakat tahu akan manfaat dari pelatihan yang kami adakan, saya yakin pasti masyarakat akan ikut dalam pelatihan yang kami lakukan.” (Sumber: Wawancara, Kamis, 19 Juni 2008, pukul 10.00 WIB).

Untuk pertanyaan yang sama mengenai “Apakah pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh BKM Polowijen bermanfaat bagi masyarakat Kelurahan Polowijen?” Ibu Evi sebagai sekretaris BKM Polowijen menanggapi:

“Sebenarnya pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh BKM sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat Polowijen, namun masyarakat Kelurahan Polowijen kurang menyadari akan hal itu. Oleh karena itu BKM selaku pelaksana pelatihan harus bisa memberikan gambaran tentang manfaat dari pelatihan-pelatihan yang

diadakan oleh BKM.” (Sumber: Wawancara, Kamis, 19 Juni 2008, pukul 10.30 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa tingkat partisipasi masyarakat untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan BKM kurang mendapat respon. Hal ini disebabkan karena masyarakat kurang mengetahui akan manfaat yang didapatkan dari pelatihan tersebut. Dalam hal ini BKM harus dapat mensosialisasikan setiap pelatihan yang akan diselenggarakan, karena dengan mensosialisasikan masyarakat dapat mengetahui manfaat dari pelatihan tersebut. Selain itu, BKM juga harus bisa mengatur waktu setiap pelatihan agar tidak bentrok dengan kesibukan warga.

Melihat kondisi dilapangan, peneliti juga memiliki kesimpulan bahwa pelaksanaan pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh BKM Polowijen memang kurang mengena di masyarakat. Masyarakat kurang memahami tujuan dan manfaat dari pelatihan tersebut. Dalam hal ini BKM Polowijen harus bisa menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh BKM Polowijen. Hal tersebut merupakan pekerjaan rumah yang harus dikerjakan oleh semua anggota BKM dan aparat Kelurahan Polowijen demi tercapainya tujuan dari PNPM.

1.b. Pengakuan dan Dukungan Masyarakat Polowijen

Pengakuan dan dukungan dari masyarakat dapat dilihat dari keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh BKM. Adapun pertanyaan peneliti terkait dengan bentuk pengakuan dan dukungan masyarakat terhadap kegiatan BKM “Bagaimana keikutsertaan warga Kelurahan Polowijen dalam kegiatan yang dilakukan oleh BKM?”

Menanggapi pertanyaan peneliti, ketua BKM Polowijen Bapak Suwadji mengungkapkan:

“Partisipasi masyarakat Kelurahan Polowijen terhadap kegiatan PNPM yang dilakukan BKM Polowijen cukup besar. Hal ini dapat dilihat dari jumlah KSM di Kelurahan Polowijen yang saat ini sudah mencapai 102 KSM dengan rincian KSM ekonomi 97 KSM (untuk program P2KP), KSM infrastruktur 4 KSM (untuk PNPM), KSM Sosial 1 KSM (untuk PNPM). Dukungan masyarakat terhadap program PNPM yang dilakukan oleh BKM juga dapat dilihat dari keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan Kelurahan

Polowijen yang diadakan oleh BKM Polowijen. (Sumber: Wawancara, Kamis, 19 Juni 2008, pukul 10.00 WIB).

Menanggapi pertanyaan peneliti mengenai partisipasi masyarakat, Ibu Evi mengungkapkan:

“Partisipasi masyarakat Polowijen dalam mengikuti program PNPM cukup baik. Partisipasi masyarakat disini diwujudkan dengan adanya keikutsertaan warga dalam rapat yang diselenggarakan oleh BKM Kelurahan setempat, keinginan masyarakat untuk tetap mengikuti program PNPM, dan keaktifan masyarakat dalam mengikuti program PNPM. Hal ini memang berbeda dengan partisipasi masyarakat pada pelatihan yang diadakan oleh BKM karena masyarakat lebih cenderung ikut kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung seperti pembangunan lingkungan secara fisik.” (Sumber: Wawancara, Kamis, 19 Juni 2008, pukul 10.30 WIB).

Bapak Syamsul Arif selaku Kepala Kelurahan Polowijen juga memberikan komentar mengenai pertanyaan peneliti tentang seberapa besar tingkat partisipasi dan dukungan warga pada program PNPM.

“menurut saya, dukungan masyarakat yang ada di Kelurahan Polowijen terhadap pelaksanaan PNPM sudah cukup tinggi. Mas bisa tanyakan langsung kepada BKM Polowijen yang melaksanakan PNPM ini. Namun, hal itu semua juga didasarkan pada kesadaran masyarakat untuk dapat hidup lebih layak dan bisa hidup enak”. (Sumber: Wawancara, Kamis 22 Agustus 2008, pukul 11.00 WIB).

Keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan Kelurahan Polowijen dapat dilihat dari foto di bawah yang menandakan kepedulian masyarakat akan pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan Kelurahan Polowijen yang diadakan oleh BKM dengan bekerjasama dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan lain di lingkungan Kelurahan Polowijen seperti lembaga: LPMK, RT, RW, PKK, Pengajian dan lain sebagainya, dimana masyarakat ikut membantu pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana yang ada di lingkungannya.



Keterangan: Rapat sosialisasi PNPM di Kelurahan Polowijen



Keterangan: Warga ikut berpartisipasi pada pembangunan Posyandu RW 04

2) Bantuan Langsung Masyarakat

Pada tahun 2008 Program Nasional Pemberdayaan Nasional menyiapkan dana sebesar Rp. 13 Triliun sebagai penguatan pelaksanaan yang akan selanjutnya disalurkan ke desa-desa dan pelaksanaannya dibawah tim koordinasi penanggulangan kemiskinan. (Royat, 2007).

Pelaksanaan PNPM di Kelurahan Polowijen dalam bentuk bantuan langsung masyarakat belum berjalan dengan baik karena dana yang dikucurkan Pemerintah Pusat ke Kelurahan Polowijen bisa dibilang masih minim. Dana yang dikucurkan oleh Pemerintahan pusat untuk Kelurahan Polowijen sebesar Rp. 200 juta. BKM Polowijen tidak menggunakan semua dana tersebut untuk bantuan langsung masyarakat karena kegiatan BKM Polowijen tidak berfokus pada satu bidang saja. Adapun pertanyaan peneliti terkait masalah kegiatan BKM “Kegiatan apa saja yang dilakukan oleh BKM?”

Menanggapi pertanyaan peneliti, Ibu Evi mengungkapkan:

“Kegiatan yang dilakukan oleh BKM Polowijen ada tiga, yang pertama, kegiatan ekonomi bergulir, kedua, kegiatan pembangunan lingkungan, dan yang ketiga, kegiatan sosial. Namun dari ketiga kegiatan tersebut, kegiatan ekonomi bergulir belum dapat dilaksanakam karena memang dari seluruh BKM yang ada di Kota Malang belum dapat melakukan kegiatan tersebut karena *Repayment Rate* atau tingkat pengembalian pinjaman kurang dari 80% sehingga BKM hanya melakukan kegiatan pembangunan lingkungan dan kegiatan sosial”(Sumber: Wawancara, Kamis, 19 Juni 2008, pukul 10.30 WIB).

Adapun pertanyaan peneliti mengenai pembagian dana untuk kegiatan PNPM "Digunakan untuk apa saja dana yang telah didapatkan oleh BKM?" menanggapi pertanyaan tersebut Bapak Suwadji mengungkapkan:

"dari Rp 200 juta dana yang didapatkan oleh BKM Polowijen, pencairan dari dana tersebut terbagi menjadi dua periode atau termin. Untuk termin pertama sebesar 40% dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan lingkungan minimal 80%, kegiatan sosial maksimal 20% dan kegiatan ekonomi bergulir 0% (RR kurang dari 80%). Sedangkan termin kedua sebesar 60% dialokasikan untuk kegiatan lingkungan minimal 70%, kegiatan sosial maksimal 20%, dan kegiatan ekonomi bergulir 10% (jika RR telah mencapai kurang dari 90%)". (Sumber: Wawancara, Kamis, 19 Juni 2008, pukul 10.00 WIB).



Keterangan: Pembuatan jalan dan gorong-gorong merupakan kegiatan PNPM pada sektor pembangunan sarana lingkungan.

Bapak Syamsul Arif selaku Kepala Kelurahan Polowijen juga memberikan komentar menanggapi pertanyaan peneliti tentang berapa dana yang didapat oleh Kelurahan Polowijen untuk PNPM? Bapak Syamsul Arif mengungkapkan:

"dana yang didapat oleh Kelurahan Polowijen sebesar Rp. 200 juta, dana tersebut terbagi menjadi tiga sektor, yang pertama untuk pengembangan masyarakat, kedua untuk pembangunan sarana lingkungan, dan yang ketiga untuk sector ekonomi. Dengan dana hanya Rp. 200 juta, BKM Polowijen baru bisa melakukan kegiatan PNPM pada sektor pengembangan masyarakat dan sektor pembangunan sarana lingkungan. Jika dana yang di dapat dari Pemerintah Pusat cukup besar, mungkin kegiatan PNPM pada sektor ekonomi bisa dilakukan juga. (Sumber: Wawancara, Kamis, 22 Agustus 2008, pukul 11.00 WIB).

Berdasarkan kondisi dilapangan, dana yang didapat oleh Kelurahan Polowijen memang bisa dibilang masih minim. Peneliti mengambil kesimpulan seperti ini karena peneliti mengetahui bahwa Kelurahan Lawang Kabupaten Malang

mendapat dana dari Pemerintah Pusat sebesar Rp. 340 juta. Adanya perbedaan dana yang berbeda di masing-masing daerah membuat terhambatnya kegiatan-kegiatan yang ada pada PNPM. Oleh karena itu perlu adanya pemerataan dan memaksimalkan dana PNPM sehingga masing-masing daerah dapat melakukan semua kegiatan yang ada pada PNPM.

3) Peningkatan Kapasitas Pemerintahan dan Pelaku Lokal

Upaya dalam meningkatkan kapasitas pemerintahan dan pelaku lokal sangat diperlukan. Oleh karena itu BKM perlu dukungan dan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain ataupun dengan kelompok masyarakat, oleh karenanya peneliti menanyakan “Apakah BKM Polowijen ini melakukan kerjasama dengan lembaga lain dalam melaksanakan program-program PNPM?”

Menanggapi pertanyaan peneliti, Bapak Suwadji selaku ketua BKM Polowijen mengungkapkan:

“BKM Polowijen ini melakukan kerjasama baik secara internal kelurahan maupun eksternal. kerjasama internal BKM Polowijen dilakukan dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang berada di Kelurahan Polowijen misalnya seperti: Karang Taruna, PKK, LPMK, LPM, RT, RW dan Kelurahan Polowijen sendiri. Bentuk kerjasama ini berupa kerjasama dalam upaya mengembangkan masyarakat, mengeluarkan masyarakat yang masih berada dalam kantong-kantong kemiskinan, melakukan pembangunan atau perbaikan fasilitas umum yang dapat mendukung gerak majunya perekonomian/pendapatan warga dalam meningkatkan kehidupan yang layak untuk warga miskin. Kerjasama eksternal yang dilakukan BKM Polowijen ini adalah dengan bekerjasama dengan BKM yang lainnya”. (Sumber: Wawancara, Jum’at 27 Juni 2008, pukul 09.00 WIB).

Bapak Syamsul Arif juga mengungkapkan menanggapi pertanyaan peneliti mengenai kerjasama yang dilakukan BKM dengan lembaga lain dalam melakukan PNPM. Bapak Syamsul Arif mengatakan:

“untuk kerjasama yang dilakukan oleh BKM Polowijen dalam melaksanakan PNPM ini bisa dibilang sudah cukup banyak melakukan kerjasama. Hal ini memang sangat penting bagi BKM untuk melakukan semua kegiatan PNPM. Dengan adanya bantuan dari lembaga dan ormas lain, diharapkan BKM dapat lebih maksimal dalam melaksanakan PNPM. Mas juga kan tau, setiap pekerjaan itu lebih mudah kalo kita mengerjakannya rame-rame”. (Sumber: Wawancara, Kamis, 22 Agustus 2008, pukul 11.00 WIB).

Kerjasama BKM dengan Kelurahan Polowijen, LPMK, PKK, RT, RW, dan masyarakat setempat yang telah dilaksanakan seperti dalam kegiatan-kegiatan

pembangunan di Kelurahan Polowijen yang telah dilaksanakan pada tahun 2007. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Syamsul selaku Kepala Kelurahan, kerjasama dalam kegiatan pembangunan tersebut seperti:

1. Pembangunan gorong-gorong RW. I, II, III, IV, V.
 2. Pembangunan jalan
 3. Pengadaan air bersih
 4. Pembangunan sarana posyandu
 5. Pembangunan MCK
 6. Pengadaan sound system untuk masing-masing Posyandu di tingkat RW
 7. Pembangunan gardu hansip
 8. Perbaikan & pengerukan drainase
 9. Pengadaan tempat sampah dan gerobak sampah
- (Sumber : Wawancara, Kamis, 22 Agustus 2008, pukul 11.00 WIB).

Peneliti melihat bahwa kerjasama yang dilakukan BKM untuk pelaksanaan PNPM memang sudah dilaksanakan. Pada waktu peneliti mengadakan wawancara dengan ketua BKM, ketua BKM baru saja pulang dari kelurahan dalam rangka mengundang aparat kelurahan untuk ikut berpartisipasi pada kegiatan pembangunan Posyandu RW 04 Kelurahan Polowijen. Hal ini membuktikan bahwa BKM telah melakukan kerjasama dengan pihak yang terkait dengan pelaksanaan PNPM di Kelurahan Polowijen.

4) Bantuan pengelolaan dan pengembangan program

Dalam pelaksanaan PNPM di Kelurahan Polowijen, BKM harus bisa melaksanakan poin yang ke empat ini. Bantuan pengelolaan dan pengembangan harus dijalankan oleh BKM karena setiap komponen program yang ada pada PNPM harus dikelola dan dikembangkan agar dapat lebih mengenai sasaran. Seperti yang diungkapkan oleh ketua BKM Bapak Suwadji, dalam kutipan wawancara yang dilakukan peneliti mengenai “bagaimana pelaksanaan bantuan pengelolaan dan pengembangan program yang dilakukan oleh BKM Polowijen?”

Menanggapi pertanyaan peneliti, Bapak Suwadji mengatakan:

“untuk bantuan pengelolaan dan pengembangan program di Kelurahan Polowijen ini belum berjalan dengan baik. Hal ini karena BKM Polowijen masih fokus kepada program pengembangan masyarakat dan pembangunan sarana lingkungan. Selain itu, kesibukan dari anggota BKM juga menjadi salah satu penyebab belum berjalannya bantuan pengelolaan dan pengembangan program”. (Sumber: Wawancara, Jum’at 27 Juni 2008, pukul 09.00 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas, pelaksanaan PNPM pada sektor bantuan pengelolaan dan pengembangan program belum berjalan dengan baik. Perlu adanya kesadaran dari anggota BKM pada sektor ini karena bantuan pengelolaan dan pengembangan program sangat penting bagi pelaksanaan PNPM. Komponen kegiatan dari bantuan pengelolaan dan pengembangan program merupakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pemerintah dan kelompok peduli lainnya dalam pengelolaan kegiatan seperti penyediaan konsultan manajemen, pengendalian mutu, dan pengembangan program.

Dalam hal ini peneliti juga tidak menemukan adanya bantuan pengelolaan dan pengembangan program dari BKM, kelurahan, maupun lembaga lain. Peneliti melihat bahwa BKM hanya berfokus pada masalah pengembangan program dan pembangunan sarana lingkungan. BKM belum mengembangkan program yang ada pada PNPM. Oleh karena itu, perlu adanya loyalitas dan kemauan dari masing-masing pihak yang ikut dalam pelaksanaan PNPM di Kelurahan Polowijen.

c. Pengawasan program nasional pemberdayaan masyarakat

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen dalam rangka menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta untuk menjamin bahwa tujuan dapat tercapai secara hemat dan efisien. Pengawasan harus merupakan bagian yang paralel dengan upaya organisasi dalam mencapai tujuannya, sehingga pengawasan secara efektif dapat memberikan kontribusi nyata terhadap terselenggaranya manajemen yang baik. Pengawasan juga kegiatan untuk menjamin atau menjaga agar rencana dapat diwujudkan dengan efektif. Masing-masing organisasi mempunyai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk menjaga agar organisasi itu dapat mencapai tujuannya mutlak diperlukan pengawasan. Pengawasan berfungsi menjaga agar seluruh kegiatan berjalan dengan benar.

Setelah program kerja dibuat dan dilaksanakan bersama-sama pemerintah kelurahan tentunya BKM tidak serta merta lepas tangan. Dalam hal ini BKM harus melakukan tahap selanjutnya yaitu pengawasan terhadap program kerja tersebut. Kegiatan seperti pengembangan masyarakat, bantuan langsung

masyarakat, peningkatan kapasitas pemerintahan dan pelaku lokal, dan bantuan pengelolaan dan pengembangan program perlu adanya pengontrolan. Hal ini bertujuan agar setiap program yang dijalankan dapat berjalan dengan baik dan transparan.

Mengenai perihal tentang pengawasan terhadap PNPM yang telah dijalankan ini diungkapkan oleh Bapak Syamsul Arif selaku kepala Kelurahan Polowijen dalam wawancara berikut ini:

“Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, untuk masalah pelaksanaan PNPM ini semuanya diawasi langsung oleh BKM, KSM, Ketua RT dan RW masing-masing wilayah dan tentu saja dari pihak kelurahan sendiri. Pengawasan dilakukan mulai dari awal masuknya PNPM sampai terlaksananya program-program tersebut”. (Sumber: Wawancara, Kamis, 22 Agustus 2008 pukul 11.00 WIB).

Hal senada juga diakui Ibu Evi selaku sekretaris BKM Kelurahan Polowijen, melalui wawancara berikut ini:

“Semua program PNPM yang dijalankan di Kelurahan Polowijen diawasi oleh BKM, KSM, Ketua RT-RW masing-masing wilayah dan pemerintah Kelurahan kemudian dikoordinasikan kepada kecamatan dan pengawasan ini harus benar-benar cermat agar pelaksanaan PNPM dapat berjalan dengan baik”.(Sumber: Wawancara, Kamis, 26 Juni 2008 pukul 10.00 WIB).

Jadi dari pendapat kepala Kelurahan dan sekretaris BKM tersebut, jelas terlihat bahwa semua program-program yang telah dibuat dan dijalankan semuanya diawasi langsung oleh BKM, KSM, Ketua RT-RW, serta pemerintah Kelurahan itu sendiri. Dengan kata lain pengawasan merupakan sarana yang tepat agar program-program kerja dapat terlaksana dengan baik. Dengan pengawasan dapat memberikan kontribusi untuk menciptakan *good governance* ditingkat Kelurahan.

Peneliti juga melihat bahwa pengawasan yang dilakukan pada pelaksanaan PNPM di Kelurahan Polowijen dilakukan oleh seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan PNPM. Pengawasan merupakan kegiatan yang sangat penting untuk menjaga agar kegiatan dari PNPM dapat berjalan sesuai rencana. Seperti yang telah diamati oleh peneliti, kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BKM Polowijen memang telah sesuai dengan komponen program dari PNPM. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan telah berjalan dengan baik

sehingga komponen program PNPM dapat terlaksana walaupun masih ada sedikit kegiatan yang belum berjalan.

d. Evaluasi program nasional pemberdayaan masyarakat

Setelah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PNPM, perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan PNPM di Kelurahan Polowijen. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui sampai sejauh mana kegiatan yang telah dilakukan oleh BKM dalam melaksanakan PNPM. Dengan adanya evaluasi dapat mengetahui kekurangan-kekurangan yang ada dalam pelaksanaan PNPM dan dengan mengetahui kekurangan tersebut dapat melakukan perbaikan sehingga kegiatan-kegiatan PNPM dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

Terkait dengan evaluasi yang dilakukan oleh BKM Polowijen dalam melaksanakan PNPM, peneliti menanyakan “siapa yang melakukan evaluasi dan berapa kali evaluasi tersebut dilakukakan?”

Menanggapi pertanyaan peneliti, Bapak Suwadji mengungkapkan:

“untuk mengevaluasi kegiatan PNPM, kami melakukannya secara bersama-sama baik dari BKM maupun aparat pemerintahan Kelurahan Polowijen dan kami melakukan evaluasi setiap enam bulan sekali dan itu dilakukan di BKM ini. Evaluasi ini kami lakukan untuk mengetahui apakah kegiatan-kegiatan PNPM telah sesuai dengan rencana atau belum, jika masih ada belum berjalan itu apa saja dan kami akan mencari faktor apa yang membuat kegiatan itu belum berjalan.”(Sumber: Wawancara, Kamis 26 Juni 2008 pukul 10.30 WIB).

Menanggapi pertanyaan yang sama, Bapak Syamsul Arif mengungkapkan:

“setiap enam bulan sekali kami selaku aparat kelurahan dan BKM melakukan evaluasi. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui segala kegiatan yang sudah maupun yang belum dilaksanakan. Jika kita sudah mengetahui semuanya, kita bisa memprioritaskan kegiatan yang akan dilakukan selanjutnya. Evaluasi juga bertujuan untuk meningkatkan kinerja kita dalam melakukan PNPM. Dengan adanya evaluasi kita dapat kerja dengan semangat karena evaluasi yang dilakukan juga bertujuan untuk mengetahui kekurangan kita dalam melaksanakan PNPM”. (Sumber: Wawancara, Kamis 21 Agustus 2008 pukul 11.00 WIB).

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa pengevaluasian dilakukan oleh BKM dan pihak Kelurahan Polowijen yang dilakukan setiap enam bulan sekali. Pengevaluasian ini bertujuan untuk mengetahui sampai sejauh mana pelaksanaan PNPM telah berjalan dan dengan adanya evaluasi dimaksudkan agar PNPM dapat terlaksana dengan baik dan sesuai rencana. Peneliti juga melihat bahwa evaluasi

dilakukan secara terkoordinasi dan berkelanjutan. Hal ini dikatakan oleh peneliti karena peneliti melihat jadwal evaluasi yang sudah ada di BKM Polowijen.

2. Tingkat Efektivitas dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat.

Setiap program yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat mempunyai maksud dan tujuan. Menurut Royat dalam Pendum PNPM (2007,11) mengatakan dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, tujuan umumnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin secara mandiri. Sedangkan tujuan khususnya adalah meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil, dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.

Selain itu, meningkatnya keberdayaan dan kemandirian masyarakat, serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya dan juga meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, dan kelompok peduli lainnya, untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan. Untuk itu perlu adanya tolak ukur untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat keefektifan dari pelaksanaan PNPM di Kelurahan Polowijen. Dalam hal ini peneliti melihat tingkat efektivitas dari pelaksanaan PNPM ini mengacu kepada tujuan dari PNPM itu sendiri. Peneliti mengacu kepada tiga tujuan pokok dari enam tujuan PNPM, yaitu melalui:

a. Tingkat Keberdayaan dan Kemandirian Masyarakat

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat memiliki tujuan untuk memberdayakan dan memandirikan masyarakat sehingga masyarakat dapat keluar dari kemiskinan dan untuk mengetahui sejauh mana PNPM telah efektif untuk mengeluarkan masyarakat dari kemiskinan, peneliti menanyakan “sampai sejauh mana tingkat keberdayaan dan kemandirian masyarakat setelah berjalannya PNPM?”

Menanggapi pertanyaan tersebut, Bapak Syamsul Arif mengungkapkan:

“untuk tingkat keberdayaan dan kemandirian masyarakat bisa dibilang masyarakat Polowijen sudah cukup berdaya dan cukup mandiri. Hal ini

dikarenakan masyarakat sudah dapat mencari penghasilan untuk menghidupi keluarganya sendiri, namun masyarakat masih kurang mengerti akan potensi yang ada pada dirinya, kalau saja masyarakat banyak yang ikut pada pelatihan-pelatihan yang diadakan BKM bisa jadi masyarakat bisa lebih berdaya dan lebih mandiri lagi.” (Sumber: Wawancara, Selasa, 18 September 2008, Pukul 10.00 WIB).

Sedangkan Ibu Evi selaku sekretaris BKM Polowijen mengatakan:

“untuk masalah berdaya, masyarakat disini sudah cukup berdaya walaupun banyak masyarakat yang tidak ikut pelatihan yang kami adakan namun mereka mempunyai kemampuan untuk bisa mencari penghasilan disamping penghasilan tetap mereka dan untuk masalah mandiri, masyarakat disini bisa dibilang sudah cukup mandiri karena masyarakat disini banyak yang bekerja dan memiliki usaha kecil-kecilan dan sedikit yang menganggur sehingga mereka dapat menghidupi keluarganya.” (Sumber: Wawancara, Selasa, 18 September 2008, Pukul 09.00 WIB).

Peneliti juga melihat bahwa kondisi didaerah Kelurahan Polowijen memang sudah bisa dibilang cukup berdaya dan mandiri. Masyarakat ada yang membuat usaha wartel, warung sembako, warung makan, dan jenis usaha kecil lainnya. Hal ini menandakan bahwa tingkat keberdayaan dan kemandirian masyarakat sudah cukup tinggi. Selain itu, rumah-rumah yang ada di Kelurahan Polowijen sudah termasuk ke dalam rumah gedung. Walaupun masih ada sedikit rumah yang masih dibilang kurang bagus. Namun, perekonomian mereka sudah cukup baik.

Berdasarkan wawancara dan kondisi diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat kemandirian dan keberdayaan masyarakat Polowijen sudah cukup baik karena masyarakat telah mampu menghidupi keluarganya secara cukup dan telah BKM juga telah membangun sarana dan prasarana lingkungan sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan mudah. Dengan adanya kemudahan tersebut, masyarakat dapat melaksanakan aktivitasnya lebih giat lagi sehingga dapat meningkatkan taraf hidupnya. Selain itu, kemandirian masyarakat dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Tingkat kesejahteraan penduduk Kelurahan Polowijen dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 14.
Kesejahteraan Penduduk

No	URAIAN	Keterangan
1.	Keluarga Pra-sejahtera	158 KK
2.	Keluarga Sejahtera I	263 KK
3.	Keluarga Sejahtera II	157 KK
4.	Keluarga Sejahtera III	1.609 KK
5.	Keluarga Sejahtera III Plus	347 KK

Sumber: BKM Polowijen

Keluarga Pra-sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic need*) secara minimal seperti kebutuhan spiritual, pangan, sandang papan, dan kesehatan. Keluarga Sejahtera I adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya (*socio psychological needs*), seperti kebutuhan pendidikan, KB, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan tempat tinggal, dan transportasi. Keluarga Sejahtera II adalah keluarga yang disamping telah dapat memenuhi kebutuhan sosial-psikologisnya, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan pengembangannya (*developmental needs*) seperti kebutuhan untuk menabung dan memperoleh informasi. Keluarga Sejahtera III adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar, sosial-psikologis, dan pengembangan keluarganya, tetapi belum dapat memberikan sumbangan yang teratur bagi masyarakat, seperti sumbangan materi, dan berperan aktif dalam kegiatan masyarakat. Keluarga Sejahtera III Plus adalah keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, sosial psikologis, dan pengembangan serta telah dapat memberikan sumbangan yang teratur dan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah Kepala Keluarga yang paling besar ada pada Keluarga sejahtera III yang berjumlah 1.609 KK. Hal ini dapat memberikan gambaran secara umum bahwa tingkat kesejahteraan keluarga di Kelurahan Polowijen sudah cukup tinggi. Hal ini dikarenakan memang masyarakat Polowijen sudah cukup mandiri dan berdaya sebelum dilaksanakannya PNPM. Hal ini menandakan bahwa PNPM di Kelurahan Polowijen kurang tepat sasaran karena tujuan dari PNPM adalah memberdayakan

masyarakat sehingga masyarakat memiliki kemampuan untuk dapat hidup layak dan keluar dari kemiskinan. Namun pada kenyataannya, masyarakat Polowijen banyak yang tidak ikut pada pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh BKM Polowijen.

Tabel 15
Jumlah Penduduk Miskin

No	Tahun	Jumlah Keluarga Miskin	Jumlah (Jiwa)
1	2006	175 KK	732 jiwa
2	2007	158 KK	658 jiwa

Sumber: Monografi Kelurahan Polowijen

Berdasarkan data monografi Kelurahan Polowijen tahun 2007, jumlah masyarakat miskin Kelurahan Polowijen setelah dilaksanakannya PNPM pada Desember 2007 berjumlah 658 jiwa yang termasuk kedalam 158 KK. Hal ini tidak jauh berbeda dengan jumlah masyarakat miskin pada Desember 2006. Jumlah masyarakat miskin pada Desember 2006 berjumlah 732 jiwa yang termasuk ke dalam 175 KK (monografi Kelurahan Polowijen). Namun, dari data tersebut mengindikasikan bahwa terdapat penurunan jumlah masyarakat miskin pada tahun 2007. Berdasarkan hal tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa jumlah penduduk miskin setelah dilaksanakannya PNPM mengalami penurunan sekitar 17 KK. Hal ini mengindikasikan bahwa PNPM sudah bisa mengurangi jumlah penduduk miskin di Kelurahan Polowijen walaupun masih sangat sedikit. Namun, hal tersebut bisa saja berbeda jika pelaksanaan PNPM telah berjalan dengan baik dan waktu dalam melaksanakan PNPM ini sudah berjalan lama.

b. Tingkat Partisipasi Masyarakat

Tingkat partisipasi masyarakat dapat menjadi ukuran sampai sejauh mana tingkat efektivitas pelaksanaan PNPM di Kelurahan Polowijen. Sehubungan dengan itu peneliti menanyakan “sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat Polowijen terhadap pelaksanaan PNPM?”

Menanggapi pertanyaan peneliti, Ketua BKM Bapak Suwadji mengatakan:

“untuk tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PNPM di Kelurahan Polowijen, masyarakat sudah cukup berpartisipasi pada PNPM ini, mungkin Mas

dapat melihat pada foto-foto waktu pembangunan sarana lingkungan yang telah saya berikan kemarin. Selain itu, Mas juga dapat melihat pada daftar swadaya masyarakat yang ikut pada pembangunan Posyandu di RW 04. Masyarakat memberikan bantuan seperti yang ada pada daftar yang saya berikan kemarin.” (Sumber: wawancara, Kamis 26 Juni 2008, pukul 10.30 WIB).

Peneliti juga menanyakan tentang partisipasi masyarakat kepada bapak Sumarno selaku warga RW 02, beliau mengatakan:

“masyarakat disini cukup berpartisipasi mas terhadap adanya kegiatan PNPM, banyak warga yang ikut membantu jika ada kegiatan PNPM. Warga disini juga merasa beruntung dengan adanya kegiatan PNPM. Selain untuk membantu kegiatan PNPM, masyarakat juga dapat bertemu dengan warga lainnya yang jarang ketemu karena kesibukan masing-masing. Apalagi warga di RW 02, warganya banyak yang berpartisipasi secara langsung terhadap pelaksanaan PNPM.” (Sumber: wawancara, Kamis 28 Agustus 2008, pukul 10.00 WIB).

Selain dari wawancara tersebut, peneliti juga melihat secara langsung bahwa masyarakat Polowijen cukup berpartisipasi terhadap pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana lingkungan. Namun, partisipasi masyarakat pada pelatihan-pelatihan yang diadakan untuk memberdayakan masyarakat kurang mendapat respon dari masyarakat. Dengan kurangnya partisipasi masyarakat Polowijen terhadap pelatihan-pelatihan, maka PNPM ini dapat dikatakan kurang efektif dalam mengurangi kemiskinan di Kelurahan Polowijen karena tujuan inti dari PNPM ini adalah memberdayakan masyarakat.



Tabel 16
Daftar Swadaya Masyarakat

No	NAMA	ALAMAT	BENTUK SWADAYA	Volume dan Satuan
1	Bpk. Watam Ismoyo	Jl. Cakalang	Pemantau	18 hari
2	Bpk. Kojin	Jl. Sembilang	Tukang	18 hari
3	Bpk. Supandri	Jl. Sembilang	Tukang	18 hari
4	Bpk. Indra	Jl. Sembilang	Tukang	18 hari
5	Sdr. Hasan	Jl. Sembilang	Pekerja	18 hari
6	Bpk. Suharno	Jl. Cakalang	Pekerja	18 hari
7	Bpk. Udin	Jl. Cakalang	Batu Kali	4 m ²
8	Ibu Siti	Jl. Cakalang	Konsumsi	18 hari
9	Ibu Tari S.	Jl. Cakalang	Konsumsi	18 hari
10	Bpk No Pangsit	Jl. Cakalang	Konsumsi	18 hari
11	Bpk. Joko	Jl. Sembilang	Pekerja	18 hari
12	Bpk. Fit Samsul	Jl. Cakalang	Pekerja	18 hari
13	Bpk. Tomo	Jl. Cakalang	Pekerja	18 hari
14	Bpk. Themo	Jl. Cakalang	Benang, timba, cangkul, sekop	
15	Bpk. H. Kasdi	Jl. Cakalang	Semen	10 sak
16	Bpk Gofur	Jl. Sembilang	Batu bata	5000 biji
17	GKI Belimbing	Jl. Kerapu	Pasir	4 m ²

Sumber: BKM Polowijen

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa masyarakat sangat berpartisipasi dalam pelaksanaan PNPM. Masyarakat rela mengeluarkan dana, tenaga, serta pikiran pada pelaksanaan PNPM di Kelurahan Polowijen. Selain itu, masyarakat juga ikut bergotong royong dalam pelaksanaan PNPM pada sektor pembangunan

sarana lingkungan. Peneliti juga melihat bahwa masyarakat Kelurahan Polowijen sangat peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, tingkat partisipasi masyarakat Kelurahan Polowijen sudah cukup tinggi terhadap pelaksanaan PNPM yang dijalankan oleh kelurahan serta BKM Polowijen.

c. Tingkat Kapasitas Kelembagaan Masyarakat

Tingkat keefektifan PNPM juga dapat diukur dari tingkat kapasitas kelembagaan masyarakat. Kapasitas kelembagaan masyarakat perlu diukur sampai sejauh mana manfaat dari lembaga tersebut dimasyarakat. Apakah sebuah lembaga dapat berpean dimasyarakat tergantung dari kapasitas lembaga tersebut dimasyarakat sekitarnya. Dalam hal ini peneliti menanyakan “Bagaimana tingkat kapasitas kelembagaan masyarakat di mata masyarakat?”

Menanggapi pertanyaan peneliti, Ibu Evi mengungkapkan:

“dengan adanya pelaksanaan PNPM ini diharapkan agar BKM mempunyai peranan di masyarakat sebagai lembaga yang menaungi segala kegiatan yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat sehingga BKM dapat memiliki arti dan betapa pentingnya BKM bagi masyarakat sehingga kapasitas kelembagaan masyarakat dirasa perlu dimata masyarakat” (Sumber: wawancara, Selasa 16 Setember 2008, pukul 09.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti berpandangan bahwa kapasitas kelembagaan masyarakat telah dirasakan pada masyarakat Kelurahan Polowijen. Dalam hal ini BKM merupakan suatu lembaga masyarakat yang dapat dipercaya, yang didalamnya terdapat orang-orang yang mewakili aspirasi masyarakat dan dapat bertanggungjawab.

Selain dengan ibu Evi, peneliti juga menanyakan kepada Ketua RT 02. Menanggapi pertanyaan peneliti, Ketua RT 02 Bapak Ismoyo mengatakan:

“dengan adanya PNPM yang dijalankan oleh BKM, saya merasa bahwa lembaga masyarakat ini menjadi sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat karena yang melakukan dan menjalankan PNPM adalah BKM . Oleh karena itu kami berharap agar pelaksanaan PNPM di Kelurahan Polowijen dapat ditingkatkan lagi, khususnya kepada para pengurus BKM dalam menjalankan PNPM ini sehingga kapasitas kelembagaan masyarakat dapat lebih tinggi dari kemarin-kemarin.” (Sumber: wawancara, Selasa 16 Setember 2008, pukul 10.00 WIB).

Ibu Dewi selaku warga RT 03 telah merasakan manfaat dari BKM sebagai pelaksana kegiatan PNPM dan kepada peneliti mengungkapkan:

“saya sangat berterima kasih kepada BKM yang telah menjalankan PNPM ini karena dengan adanya PNPM ini bisa memberikan perubahan pada lingkungan saya yaitu adanya pembangunan jalan dan posyandu. Dengan adanya pembangunan tersebut saya jadi lebih enak jika pergi jalan kaki dan dengan adanya posyandu ini saya bisa menjaga kesehatan anak saya dan jika ada apa-apa dengan anak saya, saya bisa langsung datang ke posyandu.” (Sumber: wawancara, Kamis 28 Agustus 2008, pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat kapasitas kelembagaan masyarakat di Kelurahan Polowijen sudah cukup tinggi. Hal ini karena BKM sedang menjalankan PNPM yang hasilnya sudah dirasakan masyarakat Polowijen walaupun pelaksanaan PNPM di Kelurahan Polowijen belum terlaksana secara menyeluruh. Melihat dari tingkat kapasitas kelembagaan yang cukup tinggi dimata masyarakat Kelurahan Polowijen, maka pengurus BKM Polowijen harus lebih meningkatkan kinerjanya dalam melaksanakan PNPM sehingga masyarakat dapat menikmati dan merasakan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Selain itu, kapasitas kelembagaan dari BKM menjadi baik dan memiliki manfaat bagi masyarakat Polowijen.

Untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan di masyarakat, BKM juga melakukan kerjasama dengan pihak aparat pemerintah desa dan organisasi-organisasi masyarakat lain (LPKM, RW, RT, PKK, dan Pejabat Kelurahan) sehingga peran dari kelembagaan masyarakat dapat dirasakan oleh semua masyarakat. Kerjasamanya tersebut seperti :

- 1) Sosialisasi berkelanjutan tentang program PNPM
- 2) Keterlibatan BKM dalam program pembangunan Kelurahan
- 3) Melakukan pemetaan swadaya secara berkelanjutan
- 4) Melakukan pembinaan terhadap KSM ekonomi produktif secara berkesinambungan.

3. Faktor pendukung dan penghambat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat adalah:

a. Faktor pendukung

1) Anggaran.

Dalam melakukan kegiatan, hal yang paling penting adalah dana. Suatu kegiatan dapat berjalan dengan baik dan sesuai tujuan apabila memiliki dana yang

cukup. Namun hal tersebut juga bukan menjadi patokan keberhasilan suatu kegiatan. Dana atau anggaran dapat diperoleh melalui banyak cara. Apabila suatu organisasi memiliki kegiatan namun dana yang ada masih minim, organisasi tersebut harus bisa mencari dana dari donator, sumbangan masyarakat, serta pihak-pihak yang ingin membantu kegiatan tersebut demi keuntungan pribadi (sponsor).

Dalam pelaksanaan PNPM di Kelurahan Polowijen, pemerintah daerah memberikan anggaran dana kepada masing-masing kelurahan. Namun dana yang diberikan masih minim. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada pengurus BKM Polowijen selain tentang pelaksanaan PNPM dan tingkat efektivitas PNPM, peneliti juga menanyakan tentang faktor pendukung dan faktor penghambat dari pelaksanaan PNPM di Kelurahan Polowijen. Oleh karenanya peneliti juga menanyakan “Apa saja faktor pendukung dari PNPM di Kelurahan Polowijen?” Menurut Ketua BKM Polowijen Bapak Suwadi mengungkapkan:

“Sebenarnya peran serta masyarakatlah yang sangat mendukung berjalannya PNPM ini. Namun itu semua juga tidak dapat berjalan tanpa adanya dana dari pemerintah pusat. Dengan adanya dana tersebut, BKM dapat melaksanakan program-program yang ada pada PNPM. Selain faktor tersebut, BKM juga mendapat dukungan dari lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti RT, RW, PKK, Karang Taruna dan pihak Kelurahan Polowijen sendiri untuk dapat melaksanakan PNPM dengan baik. (Sumber: Wawancara, Selasa 1 Juli 2008, pukul 10.00 WIB).

Peneliti juga menanyakan kepada Ibu Evi mengenai faktor pendukung PNPM dan beliau mengatakan:

“untuk faktor pendukung, banyak sekali faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan PNPM. Tapi faktor yang paling penting adalah dana. Bagaimana kita bisa menjalankan kegiatan kalau tidak ada dana untuk membiayai kegiatan tersebut. Selain dana, ada juga faktor pendukung lain seperti adanya partisipasi dari masyarakat untuk ikut menyukseskan pelaksanaan PNPM. (Sumber: Wawancara, Selasa 1 Juli 2008, pukul 08.30 WIB).

Berdasarkan wawancara diatas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa faktor yang paling mendukung pelaksanaan PNPM adalah dana yang cukup. Dengan adanya dana yang cukup diharapkan BKM dapat menjalankan semua program yang ada pada PNPM. Apabila dana masih minim, BKM Polowijen melakukan solusi dengan meminta bantuan kepada masyarakat secara sukarela. Hal ini

ditanggapi dengan baik oleh warga karena warga Kelurahan Polowijen memang memiliki partisipasi yang tinggi terhadap pelaksanaan PNPM di daerahnya.

2) Masyarakat

Peneliti juga menanyakan kepada Kepala Kelurahan Polowijen Bapak Syamsul Arif mengenai faktor pendukung dari PNPM ini. Peneliti menanyakan apa saja faktor pendukung dalam melaksanakan PNPM di Kelurahan Polowijen? Beliau mengatakan:

“untuk faktor pendukung pelaksanaan PNPM ini, menurut saya faktor yang paling mendukung adalah dana yang dianggarkan oleh Pemerintah Pusat untuk pelaksanaan PNPM. Selain dana yang cukup, perlu adanya kesadaran, partisipasi, serta kerjasama yang baik dari masyarakat, lembaga-lembaga, serta aparat kelurahan demi terlaksananya PNPM di Kelurahan Polowijen. Apabila masyarakat ikut mendukung terlaksananya PNPM, maka kegiatan-kegiatan PNPM dapat berjalan dengan baik dan sesuai tujuan.” (Sumber, Wawancara, Kamis 21 Agustus 2008, pukul 11.00 WIB).

Peneliti juga menanyakan kepada warga RW 03 Bapak Santoso mengenai faktor pendukung apa saja dalam melaksanakan PNPM di Kelurahan Polowijen? Bapak Santoso mengatakan:

“salah satu faktor pendukung dalam melaksanakan PNPM adalah adanya dukungan dari masyarakat. Masyarakat harus ikut berpartisipasi dan bergotong royong dalam melaksanakan semua kegiatan-kegiatan PNPM. Apabila masyarakat sudah ikut mendukung maka tujuan PNPM akan cepat tercapai. Disini perlu adanya penanganan langsung dari anggota BKM dalam menyadarkan masyarakat akan pentingnya PNPM.” (Sumber, Wawancara, Kamis 28 Agustus 2008, pukul 14.00 WIB).

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa faktor pendukung PNPM di Kelurahan Polowijen yang pertama adalah dana yang didapat dari Pemerintah Pusat dan yang kedua adalah peran serta masyarakat dan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di Kelurahan Polowijen. Dukungan dari RT/RW terhadap PNPM ini adalah dengan mensosialisasikan PNPM kepada masyarakat untuk bergabung dalam KSM-KSM. Menurut wawancara dengan Ketua BKM Polowijen pada hari Selasa tanggal 1 Juli 2008, sosialisasi yang dilakukan adalah dengan cara “Ketua RT di masing-masing wilayah RT yang bersangkutan menginformasikan sosialisasi tentang PNPM yang telah didapatkan dari forum

rapat rutin RW kepada masyarakat di wilayah RT-nya masing-masing”. (Sumber, Wawancara, Selasa 1 Juli 2008 pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan kondisi dilapangan, peneliti membuat kesimpulan bahwa sosialisasi ini memanfaatkan jenjang struktur sosial formal yang sudah ada di masyarakat (RT - RW). Dengan adanya struktur tersebut, diharapkan masing-masing pihak yang memiliki jabatan ditingkat kelurahan harus lebih proaktif dalam mensosialisasikan PNPM.

b. Faktor penghambat.

1) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan salah satu faktor tercapainya tujuan organisasi. SDM yang berkualitas juga diharapkan mampu menjalankan kegiatan organisasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Apabila SDM yang ada kurang berkualitas maka akan menghambat tujuan dari organisasi tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut perlu adanya sistem yang bisa merubah SDM menjadi berkualitas. Dalam pelaksanaan PNPM di Kelurahan Polowijen, anggota BKM merupakan sumber daya manusia yang melaksanakan PNPM.

Berkaitan dengan faktor penghambat dalam pelaksanaan PNPM di Kelurahan Polowijen. Peneliti mengajukan pertanyaan mengenai “Apa saja faktor penghambat dari PNPM di Kelurahan Polowijen?”

Menurut hasil wawancara, Ibu Evi menjawab pertanyaan peneliti:

“yang menjadi penghambat pada pelaksanaan PNPM di Kelurahan Polowijen adalah adanya kesibukan dari masing-masing pengurus BKM sehingga kinerja dari BKM untuk melaksanakan PNPM kurang berjalan dengan maksimal. Dalam hal ini tidak semua anggota BKM bekerja dengan baik. Saya akui memang banyak anggota yang memiliki kesibukan lain, mereka banyak yang memiliki pekerjaan tetap. Jadi yang bekerja disini hanya saya dan beberapa rekan saya.” (Sumber: Wawancara, Selasa 1 Juli 2008, pukul 10.00 WIB).

Bapak Pramono selaku warga RW 05 juga mengungkapkan kepada peneliti mengenai faktor penghambat dari PNPM ini. Bapak Pramono mengungkapkan:

‘sebenarnya yang menjadi penghambat dalam melaksanakan PNPM adalah orang-orang yang melaksanakan PNPM itu sendiri. Banyak yang kurang aktif dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan PNPM. Jadi orang-orang yang melaksanakan PNPM itu sendiri bisa menjadi penghambatnya kurang berhasilnya

pelaksanaan PNPM di Kelurahan Polowijen.” (Sumber: wawancara, Kamis 28 Agustus 2008, pukul 09.00 WIB).

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa faktor penghambat dari pelaksanaan PNPM di Kelurahan Polowijen adalah kesibukan dari pengurus BKM Polowijen sendiri. Dalam hal ini, tidak semua anggota BKM Polowijen memiliki loyalitas yang tinggi karena masih sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Perlu adanya terobosan baru dalam memecahkan masalah ini. Anggota BKM harus bisa menumbuhkan loyalitasnya untuk dapat melaksanakan PNPM ini dengan baik.

Hasil wawancara tersebut mengungkapkan bahwa anggota BKM yang kurang aktif merupakan faktor penghambat dalam menjalankan PNPM di Kelurahan Polowijen. Dalam hal ini perlu adanya perhatian dan solusi dari Pemerintah Pusat mengenai faktor penghambat dari pelaksanaan PNPM di Kelurahan Polowijen Kecamatan Belimbing Kota Malang agar pelaksanaan PNPM khususnya di Kelurahan Polowijen dan umumnya di Kota Malang dapat berjalan dengan baik dan sesuai tujuan.

C. Analisis Data

1. Proses Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

a. Perencanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat.

Proses perencanaan program kerja dalam suatu organisasi mutlak diperlukan karena hal ini merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Perencanaan pada dasarnya merupakan pengambilan keputusan sekarang tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa depan. Oleh karena itu perencanaan harus dirumuskan dengan tepat agar di masa akan datang kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dapat terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.

Begitu halnya Badan Keswadayaan Masyarakat, perencanaan dalam melaksanakan PNPM tidak diputuskan secara instan. Tentu saja dengan pertimbangan dari kelurahan maupun BKM sendiri. Perencanaan PNPM ini dilakukan secara musyawarah. Namun pada akhirnya kelurahan dan BKM mengacu kepada komponen program dari PNPM. Sesuai dengan panduan PNPM

yang dikeluarkan oleh Sekretariat Pengendali PNPM, komponen program PNPM terdiri dari empat aspek. Aspek tersebut adalah:

a.1. Pengembangan Masyarakat

Pengembangan masyarakat bertujuan agar setiap individu masyarakat dapat mengetahui kemampuan yang ada pada dirinya masing-masing. Kegiatan pengembangan masyarakat dalam bentuk pelatihan-pelatihan diharapkan mampu memberdayakan masyarakat agar menjadi masyarakat yang memiliki kemampuan untuk hidup layak dan keluar dari kemiskinan.

Perlu adanya kesadaran dari masyarakat untuk mengikuti kegiatan pengembangan masyarakat, karena jika masyarakat kurang sadar akan potensi yang ada pada dirinya maka pengembangan masyarakat tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, pengembangan masyarakat sangat perlu dilakukan dalam memberdayakan masyarakat untuk dapat keluar dari kemiskinan.

a.2. Bantuan Langsung Masyarakat

Bantuan Langsung Masyarakat merupakan dana yang dicururkan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah untuk melaksanakan PNPM. Dana yang diberikan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dikelola langsung oleh masyarakat. Dengan adanya dana tersebut, masyarakat dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka dan mengeluarkan mereka dari kategori masyarakat miskin.

Pelaksanaan PNPM pada sektor ekonomi dilakukan melalui ekonomi bergulir atau pinjaman modal. Namun, kegiatan tersebut belum berjalan dikarenakan minimnya dana yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Dengan belum berjalannya ekonomi bergulir, masyarakat belum bisa memperoleh pinjaman dari BKM sebagai modal usaha. Dana Bantuan langsung masyarakat hanya digunakan pada sektor pembangunan sarana lingkungan Kelurahan Polowijen.

a.3. Peningkatan Kapasitas Pemerintahan dan Pelaku Lokal

Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pelaku lokal dilakukan oleh BKM Polowijen dalam melaksanakan PNPM. Dalam hal ini, kelurahan harus ikut berpartisipasi dalam melaksanakan PNPM. BKM juga harus menjalin kerjasama dengan pelaku lokal seperti Karang Taruna, PKK, Organisasi Pemuda, dan lain-

lain. Kerjasama ini bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat turut serta dalam melaksanakan PNPM di Kelurahan Polowijen.

Pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh BKM termasuk kedalam peningkatan kapasitas pemerintahan dan pelaku lokal. Pelatihan ini bertujuan agar masyarakat lebih bisa menemukan potensi yang ada pada diri mereka masing-masing. Apabila masyarakat telah berdaya, maka akan tercipta masyarakat yang mempunyai kemampuan dalam menjalani kehidupan dan dapat keluar dari kategori masyarakat miskin.

a.4. Bantuan Pengelolaan dan Pengembangan Program

Aspek dari PNPM yang terakhir adalah bantuan pengelolaan dan pengembangan program. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu masyarakat, kelurahan dan kelompok yang peduli dengan kehidupan masyarakat miskin untuk dapat lebih mengembangkan program-program yang akan dilaksanakan pada PNPM. BKM harus dapat membantu masyarakat dalam mengelola kegiatan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat miskin. Selain itu, BKM juga harus dapat mengembangkan program yang sudah ada demi tercapainya tujuan PNPM. Kegiatan-kegiatan yang termasuk ke dalam bantuan pengelolaan dan pengembangan program seperti penyediaan konsultan manajemen, pengendalian mutu, evaluasi, dan pengembangan program.

b. Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat.

Inti dari pelaksanaan PNPM adalah memberdayakan masyarakat dan untuk dapat memberdayakan masyarakat perlu adanya lembaga yang melakukan pemberdayaan pada masyarakat itu sendiri. Adapun definisi pemberdayaan yang dikemukakan oleh para ahli jika dilihat dari tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan (Suharto, 1997, 210-224):

- 1) Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung.
- 2) Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, atas dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang

memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.

- 3) Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial.
- 4) Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya.

Pemberdayaan yang dilakukan dalam konsep PNPM yang dijalankan melalui BKM dilakukan menurut pengertian pemberdayaan pada no. 4 (empat) dimana pemberdayaan dilakukan melalui lembaga dan rakyat, pemberdayaan dilakukan agar rakyat dan lembaga tersebut mampu menguasai kehidupannya. Melalui lembaga BKM masyarakat akan bergabung dalam kelembagaan tersebut untuk dapat berperan serta dalam mengatasi permasalahan yang ada diwilayahnya. Dengan partisipasi masyarakat dalam kelembagaan maka akan dapat meningkatkan kapasitas individu masyarakat yang akan membawa pada proses peningkatan kapasitas lembaga dan yang paling besar akan meningkatkan kapasitas masyarakat di wilayah Polowijen.

Dalam upaya pemberdayaan, BKM dapat melakukan strategi seperti yang disarankan oleh Parsons et.al. (1994: 112-113) yang menyatakan bahwa proses pemberdayaan umumnya dilakukan secara kolektif. Walaupun dalam beberapa situasi, strategi pemberdayaan dapat saja dilakukan secara individual namun tetap saja pada gilirannya strategi ini akan berkaitan dengan kolektivitas. Pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras atau mantra pemberdayaan (*empowerment setting*) yaitu:

- 1) Aras mikro.

Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, *stress management*, *crisis Intervention*. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (*Task Centered Approach*).

Tahap awal yang perlu dilakukan dalam upaya pemberdayaan masyarakat adalah dengan melakukan pemberdayaan terhadap individu dari masyarakat Polowijen. Dengan mengadakan pelatihan keahlian bagi setiap individu sesuai dengan bakat dan keahliannya diharapkan agar mereka lebih kreatif dan inovatif dalam menjalani kehidupan. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan keahlian mereka sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup dan keluar dari kemiskinan.

2) Aras Mezzo

Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.

Pemberdayaan ini dilakukan langsung pada lembaga jadi lembaga yang akan diberdayakan dengan pemberian pelatihan, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, hal ini dimaksudkan agar BKM memiliki kemampuan dalam memecahkan permasalahan baik dari internal lembaga maupun permasalahan yang datang dari luar.

3) Aras Makro

Pendekatan ini disebut juga sebagai strategi sistem besar (*Large-system strategy*), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, lobbying, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi sistem besar memandang masyarakat sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak. Pada tahap ini BKM Polowijen belum dapat membuat kebijakan yang dapat mempengaruhi masyarakat secara luas.

a. Pengembangan Masyarakat

a.1). Pengembangan Masyarakat

Salah satu strategi pemberdayaan dalam mengembangkan masyarakat yang dikemukakan oleh Parsons yaitu strategi pemberdayaan aras mikro, strategi pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu dengan pemberian pelatihan, bimbingan konseling dan lain sebagainya. Untuk memberdayakan masyarakat perlu adanya pemberian pelatihan-pelatihan terhadap masyarakat karena pelatihan-pelatihan tersebut dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap masyarakat yang mengikutinya agar memiliki kemampuan dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Oleh karena itu untuk melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat perlu adanya pelatihan-pelatihan kepada masyarakat tersebut agar masyarakat dapat memberdayakan potensi yang ada pada individu masing-masing.

Saat BKM pertama kali dibentuk banyak pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh BKM baik yang dilaksanakan langsung maupun tidak langsung oleh KMW, dinas-dinas terkait, maupun forum komunikasi antar BKM kota dan forum komunikasi BKM Kecamatan Belimbing. Pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh BKM ini biasanya diadakan di Kelurahan Polowijen dan di BKM Polowijen sendiri. Pelatihan tersebut dimaksudkan agar individu masyarakat dapat berkembang dan menjadi masyarakat yang memiliki potensi untuk dapat hidup dengan layak.

a.2). Pengakuan dan Dukungan Masyarakat Kelurahan Polowijen

Dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dicapai melalui pendekatan pemberdayaan dengan teori 5P yaitu:

6. **Pemungkinan:** Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.
7. **Penguatan:** Memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh kembangkan

segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.

8. Perlindungan: Melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
9. Penyokongan: Memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh kedalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
10. Pemeliharaan: Memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Penyokongan disini dimaksudkan dalam memberdayakan masyarakat dibutuhkan bimbingan dari pemerintah dan lembaga masyarakat agar masyarakat mampu meningkatkan kemampuan individu yang dimilikinya. Pengakuan dan dukungan dari pemerintah dan lembaga masyarakat sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam menjalankan setiap program yang akan diikuti oleh masyarakat agar setiap program yang dijalankan dapat tercapai sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan.

Pengakuan dan dukungan masyarakat Kelurahan Polowijen terhadap kegiatan BKM Polowijen dalam melaksanakan PNPM dapat dilihat dari banyaknya jumlah KSM di Kelurahan Polowijen yaitu sebanyak 102 KSM. Banyaknya masyarakat yang bergabung dalam KSM sebagai bentuk upaya masyarakat untuk memperbaiki kondisi mereka dengan memanfaatkan PNPM ini untuk mengembangkan diri mereka sehingga dapat keluar dari kemiskinan.

Adapun bentuk dukungan masyarakat untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana wilayah Kelurahan Polowijen dengan keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pembangunan sarana dan prasarana dengan menyumbangkan tenaga ataupun memberikan makanan ataupun minuman kepada para pekerja.

Partisipasi masyarakat Polowijen terhadap BKM diwujudkan dengan adanya keikutsertaan warga dalam rapat yang diselenggarakan oleh BKM Polowijen, keinginan masyarakat untuk tetap mengikuti PNPM, dan keaktifan masyarakat dalam mengikuti PNPM, hal ini merupakan salah satu wujud kepedulian dan dorongan masyarakat terhadap BKM Polowijen dalam melaksanakan PNPM.

Pengakuan dan dukungan masyarakat terhadap BKM Polowijen dalam melaksanakan PNPM dapat dilihat pula dari diadakannya sosialisasi PNPM kepada masyarakat setiap diadakannya pertemuan RT atau pertemuan RW bahkan disetiap acara apapun yang ada di Kelurahan Polowijen. Dan kerjasama yang dilakukan dengan setiap lembaga yang berada di Kelurahan Polowijen diantaranya: Karang Taruna, PKK, LPMK, LPM dan Kelurahan Polowijen sendiri.

b. Bantuan Langsung Masyarakat

Aspek keuangan menjadi salah satu poin penting pada PNPM dalam melakukan pengembangan masyarakat. Dana yang cukup akan membuat masyarakat lebih kuat dan berdaya dalam mengembangkan potensi yang ada didirinya. Seperti yang dikemukakan oleh Serdamayanti bahwa modal atau keuangan merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan kelambagaan.

Pelaksanaan PNPM yang dijalankan oleh Kelurahan Polowijen mendapat dana dari Pemerintah Pusat sebesar Rp 200.000.000,- yang nantinya dana tersebut akan dikelola oleh BKM dengan menggulirkan dana ini kepada masyarakat agar dapat mengurangi jumlah kemiskinan di Kelurahan Polowijen. Namun dana tersebut tidak digunakan oleh BKM untuk dipinjamkan kepada masyarakat sebagai modal usaha karena RR kurang dari 80%. Untuk pinjaman kepada masyarakat memang belum dilaksanakan oleh sebagian besar BKM di Kota Malang termasuk BKM Polowijen. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan pada sarana lingkungan dan bidang sosial. Kegiatan-kegiatan pada sarana lingkungan

berbentuk pembangunan-pembangunan fasilitas lingkungan, perbaikan-perbaikan gorong-gorong, pembangunan jalan, pembangunan sarana Posyandu, MKC, dan lain-lain. Kegiatan ini mendapat respon yang cukup baik dari warga karena warga dapat merasakan manfaatnya secara langsung dalam kehidupan sehari-hari.

Kegiatan pada bidang sosial adalah tersedianya Sound System untuk masing-masing RW di Kelurahan Polowijen. Dengan penyediaan ini diharapkan agar setiap kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing RW dapat berjalan dengan baik. Selain itu, masing-masing RW tersebut dapat menyewakan sound system tersebut kepada masyarakat yang mempunyai kegiatan. Dengan adanya penyewaan tersebut, masing-masing RW mendapat pemasukan dari uang penyewaan tersebut yang nantinya akan digunakan untuk keperluan dan kegiatan warga.

c. Peningkatan Kapasitas Pemerintahan dan Pelaku Lokal

Salah satu pendekatan umum yang terpenting dalam meningkatkan kapasitas pemerintahan dan pelaku lokal adalah dengan melakukan hubungan kemitraan atau jaringan kerja karena hal ini dapat memperkuat BKM dalam melaksanakan program-program PNPM.

Dalam menjalankan program-program PNPM, BKM Polowijen melakukan kerjasama dengan pihak internal ataupun eksternal kelurahan. Hal ini sangat membantu BKM Polowijen dalam menjalankan program PNPM karena hal ini akan sangat membantu dan akan mendorong BKM lebih mudah mencapai tujuan yang telah direncanakan yaitu mengentaskan kemiskinan.

BKM Polowijen menyadari sepenuhnya bahwa untuk melaksanakan pembangunan baik fisik maupun non fisik di Kelurahan Polowijen sangat diperlukan upaya serius dari waktu ke waktu dan dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh elemen masyarakat dengan harapan dapat melahirkan konsep dan strategi yang bagus dan dapat diterima oleh semua masyarakat Kelurahan Polowijen, melalui proses sosialisasi yang luas dan berkelanjutan lewat media pertemuan rutin warga di setiap RT/RW/PKK/KTI/Jamaah Tahlil/Pengajian dan lain-lain yang pada akhirnya program PNPM yang disosialisasikan oleh BKM dalam setiap pertemuan-pertemuan tersebut dapat dilakukan secara mandiri dan partisipatif khususnya dalam mengatasi kemiskinan di Kelurahan Polowijen.

Kerjasama internal ini dilakukan BKM Polowijen untuk melakukan pembangunan/perbaikan sarana dan prasarana umum yang berada di masyarakat, dan mengeluarkan masyarakat Kelurahan Polowijen dari kantong-kantong kemiskinan. Hal ini dilakukan agar pembangunan tingkat kelurahan berjalan dengan baik dan masyarakat akan meningkat kesejahteraannya.

Kerjasama eksternal yang dilakukan BKM Polowijen dalam berbagi pengalaman dan strategi penanggulangan kemiskinan yaitu oleh BKM-BKM lain baik yang berada di Kecamatan Belimbing ataupun BKM-BKM di Kecamatan/Kelurahan lain. Hal ini dapat memperkuat BKM agar lebih kuat dalam menangani permasalahan yang dihadapi di wilayahnya dengan mengetahui pengalaman dari BKM-BKM lain ataupun dengan adanya kerjasama tersebut sehingga dapat saling berbagi mengenai strategi dalam menangani kemiskinan sehingga kemampuan BKM dalam menghadapi masalah ataupun dalam mengatasi masalah kemiskinan, pembuatan program-program pembangunan di kelurahan dapat lebih baik dan terarah dengan pengetahuan dan kemampuan sumber daya manusia yang meningkat

BKM Polowijen pun bekerjasama dengan instansi-instansi yang terkait sehubungan dengan pengadaan pelatihan untuk masyarakat, hal ini dilakukan agar masyarakat menjadi lebih mandiri dan berdaya.

d. Bantuan Pengelolaan dan Pengembangan Program

Dalam bantuan pengelolaan dan pengembangan program, BKM Polowijen menjadikan lembaganya sebagai seorang pembantu atau *partner* bagi masyarakat untuk mendukung, mendampingi masyarakat dan pemerintah dalam upaya pengembangan masyarakat dan melepaskan masyarakat dari kantong-kantong kemiskinan. BKM Polowijen sudah mampu menciptakan suasana yang kondusif bagi masyarakat Polowijen sehingga dalam proses pemberdayaan ini masyarakat berani mengemukakan pendapatnya. BKM Polowijen sebagai fasilitator dalam menangani kemiskinan di Kelurahan Polowijen juga dapat diposisikan sebagai narasumber untuk masyarakat, karena tugas dari BKM disini bukan hanya melepaskan masyarakat dari kemiskinan namun dapat membuat masyarakat lebih berdaya agar tidak masuk pada kategori masyarakat miskin.

Dalam mengembangkan program-program untuk masyarakat, BKM berperan sebagai fasilitator. BKM melakukan pengembangan program yang dibutuhkan masyarakat untuk dapat lebih memiliki kemampuan sehingga bisa mengembangkan kemampuan yang dimilikinya, pengembangan yang diadakan oleh BKM disesuaikan dengan pengembangan program yang dibutuhkan oleh masyarakat. BKM juga mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan bagi KSM/masyarakat dan melakukan dukungan terhadap sumber daya agar pengembangan program tersebut dapat berjalan dengan baik.

c. Pengawasan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

Pengawasan merupakan bagian atau tahapan selanjutnya sebagai upaya organisasi dalam mencapai tujuannya, pengawasan yang dilakukan secara efektif dapat memberikan kontribusi terhadap terselenggaranya program-program yang transparan. Pengawasan juga mutlak diperlukan, hal ini juga berfungsi menjaga agar seluruh kegiatan yang telah dibuat dapat berjalan dengan benar.

Untuk masalah pengawasan ini, peneliti memperoleh gambaran di BKM Polowijen bahwa PNPM ini dilaksanakan bersama-sama pihak kelurahan dan lembaga lokal perlu melakukan pengawasan terhadap program kerja tersebut. Kegiatan seperti pengembangan masyarakat, bantuan langsung masyarakat, peningkatan kapasitas pemerintahan dan pelaku lokal, dan bantuan pengelolaan dan pengembangan program perlu adanya pengawasan. Hal ini bertujuan agar setiap program yang dijalankan dapat berjalan dengan baik dan transparan.

Jadi dari gambaran yang diperoleh dari BKM Polowijen jelas terlihat bahwa semua program-program yang telah dibuat dan dijalankan semuanya diawasi langsung oleh BKM, Ketua RT-RW, dan juga dikoordinasikan dengan kelurahan maupun kecamatan. Dengan demikian pengawasan merupakan sarana yang tepat agar program-program kerja PNPM dapat terlaksana dengan baik. Sehingga dengan adanya pengawasan dapat memberikan kontribusi untuk menciptakan pemerintahan yang bersih baik di tingkat kelurahan maupun kecamatan.

d. Evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

Evaluasi merupakan tahap terakhir sebagai upaya organisasi dalam mencapai tujuannya. Pengevaluasian yang dilakukan secara terus menerus dan konsisten diharapkan mampu mengetahui kekurangan-kekurangan dari organisasi dalam mencapai tujuannya. Pengevaluasian juga harus dilakukan agar setiap program kerja yang direncanakan dapat diketahui tingkat pelaksanaannya.

Dalam pengevaluasian yang dilakukan oleh BKM, peneliti memperoleh gambaran bahwa pengevaluasian yang dilakukan telah berjalan dengan baik dan terus menerus. Pengevaluasian dilakukan oleh BKM dan pihak kelurahan setiap enam bulan sekali dan dilakukan di BKM sebagai pelaksana dari PNPM di Kelurahan Polowijen.

Adanya evaluasi diharapkan agar BKM dan kelurahan dapat mengetahui kekurangan-kekurangan yang ada pada pelaksanaan PNPM sehingga dapat memperbaiki kekurangan tersebut. Pengevaluasian ini juga bertujuan agar pelaksanaan program yang telah direncanakan dapat berhasil dan sesuai dengan tujuan sehingga tercipta suatu bentuk kerjasama yang baik antara BKM dan kelurahan.

2. Tingkat Efektivitas dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat.

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan, faktor efektivitas selalu mendasari usaha pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini karena efektivitas merupakan alat pengukur tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka pencapaian suatu tujuan.

Banyak pendapat yang mengungkapkan tentang ukuran efektivitas (Steers, 1996: 61) antara lain adalah:

1. Menurut Thorndike, kriteria yang dipakai dalam efektivitas organisasi adalah produktivitas, laba bersih, penyelesaian misi, pertumbuhan serta stabilitas organisasi.
2. Menurut Campbell, ukuran yang digunakan oleh suatu organisasi berjumlah sembilan belas tetapi yang menonjol yaitu keseluruhan prestasi, produktivitas, kepuasan kerja pegawai, laba dan tingkat penghasilan, dan keluarnya pegawai.

3. Menurut Georgopoulos dan Tannenbaum, kriterianya adalah produktivitas, fleksibilitas, dan tidak ada tekanan dari organisasi.
4. Menurut Duncan, ukurannya adalah pencapaian tujuan, intergrasi, dan adaptasi.

Tingkat efektivitas dari PNPM yang dilaksanakan oleh BKM Kelurahan Polowijen dapat diukur sesuai dengan pendapat dari Duncan yang mengatakan bahwa ukuran efektivitas dapat diukur dari tercapainya tujuan, integrasi, dan adaptasi. Namun, disini peneliti mengukur tingkat efektivitas dari PNPM berdasarkan dari tujuan PNPM itu sendiri. Tingkat efektivitas tersebut dapat diukur dari:

a. Tingkat Keberdayaan dan Kemandirian Masyarakat.

Pelaksanaan PNPM yang dilakukan oleh BKM Polowijen memiliki tujuan untuk memberdayakan dan memandirikan masyarakatnya. Apabila masyarakat telah berdaya dan mandiri dengan adanya PNPM, maka dapat dikatakan bahwa PNPM telah efektif dalam menanggulangi masalah kemiskinan yang ada di Kelurahan Polowijen. Masyarakat yang sejahtera dapat hidup dengan layak karena masyarakat telah memiliki kemampuan untuk memenuhi semua kebutuhannya.

Peneliti melihat bahwa tingkat keberdayaan dan kemandirian masyarakat Polowijen sudah cukup baik setelah adanya PNPM. Pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Polowijen dapat dikatakan sudah memadai dan dapat memberdayakan dan memandirikan masyarakatnya karena PNPM yang dilaksanakan oleh BKM Polowijen lebih banyak dilaksanakan pada sektor pembangunan sarana fisik lingkungan.

Masyarakat Polowijen dapat lebih berdaya dan mandiri lagi jika BKM Polowijen telah melaksanakan PNPM pada sektor ekonomi yaitu bantuan langsung masyarakat atau ekonomi bergulir. Kegiatan ekonomi bergulir merupakan dana pinjaman yang diberikan oleh BKM kepada masyarakat yang ingin melakukan usaha kecil-kecilan. Namun, sektor ini belum terlaksana baik di Kelurahan Polowijen maupun kelurahan lain di Kota Malang. Hal ini dikarenakan dana yang diterima oleh masing-masing BKM masih minim.

b. Tingkat Partisipasi Masyarakat.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat merupakan program yang dilaksanakan dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Dalam hal ini BKM hanya sebagai fasilitator dari kegiatan-kegiatan yang ada pada PNPM. Oleh karena itu perlu adanya partisipasi yang tinggi dari masyarakat untuk dapat melaksanakan PNPM ini.

Tingkat partisipasi masyarakat Polowijen terhadap kegiatan PNPM cukup tinggi. Masyarakat Polowijen ikut membantu kegiatan pembangunan sarana lingkungan dan kegiatan-kegiatan lain yang dapat memberikan manfaat untuk dirinya maupun untuk lingkungannya. Masyarakat juga bisa memberikan masukan atau ide kepada anggota BKM dalam melaksanakan PNPM. Ini sangat bermanfaat bagi BKM karena dapat mengetahui kekurangan dalam melaksanakan PNPM. Masyarakat yang seperti ini merupakan masyarakat yang telah ikut berpartisipasi terhadap pelaksanaan PNPM di Kelurahan Polowijen.

Partisipasi masyarakat pada pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh BKM Polowijen kurang baik karena adanya kesibukan dari masing-masing warga. Hal ini harus mendapat perhatian khusus bagi BKM untuk bisa menumbuhkan partisipasi yang diadakan oleh BKM. Para anggota BKM harus bisa mencari solusi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pelatihan-pelatihan yang BKM adakan. Salah satunya adalah dengan memberikan pengarahan dan sosialisasi kepada masyarakat akan manfaat dari pelatihan yang BKM adakan. Dengan mengetahui manfaat dari pelatihan tersebut diharapkan agar masyarakat ikut pada pelatihan-pelatihan yang BKM adakan sehingga tingkat partisipasi masyarakat terhadap seluruh kegiatan PNPM dapat dikatakan sangat tinggi.

c. Tingkat Kapasitas Kelembagaan Masyarakat.

Tingkat kapasitas kelembagaan masyarakat sangat tergantung dari kinerja BKM dalam melaksanakan PNPM. Kapasitas kelembagaan masyarakat seperti BKM dapat lebih besar dimata masyarakat apabila BKM dapat menjalankan PNPM dengan baik dan dapat memberikan manfaat secara langsung bagi kehidupan masyarakat Polowijen. Kepuasan masyarakat juga bisa menjadi ukuran dari kapasitas kelembagaan masyarakat. BKM menjadi sebuah lembaga yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakatnya. Oleh karena itu kapasitas

kelembagaan masyarakat harus cukup baik. Dengan terealisasinya kegiatan-kegiatan yang ada pada PNPM, masyarakat dapat mengerti akan manfaat dari PNPM dan BKM selaku lembaga yang melaksanakan kegiatan PNPM. Dengan adanya tingkat kelembagaan masyarakat yang tinggi seperti ini, diharapkan BKM dapat lebih aktif dan giat lagi dalam melaksanakan PNPM..

Peneliti melihat bahwa BKM Polowijen memiliki kapasitas kelembagaan yang cukup tinggi dimata masyarakat. Dengan adanya PNPM yang dijalankan oleh BKM Polowijen, masyarakat merasakan manfaat dan kepuasan terhadap BKM. Kepuasan masyarakat dapat terlihat dari komentar masyarakat kepada peneliti. Masyarakat cukup puas dengan adanya BKM yang menjalankan PNPM karena adanya perubahan yang dilakukan oleh BKM seperti adanya perbaikan jalan, pembangunan Posyandu dan lain-lain. Dengan adanya kegiatan tersebut, masyarakat dapat lebih mudah dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari.

Kepuasan masyarakat tersebut harus ditanggapi oleh BKM untuk lebih giat dan aktif lagi dalam melaksanakan PNPM. Apabila masyarakat telah puas dengan adanya PNPM, maka kapasitas kelembagaan dari BKM juga bisa dibilang sudah cukup tinggi. Secara garis besar, tingkat efektivitas PNPM ini bisa dikatakan kurang efektif karena kondisi masyarakat Polowijen yang sudah cukup sejahtera dan mandiri. Selain itu, pengembangan masyarakat yang di lakukan Kelurahan Polowijen tidak mendapat respon yang baik dari masyarakat karena masyarakat merasa sudah cukup mampu dan sejahtera. Hal ini belum sesuai dengan tujuan PNPM yaitu memberdayakan masyarakat agar dapat hidup mandiri dan sejahtera.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat.

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung pelaksanaan PNPM adalah:

1. Salah satu faktor pendukung pelaksanaan PNPM adalah dana yang dikucurkan oleh Pemerintah Pusat. Dengan adanya dana tersebut, BKM dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat membuat masyarakat menjadi lebih berdaya. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan saran lingkungan dan bidang sosial.

2. Dukungan dari lembaga-lembaga masyarakat yang berada di Kelurahan Polowijen seperti RT, RW, LPM, LPMK, PKK, Karang Taruna, dan pihak Kelurahan Polowijen sendiri kepada BKM Polowijen dalam melaksanakan PNPM sehingga BKM dapat lebih mudah menjalankan program-program yang ada pada PNPM.
3. Dukungan dari masyarakat yang dapat dilihat dari antusiasme/banyaknya masyarakat yang bergabung dalam KSM-KSM untuk kegiatan ekonomi produktif. Bentuk dukungan masyarakat untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana wilayah Kelurahan Polowijen dengan keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pembangunan sarana dan prasarana dengan menyumbangkan tenaga ataupun memberikan makanan ataupun minuman kepada para pekerja.

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat pelaksanaan PNPM adalah:

1. Kesibukan-kesibukan pribadi pengurus dan anggota yang tidak bisa dihindari, sehingga tidak sedikit tugas-tugas/bidang-bidang yang kurang maksimal dalam melaksanakan fungsinya. Untuk aktif di kantor BKM setiap hari sangat sulit, oleh karena itu para pengurus BKM Polowijen lebih banyak yang bekerja di tempat tinggal mereka, jika ada rapat bulanan mereka baru datang dan melaporkan masalah apa yang ada di lingkungan mereka.

Perlu adanya terobosan dari pemerintah daerah agar bisa menumbuhkan loyalitas yang tinggi terhadap anggota BKM agar dapat melaksanakan PNPM dengan baik dan tujuan dari PNPM dapat tercapai. Selain itu, kondisi masyarakat Polowijen yang sudah sejahtera menyebabkan pengembangan masyarakat melalui pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh BKM menjadi kurang mendapat respon dari masyarakat yang menyebabkan tujuan inti dari PNPM belum berjalan dengan baik sehingga tingkat efektivitas dari PNPM ini bisa dikatakan belum efektif.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian yang dilakukan di BKM Polowijen mengenai pengentasan kemiskinan melalui PNPM (studi tentang efektivitas pelaksanaan PNPM di Kelurahan Polowijen Kecamatan Belimbing Kota Malang) menghasilkan poin penting sebagai berikut:

1. Kegiatan-kegiatan PNPM yang dilakukan BKM Polowijen belum berjalan dengan sempurna karena baru berjalan pada aspek pengembangan masyarakat, bantuan langsung masyarakat, dan peningkatan kapasitas pemerintahan dan pelaku lokal. Pengembangan masyarakat yang dilakukan BKM Polowijen adalah melakukan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat agar masyarakat lebih berdaya dan mempunyai kemampuan dalam menjalani kehidupan. Pengembangan ini bertujuan agar masyarakat dapat hidup mandiri. Namun, masyarakat Kelurahan Polowijen kurang berpartisipasi pada pelatihan yang diadakan oleh BKM karena masyarakat kurang mengetahui manfaat dari pelatihan tersebut. Selain itu, kesibukan dari masyarakat juga menjadi faktor kurang berpartisipasinya masyarakat pada pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh BKM.

Berdasarkan hasil dilapangan peneliti mengambil kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat Kelurahan Polowijen hanya pada pembangunan sarana dan prasarana lingkungan. Hal ini dapat dilihat dari partisipasi masyarakat untuk ikut membantu pada pelaksanaan perbaikan sarana lingkungan.

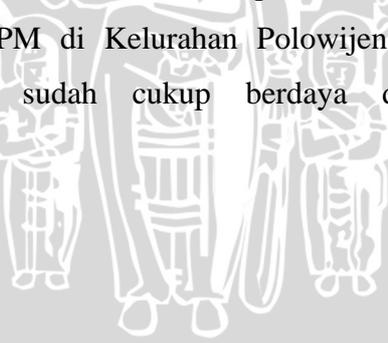
Bantuan langsung masyarakat yang dilakukan oleh BKM Polowijen belum berjalan dengan maksimal. Kejadiannya baru pada perbaikan sarana lingkungan seperti pembuatan jalan, perbaikan gorong-gorong, penyediaan sound system, penyediaan gerobak sampah, dan lain-lain. Kegiatan utama dari bantuan langsung masyarakat adalah kegiatan ekonomi bergulir yaitu pinjaman modal untuk masyarakat yang ingin membuka usaha. Namun, kegiatan ini belum berjalan karena dana yang masih minim.

Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pelaku lokal yang dilakukan BKM Polowijen adalah melakukan kerjasama baik pada pihak internal

maupun eksternal kelurahan. Kerjasama ini bertujuan agar kegiatan PNPM ini dapat berjalan dengan maksimal. Selain itu, perlu adanya partisipasi baik dari warga maupun lembaga-lembaga lokal seperti Karang Taruna, PKK, Organisasi Pemuda, dan lain-lain.

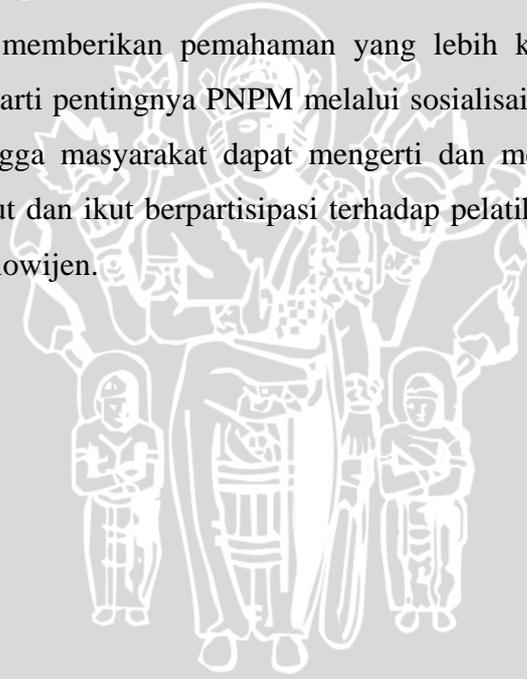
2. Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Polowijen kurang efektif karena masyarakat di Kelurahan Polowijen sudah cukup berdaya. Hal ini terbukti dari tingkat kesejahteraan masyarakat Polowijen yang cukup tinggi. Selain itu, masyarakat yang ikut pada pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh BKM sangat sedikit dikarenakan kesibukan dari masyarakat. Hal ini menandakan bahwa masyarakat kurang berpartisipasi pada tujuan inti dari PNPM
3. Faktor penghambat dalam pelaksanaan PNPM di Kelurahan Polowijen adalah kurangnya loyalitas dari para penggerak PNPM yaitu anggota BKM. Selain itu, masyarakat juga kurang berpartisipasi terhadap pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh BKM yang disebabkan karena kesibukan dari masyarakat tersebut. Hal ini menandakan bahwa masyarakat Kelurahan Polowijen sudah cukup berdaya dan cukup sejahtera dengan kehidupannya sekarang.

Berdasarkan kondisi tersebut diatas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa pelaksanaan PNPM di Kelurahan Polowijen kurang tepat sasaran karena masyarakatnya sudah cukup berdaya dan mandiri dengan kehidupannya sekarang.



B. Saran

1. Pemerintah daerah hendaknya lebih teliti lagi dalam menentukan wilayah mana yang harus didahulukan pelaksanaan PNPM ini karena berdasarkan pengamatan peneliti, masyarakat di Kelurahan Polowijen bisa dikatakan sudah berdaya dan pelaksanaan PNPM ini kurang tepat sasaran..
2. Perlu adanya kesadaran dan loyalitas yang tinggi dari anggota Badan Kswadayaan Masyarakat (BKM) dalam melaksanakan PNPM di Kelurahan Polowijen. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, pelaksanaan PNPM di Kelurahan Polowijen belum berjalan dengan maksimal karena kesibukan dari masing-masing anggota BKM. Oleh karena itu perlu adanya kesadaran dari anggota BKM untuk melaksanakan PNPM dengan baik sehingga tujuan dari PNPM dapat tercapai.
3. BKM hendaknya memberikan pemahaman yang lebih kepada masyarakat Polowijen tentang arti pentingnya PNPM melalui sosialisai-sosialisasi kepada masyarakat. Sehingga masyarakat dapat mengerti dan mengetahui manfaat dari PNPM tersebut dan ikut berpartisipasi terhadap pelatihan-pelatihan yang diadakan BKM Polowijen.



DAFTAR PUSTAKA

- Bawsir, Revrison, et al. 2003. *Pembangunan Tanpa Perasaan*. Jakarta: Elsam.
- Bintarto. 1984. *Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia.
- Bakrie, Aburizal. *Jumlah Kemiskinan di Pulau Jawa*. Diakses pada tanggal 23 Januari 2008 pukul 01.30 WIB dari <http://www.sctvliputan6.com>.
- Cox, David. 2004. *Poverty alleviation programs in the Asia-Pacific Region*, Seminar, 3rd March, Jakarta.
- Daljoeni. 1987. *Seluk Beluk Masyarakat Kota*. Bandung: Alumni Bandung.
- Danim, Sudarman. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- DuBois, Brenda dan Karta Krogsrud Miley. 1992. *Social Work: An Empowering Profession*. Boston: Allyn and Bacon.
- Effendi, Tadjuddin Noer. 1995. *Sumber Daya Manusia, Peluang Kerja dan Kemiskinan*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Ife, Jim. 1995. *Community development: Creating community alternatives-vision, analysis and practice*, Australia: Longman Pty Ltd.
- Korten, David, C. 1985. *Pembangunan Berpusat pada Rakyat*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- 2002. *Menuju abad ke-21, tindakan sukarela dan agenda global*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Menno, S dan A.M. Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Michael, P. Todaro. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga (edisi ketujuh)*. Jakarta: Erlangga.
- Moloeng, L. J. 1996. *Metodologi Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosada Karya.

Neuman, L.W. 1997. *Social research methodes: Qualitative & Quantitative approach*. Boston: Allyn Bacon.

Parsons, Ruth J., James D. Jorgensen, Santos H. Hernandez. 1994. *The Integration of Social Work Practice*. California: Wadsworth, Inc.

Payne, Malcolm. 1997. *Modern social work theory*. Secon edition London: MacMiullan Press Ltd.

Pranarka, A.M.W. & Moeljarto, Vindyandika. 1996. *Pemberdayaan (Empowerment). Pemberdayaan, konsep, dan imlementasi*. Jakarta:CSIS.

Royat, Sujana (Deputi Menko Kesra bidang koordinasi penanggulangan kemiskinan selaku Ketua Pelaksan Tim Pengendali PNPM-Mandiri). 2007. *Panduan Umum PNPM-Mandiri*. Diakses pada tanggal 20 Februari 2007 dari <http://www.pnpm-mandiri.org>

Sajogyo. 1996. *Garis Kemiskinan dan Kebutuhan Minimum Pangan*. Jogyakarta: Aditya Media.

Soedjatmoko. 1984. *Dimensi Manusia Dalam Pembangunan*. Jakarta: LP3S.

Soerjani, Moh., Rofiq Ahmad dan Roji Munir. 1987. *Lingkungan, Sumber Daya Alam dan Kependudukan Dalam Pembangunan*. Jakarta: UI-Press.

Soetrisno, Loekman. 1997. *Kemiskinan, perempuan, pemberdayaan*. Jogyakarta: Kanisius.

Soemitro Remi, Sutyasti dan Prijono Tjiptoherijanto. 1993. *Kemiskinan dan Ketidakmerataan di Indonesia (suatu analisa awal)*. Jakarta : Rineka Cipta

Sokhyian. 2007. *PNPM Mandiri langkah lanjut tanggulangi kemiskinan*. Diakses pada tanggal 20 Februari 2007 dari <http://www.menkokesra.org.id>

Srahm H. Rudoli Penerjemah Rudy Bagiono, et al. 1999. *Kemiskinan dunia ketiga*. Jakarta: Pustaka Cisendo.

Sub direktorat laporan statistic BPS. 2002. *Statistik Indonesia*. Jakarta.

-----, 2007. *Statistik Indonesia*. Jakarta.

Suharto, Edi. 1997. *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran*. Bandung: Lembaga Studi Pembangunan-STKS.

-----2004. *Kemiskinan dan Keberfungsian Sosial: Studi Kasus Rumah Tangga Miskin di Indonesia*. Bandung: STKS Press.

-----2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama.

Sulaiman, Holil. (1996). *Dinamika cita-cita, pandangan, konsep dan pandangan tentang kesejahteraan sosial cerminan dari negara industri maju*. Jakarta: Balitbang Kesos, Depsos. R.I.

Suparlan, Parsudi. 1984. *Kemiskinan di Perkotaan*. Jakarta: Sinar Harapan.

Suprayogo & Tobroni Imam. 2001. *Metodologi penelitian sosial-agama*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Suyanto Bagong. 1995. *Perangkap Kemiskinan : Problem & Strategi Pengentasannya*. Surabaya: Airlangga Univ Press.

Steers, Richard M. 1996. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Airlangga.

Tambunan, Tulus T.H. 1999. *Perekonomian Indonesia, Beberapa Isu Penting*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Tjokroamidjojo, Bintoro dan Mustapadidjaja A.R. 1984. *Teori Strategi Pembangunan Nasional*. Jakarta: Gunung Agung.



INTERVIEW GUIDE

1. Pelatihan-pelatihan apa saja yang dilakukan oleh BKM Polowijen?
2. Apakah pelatihan-pelatihan yang diadakan bermanfaat bagi masyarakat?
3. Bagaimana keikutsertaan warga terhadap kegiatan yang dilakukan oleh BKM Polowijen?
4. Seberapa besar tingkat partisipasi dan dukungan warga terhadap PNPM?
5. Kegiatan apa saja yang dilakukan oleh BKM Polowijen?
6. Digunakan untuk apa saja dana yang didapatkan oleh BKM Polowijen?
7. Berapa dana yang didapatkan oleh BKM Polowijen?
8. Apakah BKM Polowijen melakukan kerjasama dengan lembaga lain dalam melaksanakan PNPM?
9. Bagaimana pelaksanaan bantuan pengelolaan dan pengembangan program yang dilakukan oleh BKM Polowijen?
10. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh BKM Polowijen?
11. Siapa saja yang melakukan evaluasi PNPM dan berapa kali evaluasi dilakukan?
12. Sampai sejauh mana tingkat keberdayaan dan kemandirian warga setelah dilaksanakan PNPM?
13. Bagaimana tingkat kapasitas kelembagaan di mata masyarakat?
14. Apa saja faktor pendukung dari PNPM di Kelurahan Polowijen?
15. Apa saja faktor penghambat dari PNPM di Kelurahan Polowijen?
16. Apakah BKM juga meminta bantuan kepada masyarakat dalam melaksanakan PNPM?

CURRICULUM VITAE

Nama : WAHYU SAFARULLOH
 Nomor Induk Mahasiswa : 0410310131
 Tempat dan tanggal lahir : Tangerang, 17 Oktober 1984
 Alamat asal : Jl. Raden Saleh Gg. Darul Falah Rt 02/13 no.15
 Kel. Karang Tengah Kec. Karang Tengah Kota
 Tangerang.
 Telepon : (021) 732 5727
 Hp : 0856 4938 4860, 081334095959
 Pendidikan : 1). 1991 – 1997 MI. Darul Falah Tangerang
 2). 1997 – 2000 MTs. Al-Islamiah Tangerang
 3). 2000 – 2003 SMU Budi Mulia Tangerang
 4). 2003 – 2004 Bimbingan Belajar Nurul
 Fikri Jakarta Barat
 5). 2004 – 2008 Jurusan Administrasi Publik
 Fakultas Ilmu Administrasi
 Universitas Brawijaya
 Malang.

